

Sorong, 10 Mei 2026

Nomor : 7/SPny/BPP-PBD/SOQ/IV/2026  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : **Penyampaian Laporan Bulanan BPP  
Periode Bulan April 2026**

Kepada Yth.  
**Kepala Sekretariat Badan Pengarah Papua Jayapura**  
Di -  
Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi SHEK (sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi) Badan Pengarah Papua sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2022, serta menindaklanjuti Surat Kepala Sekretariat Badan Pengarah Papua Jayapura Nomor S3/SETBPP/JYP/JYP.02/2025 tanggal 5 Februari 2025 hal Pedoman Penyampaian Laporan Bulanan Percepatan Pembangunan Papua, bersama ini kami sampaikan **Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Pengarah Papua Provinsi Papua Barat Daya periode bulan April 2026**.

Laporan tersebut memuat uraian pelaksanaan tugas dan fungsi BPP yang meliputi aspek kelembagaan, pelaksanaan SHEK pada masing-masing misi percepatan pembangunan Papua (Sehat, Cerdas, Produktif, Damai/Polhukam), dokumentasi kegiatan, capaian kinerja, identifikasi permasalahan dan tantangan, serta rekomendasi tindak lanjut sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan yang solutif.

Adapun dokumen laporan dimaksud dapat diakses melalui tautan berikut:

[https://drive.google.com/drive/folders/1iA\\_kyej2qLa85k6feliWfEnUKWGCURz9?usp=sharing](https://drive.google.com/drive/folders/1iA_kyej2qLa85k6feliWfEnUKWGCURz9?usp=sharing)

Demikian laporan ini kami sampaikan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta komitmen dalam mendukung percepatan pembangunan dan Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat Daya. Atas perhatian dan dukungannya, kami ucapkan terimakasih.

**Anggota Badan Pengarah Papua  
Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya,**

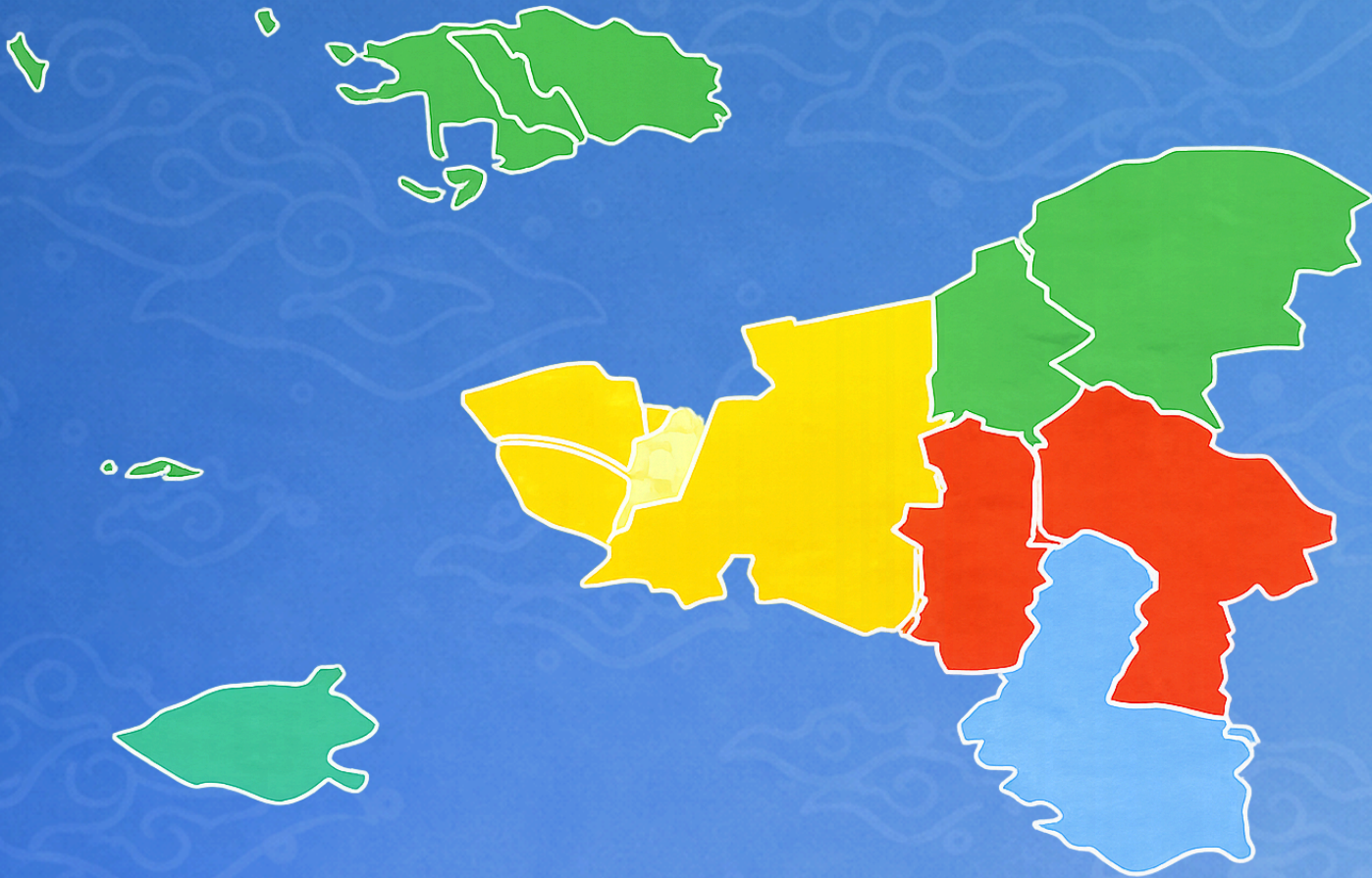


**Drs. OTTO IHALAUW, MA**

Tembusan:

1. Sekretariat Badan Pengarah Papua Manokwari
2. KPPN Sorong selaku Tim Dukungan Administratif Sekretariat Badan Pengarah Papua Provinsi Papua Barat Daya

# LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS & FUNGSI BADAN PENGARAH PAPUA PERIODE BULAN APRIL 2026



## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Pengarah Papua Barat Daya Periode Bulan April Tahun 2026 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengarah Papua Barat Daya dalam rangka mendukung percepatan pembangunan dan Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat Daya. Selain itu, laporan ini dimaksudkan sebagai bahan dokumentasi, evaluasi, serta masukan bagi pimpinan dan pemangku kepentingan terkait dalam pelaksanaan kebijakan dan program strategis ke depan.

Selama periode April 2026, Badan Pengarah Papua Barat Daya telah melaksanakan berbagai kegiatan yang meliputi fungsi pengarahan dalam rangka sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi terhadap pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan, dengan tetap mengedepankan prinsip keberpihakan kepada kepentingan masyarakat Papua Barat Daya, khususnya masyarakat Orang Asli Papua (OAP).

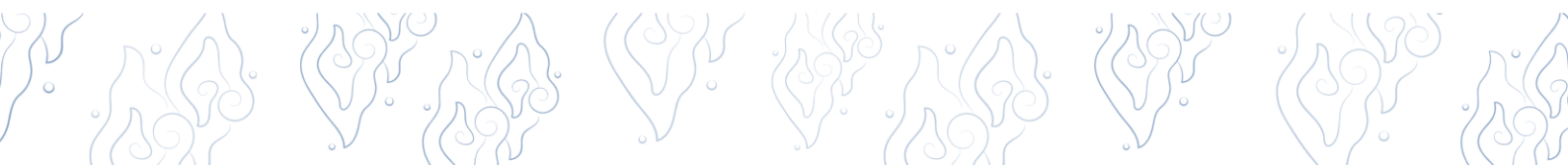
Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan dan memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, saran dan masukan yang konstruktif sangat diharapkan sebagai bahan perbaikan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengarah Papua Barat Daya pada periode selanjutnya.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dan mendukung pelaksanaan tugas Badan Pengarah Papua Barat Daya. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan menjadi acuan dalam upaya mewujudkan percepatan pembangunan yang berkelanjutan di Provinsi Papua Barat Daya.

**Badan Pengarah Papua Provinsi Papua Barat Daya**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	3
BAB I PENDAHULUAN .....	4
1.1    Dasar Hukum (Landasan).....	4
1.2    Maksud dan Tujuan.....	5
1.3    Ruang Lingkup.....	5
BAB II KELEMBAGAAN BADAN PENGARAH PAPUA.....	7
2.1    Definisi BPP .....	7
2.2    Tugas BPP .....	7
2.3    Fungsi BPP.....	7
2.4    Struktur BPP .....	8
BAB III PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI.....	9
3.1    Pelaksanaan SHEK Misi Papua Sehat .....	9
3.2    Pelaksanaan SHEK Misi Papua Cerdas .....	20
3.3    Pelaksanaan SHEK Misi Papua Polhukam (Damai) .....	28
3.4    Pelaksanaan SHEK Strategis (Gabungan Misi).....	36
BAB IV CAPAIAN, PERMASALAHAN DAN TANTANGAN .....	126
4.1    Capaian.....	126
4.2    Permasalahan.....	128
4.3    Tantangan .....	129
BAB V PENUTUP.....	131
5.1    Kesimpulan .....	131
5.2    Rekomendasi.....	133
5.3    Penutup.....	134



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Dasar Hukum (Landasan)

- A. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.
- B. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua.
- C. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Otonomi Khusus Papua.
- D. Kelembagaan Badan Pengarah Papua
  1. Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2022 tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua.
  2. Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2022 tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Papua.
  3. Peraturan Ketua BPP Nomor 1 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengarah Papua.
  4. Keputusan Presiden Nomor 15/M Tahun 2023 tentang Pengangkatan Keanggotaan BP3OKP.
  5. Keputusan Ketua Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penetapan Anggota Kelompok Kerja Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua.
- E. Arah Kebijakan Pembangunan Papua
  1. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP).
  2. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) Tahun 2025-2029.
  3. Peraturan Kementerian PPN/Bappenas Nomor 1 Tahun 2025 tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan Otonomi Khusus Provinsi Papua.

## 1.2 Maksud dan Tujuan

### 1. Maksud

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Pengarah Papua Barat Daya Periode April 2026 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengarah dalam mendukung percepatan pembangunan Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat Daya, serta sebagai media dokumentasi atas kegiatan yang telah dilaksanakan selama periode pelaporan.

### 2. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan laporan ini adalah:

1. Menyajikan informasi mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengarah Papua Barat Daya selama periode April 2026.
2. Menggambarkan capaian, perkembangan, serta hasil kegiatan strategis yang telah dilaksanakan dalam kerangka misi RIPP.
3. Mengidentifikasi permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi SHEK Badan Pengarah.
4. Menyusun rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan dan pemangku kepentingan dalam rangka peningkatan efektivitas pelaksanaan percepatan pembangunan di Provinsi Papua Barat Daya.
5. Memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengarah tetap berpihak pada kepentingan masyarakat Papua Barat Daya, khususnya masyarakat Orang Asli Papua (OAP).

## 1.3 Ruang Lingkup

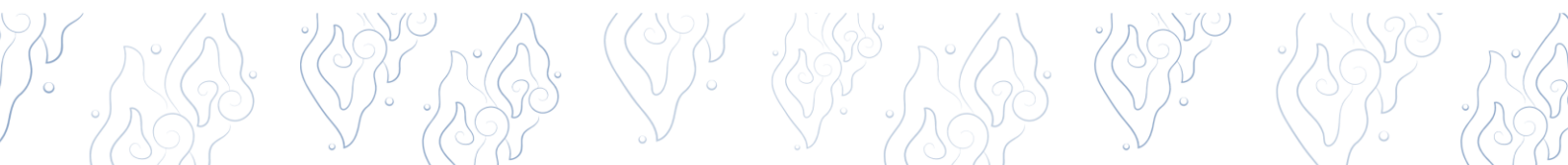
Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Pengarah Papua Barat Daya Periode April 2026 ini mencakup seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Badan Pengarah di wilayah Provinsi Papua Barat Daya selama periode 1–31 April 2026. Ruang lingkup laporan meliputi:

1. Pelaksanaan pengarahan dalam rangka sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi terhadap kebijakan dan program percepatan pembangunan serta Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat Daya.



2. Pelaksanaan kegiatan strategis dalam kerangka misi RIPPP.
3. Capaian yang diperoleh selama periode pelaporan, termasuk hasil koordinasi dan rekomendasi yang dihasilkan.
4. Identifikasi permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengarah.

Laporan ini disusun sebagai gambaran komprehensif atas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengarah Papua Barat Daya selama periode pelaporan, serta sebagai bahan evaluasi dan perbaikan pada periode berikutnya.



## **BAB II**

### **KELEMBAGAAN BADAN PENGARAH PAPUA**

#### **2.1 Definisi BPP**

1. Sesuai Perpres Nomor 121 Tahun 2022 Pasal 1: Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua yang selanjutnya disebut Badan Pengarah Papua adalah badan khusus yang melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi percepatan pembangunan dan pelaksanaan Otonomi Khusus di wilayah Papua.
2. Sesuai Perpres Nomor 121 Tahun 2022 Pasal 2: Badan Pengarah Papua merupakan lembaga nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

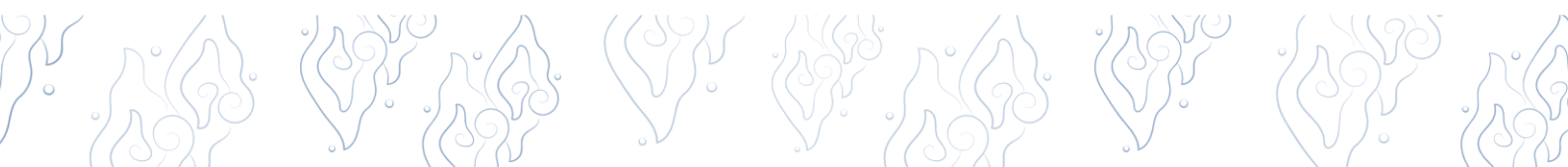
#### **2.2 Tugas BPP**

Sesuai Perpres Nomor 121 Tahun 2022 Pasal 3, Badan Pengarah Papua bertugas untuk melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi percepatan pembangunan dan pelaksanaan Otonomi Khusus di wilayah Papua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **2.3 Fungsi BPP**

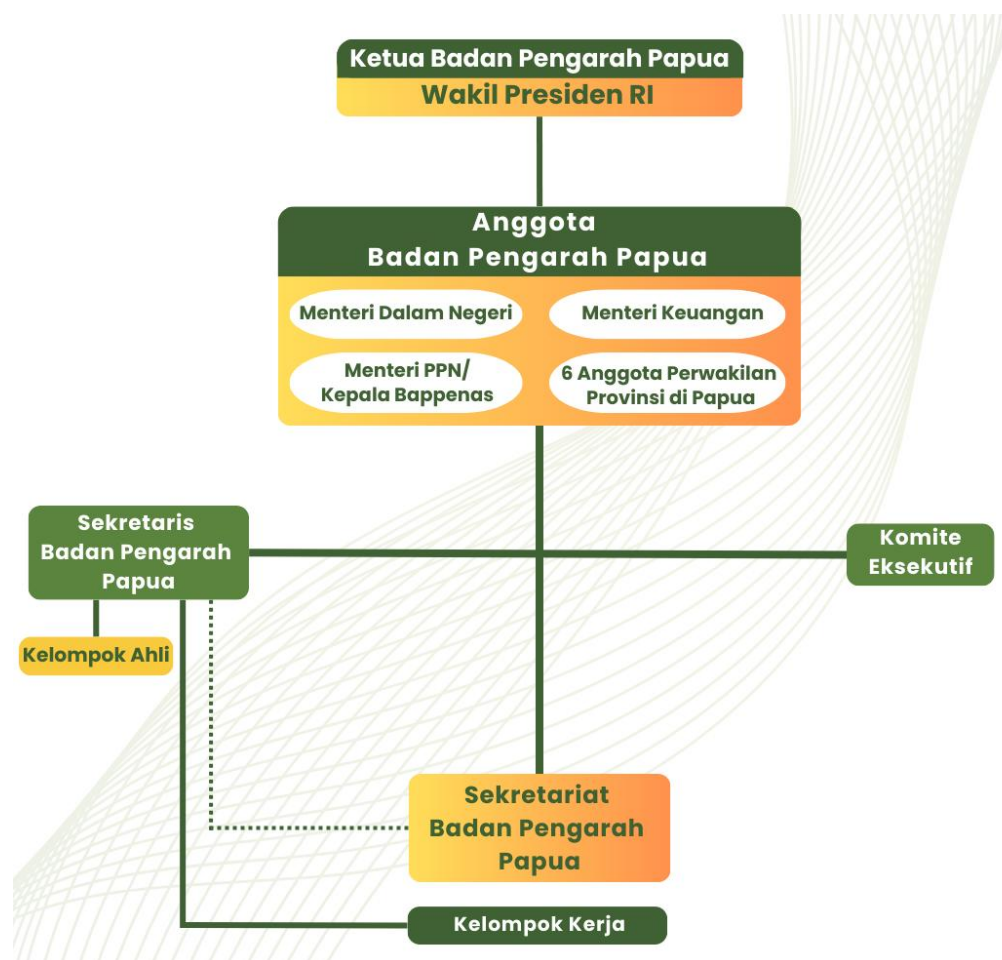
Sesuai Perpres Nomor 121 Tahun 2022 Pasal 4, Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan Pengarah Papua menyelenggarakan fungsi:

- a. Pemberian arah kebijakan umum pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di wilayah Papua;
- b. Sinkronisasi, harmonisasi, dan koordinasi serta pemberian arahan pembinaan, pengawasan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan perencanaan, penganggaran, pendanaan, penerimaan, dan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka Otonomi Khusus dan



- percepatan pembangunan Provinsi Papua yang dilaksanakan oleh Kementerian/lembaga dan pemerintah daerah Provinsi Papua;
- c. Pemberian pertimbangan, arahan, dan rekomendasi penyelesaian permasalahan dan isu strategis pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di wilayah Papua;
  - d. Pengendalian penyelenggaraan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di wilayah Papua dengan berpedoman pada Rencana Induk Percepatan Pembangunan dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua untuk jangka menengah;
  - e. Penyampaian pelaporan pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di wilayah Papua kepada Presiden; dan
  - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

## 2.4 Struktur BPP



## BAB III

### PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI

#### 3.1 Pelaksanaan SHEK Misi Papua Sehat

##### Kegiatan 1

<b>Nama Kegiatan</b>	Keikutsertaan Anggota Pokja Papua Sehat BPP PBD dalam Kegiatan Global COACH Fellowship-Harvard FXB Center for Health and Human Rights
<b>Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)</b>	Rabu-Jum'at, 1-3 April 2026 di Yunani
<b>Latar Belakang</b>	<p>Partisipasi Anggota Pokja Papua Sehat dalam kegiatan Global COACH Fellowship yang diselenggarakan oleh Harvard FXB Center for Health and Human Rights bersama mitra internasional menjadi bagian dari upaya peningkatan kapasitas dan penguatan wawasan strategis terkait keterkaitan antara perubahan iklim dan kesehatan masyarakat.</p> <p>Kegiatan ini diikuti oleh tenaga kesehatan dari berbagai negara dan menjadi ruang pembelajaran kolaboratif melalui seminar intensif, diskusi, serta pertukaran pengalaman lintas global. Dalam kegiatan tersebut, peserta memperoleh pemahaman komprehensif mengenai dampak degradasi lingkungan terhadap kesehatan masyarakat, khususnya pada kelompok rentan dan masyarakat adat.</p> <p>Hal ini relevan dengan kondisi di Tanah Papua yang memiliki tantangan geografis, sosial, dan ekologis yang kompleks. Selain itu, partisipasi delegasi Papua turut memperkuat representasi isu kesehatan masyarakat adat dalam forum global serta membuka peluang kolaborasi internasional dalam penguatan sistem kesehatan berbasis komunitas.</p>

	<p>Hasil kegiatan ini selaras dengan arah kebijakan dalam Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023, khususnya pada Misi Papua Sehat yang menekankan peningkatan kualitas layanan kesehatan dan derajat kesehatan masyarakat. Selain itu, kegiatan ini juga mendukung implementasi Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP), terutama dalam pengarusutamaan pendekatan kesehatan berbasis lingkungan dan komunitas sebagai bagian dari enabling conditions dalam percepatan pembangunan di Tanah Papua.</p>
<p><b>Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan)</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kapasitas Anggota Pokja Papua Sehat terkait isu perubahan iklim dan kesehatan masyarakat.</li> <li>2. Memperluas jejaring kerja sama internasional dalam penguatan sistem kesehatan berbasis komunitas.</li> <li>3. Mendorong penguatan kebijakan kesehatan daerah yang responsif terhadap isu lingkungan dan kesehatan masyarakat adat.</li> <li>4. Mendukung implementasi Misi Papua Sehat dalam RIPPP melalui pendekatan promotif, preventif, dan berbasis lingkungan.</li> <li>5. Menguatkan representasi isu kesehatan masyarakat Papua dalam forum global.</li> </ol>
<p><b>Peserta Kegiatan</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Anggota Pokja Papua Sehat BPP Papua Barat Daya</li> <li>2. Tenaga kesehatan dari berbagai negara</li> <li>3. Penyelenggara dari Harvard FXB Center for Health and Human Rights</li> <li>4. Mitra internasional bidang kesehatan dan hak asasi manusia</li> </ol>
<p><b>Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan</b></p>	<p>Koordinasi, peningkatan kapasitas, kolaborasi, dan penguatan jejaring internasional.</p>
<p><b>Misi/Keterangan</b></p>	<p>Papua Sehat</p>

<p><b>Poin-Poin Pembahasan</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hubungan antara perubahan iklim dan kesehatan masyarakat global.</li> <li>2. Dampak degradasi lingkungan terhadap kelompok rentan dan masyarakat adat.</li> <li>3. Penguatan sistem kesehatan berbasis komunitas dan lingkungan.</li> <li>4. Pendekatan promotif dan preventif dalam pelayanan kesehatan masyarakat.</li> <li>5. Pertukaran pengalaman internasional terkait kebijakan kesehatan berbasis hak asasi manusia.</li> <li>6. Peluang kolaborasi internasional dalam penguatan layanan kesehatan di Papua Barat Daya.</li> <li>7. Pengarusutamaan isu lingkungan dalam perencanaan dan pelaksanaan program kesehatan daerah.</li> </ol>
<p><b>Hasil Kegiatan</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya kapasitas Anggota Pokja Papua Sehat dalam memahami hubungan antara perubahan iklim dan kesehatan masyarakat sebagai bagian dari penguatan kebijakan kesehatan daerah.</li> <li>2. Terbangunnya jejaring kerja sama internasional yang dapat mendukung implementasi program kesehatan di Papua Barat Daya.</li> <li>3. Tersampainya isu strategis kesehatan masyarakat Papua, khususnya masyarakat adat, dalam forum global sebagai bagian dari advokasi kebijakan berbasis lokal.</li> <li>4. Tersusunnya perspektif dan pendekatan awal dalam penguatan sistem kesehatan berbasis komunitas dan lingkungan yang mendukung pelaksanaan Misi Papua Sehat dalam RIPP.</li> <li>5. Mendukung implementasi RAPP melalui penguatan pendekatan promotif dan preventif serta integrasi aspek lingkungan dalam perencanaan dan pelaksanaan program kesehatan di Papua Barat Daya.</li> </ol>

<p><b>Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut</b></p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perlu dilakukan penguatan implementasi pendekatan kesehatan berbasis komunitas dan lingkungan dalam program kesehatan daerah.</li><li>2. Perlu pengembangan kolaborasi internasional untuk mendukung peningkatan kapasitas tenaga kesehatan di Papua Barat Daya.</li><li>3. Hasil pembelajaran dari kegiatan fellowship perlu diintegrasikan dalam perencanaan program Papua Sehat.</li><li>4. Diperlukan penguatan pendekatan promotif dan preventif dalam pelayanan kesehatan masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan dan masyarakat adat.</li><li>5. Perlu mendorong pengarusutamaan isu perubahan iklim dan kesehatan dalam kebijakan pembangunan daerah di Papua Barat Daya.</li></ol>
<p><b>Dokumentasi</b></p>	 

## Kegiatan 2

<b>Nama Kegiatan</b>	Pendampingan terhadap Pemerintah Kota Sorong dalam Pertemuan dengan Siloam Group guna Mendukung Rencana Kerja Sama Investasi di Bidang Kesehatan di Kota Sorong
<b>Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)</b>	Jum'at, 10 April 2026 di UPH Tangerang, Banten
<b>Latar Belakang</b>	Tindak lanjut rencana investasi di bidang kesehatan yang akan dilaksanakan pihak swasta berupa pembangunan RS Siloam di atas aset Pemerintah Kota Sorong, yang menghasilkan kesepakatan untuk pertemuan selanjutnya antara Pemerintah Kota Sorong bersama Manajemen RS Siloam.
<b>Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan)</b>	Menindaklanjuti hasil pertemuan sebelumnya.
<b>Peserta Kegiatan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bapak James Riyadi</li> <li>2. Anggota BPP Papua Sehat Papua Barat Daya</li> <li>3. Wali Kota Sorong</li> <li>4. Manajemen RS Siloam</li> <li>5. Anggota Pokja Sehat BPP PBD</li> <li>6. Anggota Pokja Produktif BPP PBD</li> <li>7. Pimpinan OPD terkait perizinan dan pembangunan infrastruktur</li> </ol>
<b>Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan</b>	Evaluasi, Koordinasi
<b>Misi/Keterangan</b>	Papua Sehat, Papua Produktif
<b>Poin-Poin Pembahasan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyerahkan seluruh proses kepada pengadilan untuk memutuskan langkah selanjutnya.</li> <li>2. Wali Kota Sorong menyampaikan bahwa proses pembongkaran sudah dapat segera dimulai pada minggu tersebut.</li> </ol>

	3. Sekda Kota Sorong mengharapkan adanya pertemuan antara tim legal kedua belah pihak.
<b>Hasil Kegiatan</b>	<p>Poin-poin catatan untuk Pemerintah Kota Sorong:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdapat potensi investasi yang sangat besar dan berdampak pada pengembangan Kota Sorong. Namun demikian, meskipun Bapak Wali Kota sangat positif dalam menyambut investasi tersebut, dukungan dari staf dinilai belum optimal, terutama dalam mengidentifikasi tugas dan melakukan koordinasi guna mendukung kebijakan Wali Kota.</li> <li>2. Kinerja yang kurang profesional dapat berdampak pada menurunnya iklim investasi dan menyebabkan pelaku usaha enggan berinvestasi di Kota Sorong akibat proses yang lambat dan berbelit.</li> <li>3. Untuk memenuhi target serta komitmen Bapak Wali Kota kepada pihak Siloam Group, staf pendukung wajib bekerja berdasarkan target capaian, dan masing-masing OPD terkait melaksanakan setiap target secara bertanggung jawab.</li> </ol> <p>Keberlanjutan pembangunan Siloam merupakan salah satu solusi agar Pemerintah Kota terhindar dari temuan berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penelantaran atau pembiaran aset yang berpotensi menimbulkan kerugian negara sehingga dapat masuk dalam ranah tindak pidana korupsi.</li> <li>2. Dengan masuknya investasi swasta, khususnya Siloam Group yang telah berkomitmen untuk memajukan Papua, maka apabila investasi ini gagal, beberapa kerugian yang dapat terjadi antara lain: <ul style="list-style-type: none"> <li>o Hilangnya peluang membuka lapangan pekerjaan profesional bagi OAP.</li> <li>o Hilangnya peluang bagi anak-anak Papua untuk memperoleh pendidikan di bidang kesehatan</li> </ul> </li> </ol>

	<p>melalui beasiswa yang bersumber di luar APBD/APBN.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o Berpotensi gagalnya pertumbuhan ekonomi daerah.</li> </ul> <p>3. Gedung mangkrak yang dibiarkan akan menjadi wajah buruk bagi Kota Sorong.</p> <p>4. Gedung mangkrak yang dibiarkan dalam jangka waktu lama akan mengalami kerusakan dan menjadi sumber polusi bagi lingkungan sekitar, serta berpotensi membahayakan apabila sewaktu-waktu roboh akibat keropos atau kerusakan karena usia bangunan.</p>
<p><b>Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut</b></p>	<p>Menyerahkan kepada Pemerintah Kota Sorong dan RS Siloam untuk melaksanakan rencana tindak lanjut.</p>
<p><b>Dokumentasi</b></p>	 <p>The top photograph shows a group of approximately ten men seated around a long table in a formal meeting room. They are dressed in batik shirts and suits. The table is set with white plates, glasses, and a large floral centerpiece. The room has white walls and a painting on the wall. The bottom photograph shows three men standing and engaged in conversation. One man is wearing a batik shirt, another a batik shirt with a red and white pattern, and the third a dark suit. They are in the same meeting room as the top photo.</p>

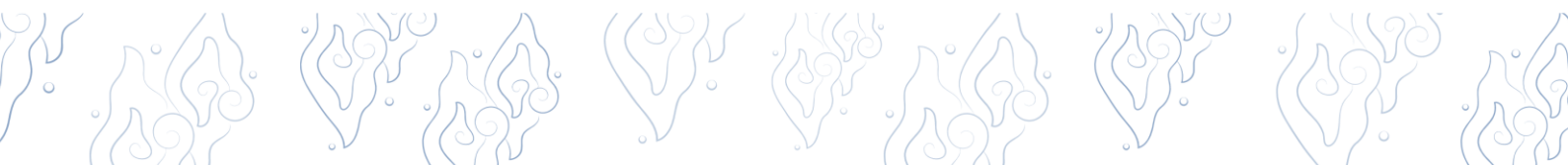


### Kegiatan 3

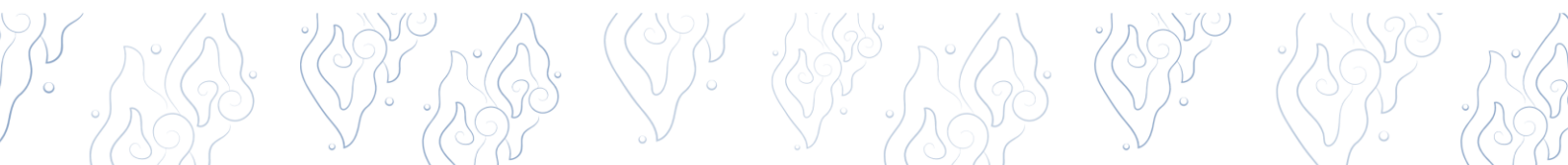
<p><b>Nama Kegiatan</b></p>	<p>SHEK BPP PBD dalam Kegiatan Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Utama dan Kemitraan Provinsi Papua Barat Daya terkait Monitoring dan Evaluasi Implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)</p>
<p><b>Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)</b></p>	<p>Selasa, 14 April 2026 di Hotel Aston Sorong</p>
<p><b>Latar Belakang</b></p>	<p>Provinsi Papua Barat Daya (PBD) telah menunjukkan komitmen yang luar biasa dalam mendukung program strategis nasional ini. Hingga April 2026, cakupan kepesertaan JKN-KIS di wilayah Papua Barat Daya telah mencapai angka signifikan, yaitu di atas 98 persen dari total penduduk. Keberhasilan ini menempatkan Provinsi Papua Barat Daya sebagai salah satu wilayah yang berhasil mencapai Universal Health Coverage (UHC). Meskipun cakupan kepesertaan sudah sangat tinggi, implementasi JKN di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan nyata, seperti kondisi geografis, keterbatasan sarana dan prasarana kesehatan di daerah terpencil (seperti Kabupaten Tambrau dan Maybrat), serta kebutuhan peningkatan mutu layanan pada fasilitas kesehatan yang terdiri dari 123 Faskes dan 11</p>

	Rumah Sakit. Selain itu, diperlukan sinergi berkelanjutan untuk memastikan masyarakat yang telah terdaftar benar-benar merasakan manfaat nyata dari program JKN.
<b>Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan)</b>	Mendorong kolaborasi lintas sektoral dalam rangka penjangkauan layanan JKN di Provinsi Papua Barat Daya.
<b>Peserta Kegiatan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Deputi Direksi Wilayah 12 BPJS Kesehatan, Bapak Sawal Tarigan beserta asisten deputi</li> <li>2. Gubernur Papua Barat Daya</li> <li>3. Anggota Pokja Sehat BPP PBD</li> <li>4. Kepala Dinas Kesehatan Papua Barat Daya</li> <li>5. Dukcapil</li> <li>6. BKPSDM</li> <li>7. Kepala RSAL dan Kepala RSAD</li> </ol>
<b>Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan</b>	Sinkronisas dan Koordinasi
<b>Misi/Keterangan</b>	Papua Sehat
<b>Poin-Poin Pembahasan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sambutan Deputi Direksi Wilayah 12 BPJS Kesehatan, Bapak Sawal Tarigan.</li> <li>2. Sambutan Gubernur Papua Barat Daya.</li> <li>3. Ice breaking oleh Anggota Pokja Sehat BPP PBD.</li> <li>4. Penyampaian dari Kepala Dinas Kesehatan Papua Barat Daya.</li> <li>5. Penyampaian dari Dukcapil.</li> <li>6. Penyampaian dari BKPSDM.</li> </ol> <p>Beberapa poin utama yang dibahas dalam kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program JKN merupakan hak masyarakat sehingga pemerintah daerah perlu menunjukkan komitmen melalui: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Alokasi anggaran yang optimal.</li> <li>○ Kerja sama fasilitas kesehatan dengan BPJS Kesehatan.</li> </ul> </li> </ol>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Upaya bersama untuk memastikan masyarakat OAP memperoleh akses terhadap layanan kesehatan.</li> <li>○ Penekanan pada prinsip pelayanan pasien terlebih dahulu sebelum administrasi.</li> <li>○ Penjelasan bahwa BPJS hanya mengakomodir layanan kesehatan, sedangkan biaya pendamping belum termasuk dalam cakupan layanan.</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Dukcapil menyampaikan adanya perbedaan data antara BPJS dan data kependudukan Dukcapil.</li> <li>3. BKPSDM menyampaikan bahwa belum terdapat penerimaan CPNS di tingkat Provinsi.</li> <li>4. Direktur RS JP Wanane menyampaikan terkait pelayanan cardiovascular serta hubungan dengan dokter bedah jantung vaskular.</li> <li>5. Perlunya penyusunan Perdas/Perdasus terkait wilayah khusus.</li> <li>6. Masih terdapat kekurangan SDM pada Puskesmas.</li> </ol>
<p><b>Hasil Kegiatan</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlaksananya Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Utama dan Kemitraan Provinsi Papua Barat Daya terkait monitoring dan evaluasi implementasi Program JKN.</li> <li>2. Teridentifikasinya beberapa tantangan dalam implementasi JKN di Papua Barat Daya, antara lain perbedaan data kepesertaan BPJS dan Dukcapil, keterbatasan SDM kesehatan, serta kondisi layanan kesehatan di wilayah terpencil.</li> <li>3. Terbangunnya koordinasi dan komitmen lintas sektor dalam mendukung peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan bagi masyarakat Papua Barat Daya, khususnya Orang Asli Papua (OAP).</li> </ol>



	<p>4. Diperolehnya masukan terkait penguatan regulasi, peningkatan layanan fasilitas kesehatan, dan optimalisasi dukungan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan Program JKN.</p>
<p><b>Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut</b></p>	<p>Perencanaan program yang menjamin akses masyarakat terhadap layanan JKN.</p>
<p><b>Dokumentasi</b></p>	



### 3.2 Pelaksanaan SHEK Misi Papua Cerdas

#### Kegiatan 1


<b>Nama Kegiatan</b>	SHEK Anggota Pokja Cerdas bersama Tim Unicef
<b>Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)</b>	Kamis, 9 April 2026 di Sekretariat BPP Papua Barat Daya
<b>Latar Belakang</b>	Program-program UNICEF di Indonesia meliputi keberlangsungan hidup dan kesehatan anak, pendidikan, perlindungan anak, gizi, air dan sanitasi, serta kebijakan sosial.
<b>Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan)</b>	Menerima kunjungan UNICEF wilayah kerja Papua Barat Daya.
<b>Peserta Kegiatan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan Perkamuda UI</li> <li>2. Anggota Perkamuda</li> <li>3. Pokja Cerdas</li> </ol>
<b>Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan</b>	Koordinasi
<b>Misi/Keterangan</b>	Papua Cerdas
<b>Poin-Poin Pembahasan</b>	Perkenalan Perkamuda–UNICEF mengenai peran dan fungsi kerja, termasuk beberapa program pendampingan yang dilaksanakan bersama Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota di Papua Barat Daya.
<b>Hasil Kegiatan</b>	<p>Beberapa program pendampingan yang disampaikan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penguatan keterampilan literasi dan numerasi.</li> <li>2. Pendampingan guru mata pelajaran.</li> <li>3. Pendampingan Program Pendidikan Profesi Guru (PPG).</li> <li>4. Pendampingan persiapan akreditasi sekolah dan penjaminan mutu satuan pendidikan.</li> <li>5. Program terbaru untuk pendidikan tinggi berupa program afirmasi bersama Universitas Indonesia.</li> </ol>

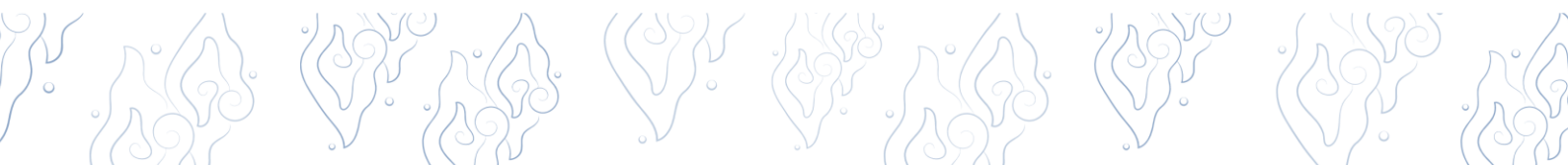
	<p>Hasil diskusi mengharapkan peran BPP dalam memberikan arahan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota maupun Provinsi agar dapat menerima pendampingan dari UNICEF.</p>
<p><b>Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut</b></p>	<p>Diperlukan pembahasan lanjutan terkait Program Afirmasi bersama Kabupaten/Kota dan Provinsi.</p>
<p><b>Dokumentasi</b></p>	 <p>The documentation consists of three photographs. The top photo shows three individuals seated around a conference table during a meeting. The middle photo shows a man in a batik shirt presenting a black t-shirt with the UNICEF logo and the text 'I support unicef' to a woman. The bottom photo shows four people (three women and one man) posing for a group photo in front of a blue backdrop featuring the logos of the Indonesian government, BP3OKP, and the West Papua provincial government, along with the text 'BADAN PENGARAH PERCEPATAN PEMBANGUNAN OTONOMI KHUSUS PAPUA (BP3OKP) PROVINSI PAPUA BARAT'.</p>

## Kegiatan 2

<b>Nama Kegiatan</b>	Peran Aktif BPP PBD (Arahan & SHEK) dalam Kegiatan Kolaborasi Fasilitas Kemitraan Strategis Pemerintah Daerah dan Mitra Pembangunan dalam Penjaminan Mutu Pendidikan oleh BPMP Papua Barat
<b>Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)</b>	Rabu-Jum'at, 22-24 April 2026 di Royal Mamberamo Hotel Sorong
<b>Latar Belakang</b>	<p>Badan Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Papua Barat merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI di Provinsi Papua Barat. Wilayah kerja BPMP Papua Barat mencakup Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya.</p> <p>Dalam rangka mendukung peningkatan mutu pendidikan di Tanah Papua, diperlukan kolaborasi dan sinergi antara pemerintah daerah, BPMP, serta mitra pembangunan dalam penyusunan dan pelaksanaan program prioritas pendidikan yang selaras dengan arah kebijakan nasional dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP).</p>
<b>Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan)</b>	Melaksanakan fungsi harmonisasi dan koordinasi program prioritas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI dengan RIPPP.
<b>Peserta Kegiatan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala BPMP Papua Barat</li> <li>2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Papua Barat Daya</li> <li>3. Anggota BPP Papua Barat Daya dan Pokja Cerdas</li> <li>4. Kepala Bidang SDM Bappeda Kabupaten/Kota di Papua Barat Daya</li> <li>5. Kasubag Perencanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota</li> </ol>

	6. Pengawas TK/PAUD/SD/SMP/SMA
<b>Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan</b>	Harmonisasi, Koordinasi
<b>Misi/Keterangan</b>	Papua Cerdas
<b>Poin-Poin Pembahasan</b>	<p>Kegiatan ini membahas beberapa hal, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi program prioritas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI yang disampaikan langsung oleh masing-masing PIC BPMP. Program tersebut meliputi enam program prioritas dan tujuh kebiasaan Anak Indonesia Hebat.</li> <li>2. Evaluasi permasalahan rapor pendidikan serta strategi penyusunan program yang diusulkan melalui Bappeda, di mana masing-masing Kabupaten/Kota melakukan presentasi terkait kondisi dan kebutuhan daerahnya.</li> <li>3. Sinkronisasi program nasional pendidikan dengan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) yang disampaikan oleh BPP Papua Barat Daya.</li> </ol>
<b>Hasil Kegiatan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi program prioritas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI telah dilaksanakan oleh masing-masing PIC program prioritas BPMP Papua Barat.</li> <li>2. Staf perencanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota memperoleh pemahaman yang lebih baik terkait analisis permasalahan rapor pendidikan di daerah masing-masing.</li> <li>3. Program nasional Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI telah disinkronkan dengan strategi program dalam RIPPP, sehingga perencanaan dan pembiayaan program prioritas dapat didukung melalui TKD Otsus secara berkelanjutan.</li> </ol>

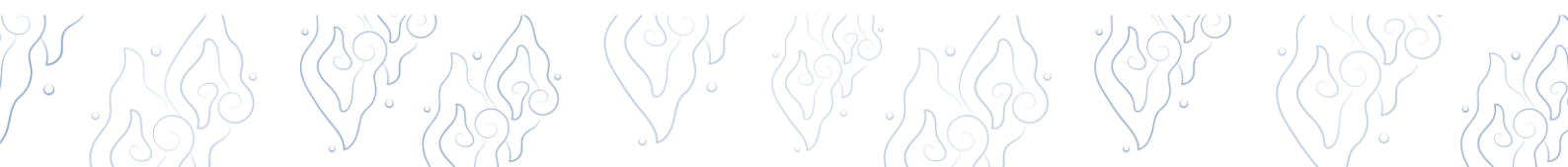
	<p>4. Terbangunnya koordinasi dan sinergi antara BPMP, pemerintah daerah, dan BPP Papua Barat Daya dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan di wilayah Papua Barat Daya.</p>
<p><b>Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wilayah kerja BPMP Papua Barat dinilai perlu dipersempit sehingga diperlukan inisiasi pembentukan BPMP di Provinsi Papua Barat Daya.</li> <li>2. Perlu dibangun sinergi antara BPP Papua Barat Daya dan BPMP melalui kerja sama atau MoU dalam rangka penguatan pengawasan dan peningkatan mutu pendidikan di lima kabupaten dan satu kota di Papua Barat Daya.</li> </ol>
<p><b>Dokumentasi</b></p>	





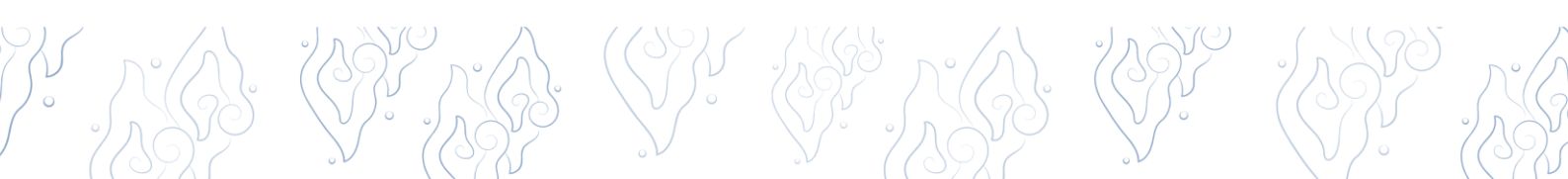
### Kegiatan 3

<b>Nama Kegiatan</b>	Peran serta BPP PBD dalam Kegiatan Penyerahan Bantuan Studi Akhir Tahap I Tahun 2026 & Penandatanganan PKS Provinsi Papua Barat Daya dengan Perguruan Tinggi se-Sorong Raya
<b>Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)</b>	Kamis, 23 April 2026 di Universitas Victory Sorong
<b>Latar Belakang</b>	Kegiatan Penyerahan Bantuan Studi Akhir Tahap I Tahun 2026 dan Penandatanganan PKS Provinsi Papua Barat Daya dengan Perguruan Tinggi se-Sorong Raya merupakan salah satu inisiasi Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat Daya yang telah dilaksanakan sejak tahun 2025.
<b>Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan)</b>	Melaksanakan fungsi koordinasi dan evaluasi dalam menghadiri kegiatan tersebut.
<b>Peserta Kegiatan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gubernur PBD</li> <li>2. Perwakilan MRP</li> <li>3. Perwakilan DPR Pengangkatan PBD</li> <li>4. BPP (Pokja Cerdas)</li> <li>5. Pimpinan PTS di Kota dan Kabupaten Sorong</li> </ol>



	6. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Barat Daya
<b>Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan</b>	Evaluasi dan Koordinasi
<b>Misi/Keterangan</b>	Papua Cerdas
<b>Poin-Poin Pembahasan</b>	Pemerintah Provinsi melalui Dinas Pendidikan melakukan penandatanganan Berita Acara dengan Perguruan Tinggi Swasta di Kota dan Kabupaten Sorong dalam rangka menjamin bahwa tidak ada anak Papua yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi swasta hanya karena keterbatasan pembiayaan.
<b>Hasil Kegiatan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penandatanganan Berita Acara dilakukan antara pimpinan Perguruan Tinggi Swasta dan Gubernur Papua Barat Daya.</li> <li>2. Dana bantuan yang diberikan disesuaikan dengan jumlah mahasiswa yang sedang menempuh studi akhir, sehingga jumlah bantuan antar perguruan tinggi tidak sama.</li> <li>3. Total anggaran bantuan sebesar Rp4 miliar yang bersumber dari dana Otonomi Khusus (Otsus).</li> <li>4. Pemberian bantuan biaya tugas akhir menjadi bentuk komitmen pemerintah. Pada tahun 2026, mekanisme penyaluran bantuan berbeda dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu bantuan tidak lagi diserahkan langsung kepada mahasiswa, melainkan kepada pihak kampus. Hal ini dilakukan sebagai bentuk evaluasi terhadap penerima bantuan studi yang dinilai belum konsisten dalam penggunaan dana bantuan tersebut.</li> </ol>
<b>Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut</b>	Diperlukan perencanaan dan evaluasi terhadap penerima manfaat secara tepat agar bantuan benar-benar diberikan kepada OAP.

Dokumentasi



### 3.3 Pelaksanaan SHEK Misi Papua Polhukam (Damai)

#### Kegiatan 1

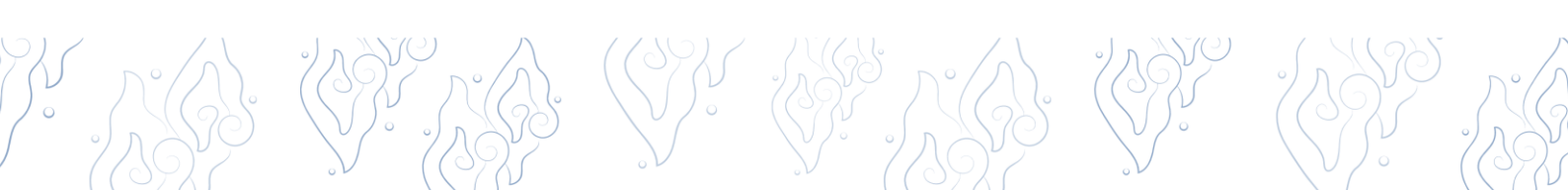
<b>Nama Kegiatan</b>	Pertemuan Anggota BPP Papua Barat Daya bersama Gubernur Papua Barat Daya (Topik: Upaya Penanganan Kasus KKB di Papua Barat Daya)
<b>Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)</b>	Rabu, 1 April 2026 di Kantor Gubernur Papua Barat Daya
<b>Latar Belakang</b>	<p>Situasi keamanan di beberapa wilayah Papua Barat Daya, khususnya di Kabupaten Maybrat dan Tambrau, masih menjadi perhatian pemerintah daerah akibat gangguan keamanan yang berdampak terhadap aktivitas masyarakat, pelayanan pemerintahan, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan daerah.</p> <p>Sehubungan dengan kondisi tersebut, BPP Papua Barat Daya melaksanakan pertemuan bersama Gubernur Papua Barat Daya dalam rangka koordinasi awal terkait upaya penanganan kasus KKB di Papua Barat Daya, termasuk penyampaian rencana fasilitasi pertemuan bersama Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia.</p>
<b>Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan koordinasi bersama Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya terkait kondisi keamanan daerah.</li> <li>2. Menyampaikan rencana fasilitasi pertemuan antara Pemerintah Daerah Papua Barat Daya dan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan RI.</li> <li>3. Mengidentifikasi kebutuhan dan langkah strategis dalam penanganan konflik dan pemulihan kondisi masyarakat terdampak.</li> <li>4. Mendukung penguatan sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam menjaga stabilitas keamanan di Papua Barat Daya.</li> </ol>

<b>Peserta Kegiatan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gubernur Papua Barat Daya</li> <li>2. Anggota BPP Papua Barat Daya</li> </ol>
<b>Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan</b>	Sinkronisasi, koordinasi, dan evaluasi.
<b>Misi/Keterangan</b>	Papua Polhukam/Damai
<b>Poin-Poin Pembahasan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Situasi keamanan terkini di wilayah Papua Barat Daya, khususnya Kabupaten Maybrat dan Tambrau.</li> <li>2. Dampak gangguan keamanan terhadap pelayanan pemerintahan dan aktivitas masyarakat.</li> <li>3. Rencana fasilitasi audiensi/pertemuan bersama Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan RI.</li> <li>4. Penguatan koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam penanganan konflik sosial dan keamanan.</li> <li>5. Upaya pemulihan kondisi sosial masyarakat terdampak konflik.</li> </ol>
<b>Hasil Kegiatan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlaksananya koordinasi antara Anggota BPP Papua Barat Daya dan Gubernur Papua Barat Daya terkait kondisi keamanan daerah.</li> <li>2. Tersampainya rencana fasilitasi pertemuan bersama Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan RI terkait penanganan kasus KKB di Papua Barat Daya.</li> <li>3. Terbangunnya kesepahaman terkait pentingnya sinergi pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam menjaga stabilitas keamanan daerah.</li> <li>4. Diperolehnya masukan awal terkait langkah penanganan konflik dan pemulihan kondisi masyarakat terdampak.</li> </ol>
<b>Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlu dilakukan koordinasi lanjutan dengan pemerintah pusat terkait penanganan situasi keamanan di Papua Barat Daya.</li> </ol>


	<p>2. Perlu dilakukan fasilitasi pertemuan/audiensi bersama Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan RI sebagai tindak lanjut koordinasi daerah.</p> <p>3. Pemerintah daerah dan BPP Papua Barat Daya perlu memperkuat sinergi dalam mendukung stabilitas keamanan dan pemulihan masyarakat terdampak konflik.</p> <p>4. Diperlukan penguatan komunikasi dan pendekatan dialogis bersama tokoh masyarakat dan pemangku kepentingan daerah.</p>
<b>Dokumentasi</b>	-

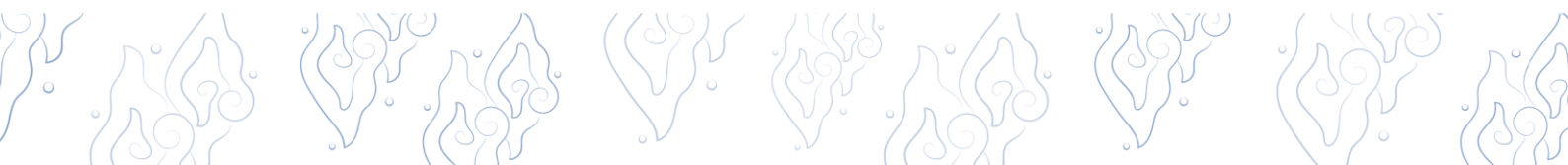
## Kegiatan 2

<b>Nama Kegiatan</b>	Pertemuan Anggota BPP Papua Barat Daya bersama Anggota KEPPP (Bapak Ignatius Yogo)
<b>Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)</b>	Senin, 13 April 2026 di Jakarta
<b>Latar Belakang</b>	<p>Dalam rangka mendukung percepatan pembangunan Otonomi Khusus Papua, diperlukan penguatan koordinasi dan sinergi antar lembaga, khususnya antara Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BPP) dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua (KEPPP).</p> <p>Pertemuan ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya membangun komunikasi, harmonisasi program, serta penguatan kolaborasi kelembagaan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi percepatan pembangunan di Papua Barat Daya.</p>



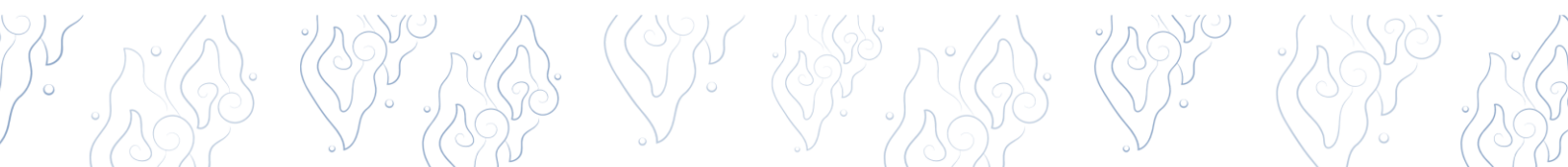
<b>Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membangun sinergi dan koordinasi antara BPP Papua Barat Daya dan KEPPP.</li> <li>2. Memperkuat komunikasi dan harmonisasi pelaksanaan program percepatan pembangunan Papua.</li> <li>3. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan dalam kerangka Otonomi Khusus Papua.</li> <li>4. Mendorong kolaborasi lintas sektor dalam mendukung pembangunan Papua Barat Daya.</li> </ol>
<b>Peserta Kegiatan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Anggota BPP Papua Barat Daya</li> <li>2. Anggota KEPPP, Bapak Ignatius Yogo</li> </ol>
<b>Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan</b>	Sinkronisasi, harmonisasi, koordinasi, dan evaluasi
<b>Misi/Keterangan</b>	Papua Damai/Polhukam, membangun sinergitas
<b>Poin-Poin Pembahasan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penguatan koordinasi dan komunikasi antara BPP Papua Barat Daya dan KEPPP.</li> <li>2. Sinkronisasi program percepatan pembangunan Papua sesuai arah kebijakan Otonomi Khusus Papua.</li> <li>3. Penguatan sinergi kelembagaan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi percepatan pembangunan di Papua Barat Daya.</li> <li>4. Kolaborasi lintas sektor dalam mendukung program prioritas pembangunan Papua.</li> <li>5. Dukungan terhadap pelaksanaan fungsi SHEK dalam pengawalan pembangunan Otonomi Khusus Papua.</li> </ol>
<b>Hasil Kegiatan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlaksananya pertemuan koordinasi antara BPP Papua Barat Daya dan KEPPP dalam rangka penguatan sinergi kelembagaan.</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Terbangunnya komunikasi dan kesepahaman terkait pentingnya kolaborasi dalam mendukung percepatan pembangunan Papua Barat Daya.</li> <li>3. Diperolehnya masukan terkait penguatan koordinasi program dan pelaksanaan tugas kelembagaan dalam kerangka Otonomi Khusus Papua.</li> <li>4. Terciptanya komitmen bersama untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi lintas sektor dalam mendukung pembangunan Papua Barat Daya.</li> </ol>
<p><b>Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlu dilakukan koordinasi dan komunikasi secara berkala antara BPP Papua Barat Daya dan KEPPP.</li> <li>2. Perlu penguatan sinergi program dan kegiatan dalam mendukung percepatan pembangunan Papua Barat Daya.</li> <li>3. Diperlukan kolaborasi lintas sektor dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan Otonomi Khusus Papua.</li> <li>4. Perlu dilakukan tindak lanjut koordinasi terkait program prioritas pembangunan Papua Barat Daya.</li> </ol>
<p><b>Dokumentasi</b></p>	




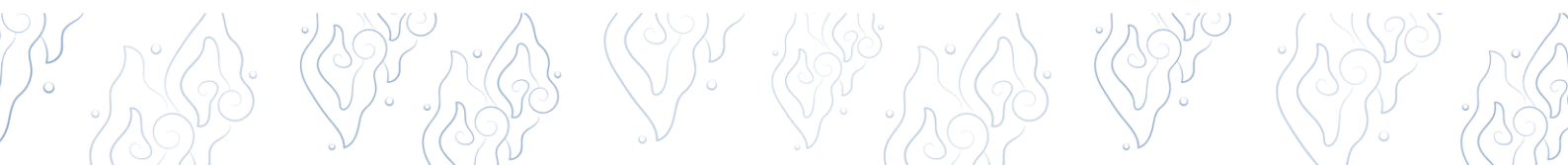
### Kegiatan 3

<b>Nama Kegiatan</b>	Penyambutan dan Penjamuan Tim Wakil Presiden RI oleh BPP PBD dalam Rangka Kunjungan Kerja Wakil Presiden di Papua Barat Daya
<b>Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)</b>	Senin, 20 April 2026 di Mamberamo Seafood Restoran Sorong
<b>Latar Belakang</b>	<p>Kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia ke Provinsi Papua Barat Daya merupakan bagian dari agenda pemerintah pusat dalam melakukan pemantauan, koordinasi, serta penguatan pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan masyarakat di wilayah Papua Barat Daya.</p> <p>Dalam rangka mendukung kelancaran kunjungan kerja tersebut, BPP Papua Barat Daya melaksanakan kegiatan penyambutan dan penjamuan kepada Tim Wakil Presiden RI, termasuk unsur Paspampres dan Sekretariat Wakil Presiden, sebagai bentuk dukungan koordinasi, komunikasi, dan sinergi kelembagaan selama pelaksanaan kunjungan kerja di Papua Barat Daya.</p>
<b>Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendukung kelancaran pelaksanaan kunjungan kerja Wakil Presiden RI di Papua Barat Daya.</li> <li>2. Melaksanakan koordinasi dan komunikasi bersama Tim Wakil Presiden RI.</li> <li>3. Membangun sinergi antara pemerintah daerah, BPP Papua Barat Daya, dan Tim Wakil Presiden RI.</li> <li>4. Memfasilitasi kebutuhan koordinasi awal terkait agenda kunjungan kerja Wakil Presiden RI di Papua Barat Daya.</li> </ol>
<b>Peserta Kegiatan</b>	1. Tim Sekretariat Wakil Presiden RI



	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Tim Paspampres Wakil Presiden RI</li> <li>3. Anggota dan Pokja BPP Papua Barat Daya</li> <li>4. Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat Daya</li> <li>5. Unsur pendukung kunjungan kerja Wakil Presiden RI</li> </ol>
<b>Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan</b>	Koordinasi, fasilitasi, dan komunikasi.
<b>Misi/Keterangan</b>	Papua Damai/Polhukam dan Kolaborasi lintas sektor
<b>Poin-Poin Pembahasan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi pelaksanaan kunjungan kerja Wakil Presiden RI di Papua Barat Daya.</li> <li>2. Dukungan pengamanan dan kesiapan teknis pelaksanaan kegiatan kunjungan kerja.</li> <li>3. Sinkronisasi agenda kegiatan bersama pemerintah daerah dan Tim Wakil Presiden RI.</li> <li>4. Penguatan komunikasi dan sinergi lintas lembaga selama pelaksanaan kunjungan kerja.</li> <li>5. Dukungan BPP Papua Barat Daya terhadap kelancaran agenda kunjungan kerja Wakil Presiden RI.</li> </ol>
<b>Hasil Kegiatan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlaksananya penyambutan dan penjamuan Tim Wakil Presiden RI dalam rangka kunjungan kerja di Papua Barat Daya.</li> <li>2. Terbangunnya koordinasi dan komunikasi antara BPP Papua Barat Daya, Pemerintah Daerah, dan Tim Wakil Presiden RI.</li> <li>3. Tersampainya informasi awal terkait agenda dan pelaksanaan kunjungan kerja Wakil Presiden RI di Papua Barat Daya.</li> <li>4. Terwujudnya sinergi dan dukungan lintas sektor dalam mendukung kelancaran kunjungan kerja Wakil Presiden RI.</li> </ol>

<b>Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perlu penguatan koordinasi lintas lembaga dalam mendukung pelaksanaan agenda kunjungan kerja pemerintah pusat di Papua Barat Daya.</li><li>2. Perlu menjaga komunikasi dan sinergi antara pemerintah daerah, BPP Papua Barat Daya, dan unsur pendukung kegiatan pemerintahan pusat.</li><li>3. Diperlukan evaluasi pelaksanaan kegiatan sebagai bahan perbaikan koordinasi pada kegiatan kunjungan kerja berikutnya.</li></ol>
<b>Dokumentasi</b>	




### 3.4 Pelaksanaan SHEK Strategis (Gabungan Misi)

#### Kegiatan 1

<b>Nama Kegiatan</b>	Pertemuan BPP PBD bersama Asisten Deputi Politik, Keamanan, Hukum, dan HAM Setwapres
<b>Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)</b>	Rabu, 8 April 2026 di Sekretariat Wakil Presiden
<b>Latar Belakang</b>	<p>Pelayanan kesehatan di wilayah 3T di Papua memiliki risiko tinggi karena tenaga kesehatan menjadi ujung tombak pelayanan, khususnya pada daerah yang rawan dari sisi keamanan. Salah satu kejadian yang memprihatinkan terjadi di Kabupaten Tambrau, Papua Barat Daya, yaitu pembunuhan terhadap tiga orang oleh kelompok kriminal bersenjata, di mana salah satu korban merupakan tenaga kesehatan.</p> <p>Peristiwa tersebut menimbulkan kekhawatiran bagi tenaga kesehatan lainnya yang bertugas di lokasi yang sama, sehingga sempat mengakibatkan kekosongan layanan kesehatan. Selain itu, adanya beberapa program percepatan seperti <i>Hospital-Based Specialist</i> dan percepatan pengadaan bidan desa menjadi isu krusial yang memerlukan koordinasi serta harmonisasi program antara pemerintah pusat dan daerah.</p>
<b>Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan)</b>	Melaporkan perkembangan layanan kesehatan kepada Asisten Deputi Politik, Keamanan, Hukum, dan HAM Setwapres.
<b>Peserta Kegiatan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Asisten Deputi Politik, Keamanan, Hukum, dan HAM Setwapres</li> <li>2. Anggota BPP Papua Barat Daya</li> <li>3. Anggota Pokja Sehat BPP Papua Barat Daya</li> </ol>

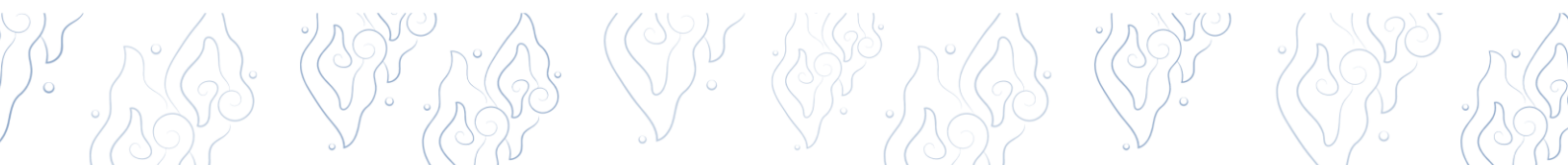
<b>Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan</b>	Koordinasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
<b>Misi/Keterangan</b>	Papua Sehat, Papua Polhukam/Damai
<b>Poin-Poin Pembahasan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Situasi keamanan di Papua Barat Daya.</li> <li>2. Rencana pendampingan oleh Anggota BPP dalam pertemuan antara Gubernur Papua Barat Daya, Bupati Maybrat, dan Bupati Tambrauw bersama Menkopolhukam RI.</li> </ol>
<b>Hasil Kegiatan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Situasi terkini terkait kondisi keamanan serta rencana penyelesaian konflik di Papua Barat Daya, khususnya di Kabupaten Maybrat dan Tambrauw.</li> <li>2. Adanya penebalan pasukan keamanan, namun belum disertai dengan satu komando yang terintegrasi, sehingga ketika terjadi gangguan keamanan proses penyelesaian konflik terkesan lambat akibat jalur komando yang terlalu panjang.</li> <li>3. BPP Papua Barat Daya akan mendampingi Gubernur Papua Barat Daya beserta dua bupati dari daerah konflik untuk melakukan pertemuan dengan Menkopolhukam RI.</li> </ol> <p>Arahan dari Asisten Deputi Politik, Keamanan, Hukum, dan HAM Setwapres:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengapresiasi berbagai upaya yang telah dilakukan oleh BPP Papua Barat Daya, termasuk rencana pertemuan antara Gubernur Papua Barat Daya beserta dua bupati dari daerah konflik bersama Menkopolhukam RI.</li> <li>2. Mengharapkan agar Anggota BPP Papua Barat Daya melaporkan hasil pertemuan bersama Menkopolhukam RI.</li> </ol>

	3. Memberikan arahan terkait program-program bidang kesehatan, khususnya <i>Hospital-Based Specialist</i> serta rencana program Bidan Desa.
<b>Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut</b>	Akan dilaksanakan pertemuan lanjutan terkait program <i>Hospital-Based Specialist</i> dan program Bidan Desa.
<b>Dokumentasi</b>	

## Kegiatan 2

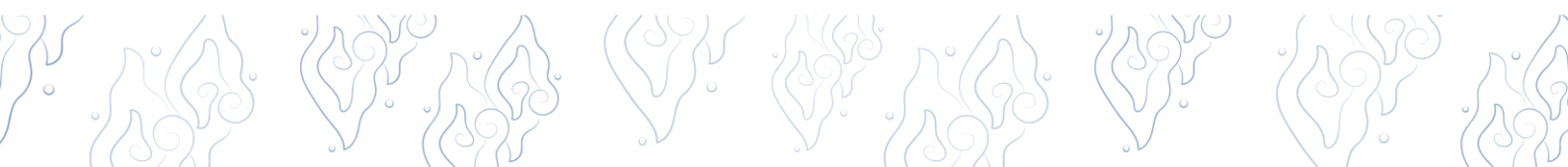
<b>Nama Kegiatan</b>	BPP PBD Fasilitasi Pertemuan/Audiensi Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat Daya bersama Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan RI (Topik: Upaya Penanganan Kasus KKB di Papua Barat Daya)
<b>Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)</b>	Kamis, 9 April 2026 di Kantor Kemenko Polkam RI, Jakarta
<b>Latar Belakang</b>	Situasi keamanan di wilayah Papua Barat Daya, khususnya di beberapa distrik di Kabupaten Maybrat, masih menghadapi tantangan serius akibat aktivitas Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Kondisi tersebut berdampak terhadap stabilitas keamanan masyarakat, pelayanan pemerintahan, aktivitas pendidikan, kesehatan, serta pembangunan daerah secara umum. Insiden kontak tembak kembali terjadi pada 21 Maret 2026 di Kampung Sori, Distrik Aifat Selatan yang

	<p>mengakibatkan dua aparat TNI meninggal dunia. Peristiwa ini menunjukkan bahwa pola konflik masih berulang dengan karakteristik serangan mendadak serta memanfaatkan kondisi geografis yang sulit diakses. Gangguan keamanan yang terjadi juga menyebabkan pengungsian masyarakat dari kampung-kampung terdampak, menurunnya aktivitas ekonomi masyarakat, serta terganggunya pelayanan dasar pemerintah kepada masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan langkah koordinatif dan sinergis antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten dalam rangka percepatan penanganan situasi keamanan dan pemulihan kondisi sosial masyarakat.</p> <p>Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat Daya bersama Pemerintah Kabupaten Maybrat melaksanakan fasilitasi pertemuan/audiensi dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia guna menyampaikan kondisi riil di lapangan serta memperoleh dukungan kebijakan dan langkah strategis pemerintah pusat dalam penanganan kasus KKB di Papua Barat Daya.</p>
<p><b>Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan)</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyampaikan kondisi keamanan terkini di wilayah Kabupaten Maybrat dan Papua Barat Daya kepada Pemerintah Pusat.</li> <li>2. Memperkuat koordinasi antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat dalam penanganan kasus KKB.</li> <li>3. Memohon dukungan kebijakan, pengamanan, dan percepatan pemulihan sosial masyarakat terdampak konflik.</li> <li>4. Mendorong percepatan pemulangan pengungsi dan pemulihan pelayanan dasar masyarakat.</li> </ol>

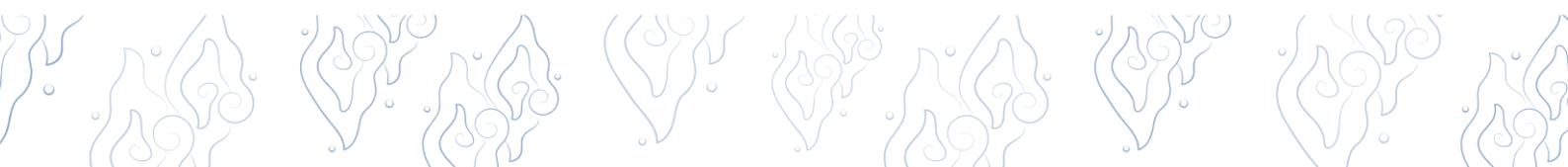


	5. Membangun sinergi lintas sektor dalam upaya menjaga stabilitas keamanan dan pembangunan daerah.
<b>Peserta Kegiatan</b>	1. BP3OKP Papua Barat Daya 2. Gubernur Provinsi Papua Barat Daya beserta jajaran 3. Bupati Maybrat beserta jajaran
<b>Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan</b>	Sinkronisasi, evaluasi, dan koordinasi.
<b>Misi/Keterangan</b>	Papua Polhukam/Damai dan Papua Produktif
<b>Poin-Poin Pembahasan</b>	<p>Dalam pertemuan/audiensi tersebut, beberapa poin pembahasan utama yang disampaikan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Kondisi Keamanan Daerah</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Penyampaian situasi keamanan terkini di Kabupaten Maybrat dan wilayah terdampak aktivitas KKB.</li> <li>○ Dampak gangguan keamanan terhadap masyarakat sipil dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.</li> </ul> </li> <li>2. <b>Penanganan Pengungsi</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Kondisi masyarakat yang masih berada di lokasi pengungsian.</li> <li>○ Kebutuhan dukungan logistik, kesehatan, pendidikan, dan pemulihan sosial ekonomi masyarakat terdampak.</li> </ul> </li> <li>3. <b>Penguatan Aparat Keamanan</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Perlunya penguatan koordinasi TNI/Polri dalam menjaga stabilitas keamanan daerah.</li> <li>○ Permintaan peningkatan pengamanan pada wilayah rawan gangguan keamanan.</li> </ul> </li> <li>4. <b>Pemulihan Pelayanan Pemerintah</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Upaya normalisasi pelayanan pendidikan, kesehatan, dan administrasi pemerintahan di distrik terdampak.</li> </ul> </li> </ol>

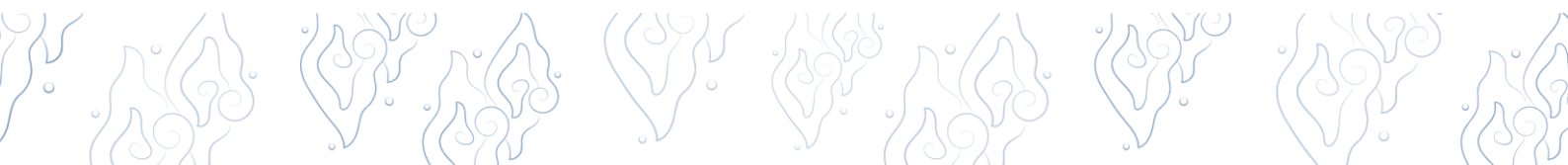
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Dukungan pemerintah pusat terhadap percepatan pembangunan infrastruktur dasar.</li> </ul> <p><b>5. Pendekatan Humanis dan Dialogis</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Pentingnya pendekatan persuasif, humanis, dan dialogis dalam penyelesaian konflik sosial di Papua.</li> <li>○ Pelibatan tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat dalam menjaga stabilitas keamanan daerah.</li> </ul> <p><b>6. Dukungan Program Strategis Pemerintah</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Permohonan dukungan program khusus pemulihan sosial ekonomi masyarakat pasca konflik.</li> <li>○ Penguatan program pemberdayaan masyarakat dan pembangunan berbasis kesejahteraan.</li> </ul>
<p><b>Hasil Kegiatan</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemerintah Pusat melalui Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan RI menerima dan memperhatikan berbagai aspirasi serta kondisi yang disampaikan Pemerintah Daerah Papua Barat Daya dan Kabupaten Maybrat.</li> <li>2. Terdapat komitmen untuk memperkuat koordinasi lintas kementerian/lembaga dalam upaya penanganan gangguan keamanan di Papua Barat Daya.</li> <li>3. Pemerintah Pusat mendukung langkah percepatan pemulihan keamanan dan pelayanan dasar bagi masyarakat terdampak konflik.</li> <li>4. Ditekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat dalam menciptakan situasi keamanan yang kondusif.</li> <li>5. Pemerintah daerah diminta terus melakukan pendataan masyarakat terdampak serta menyusun</li> </ol>



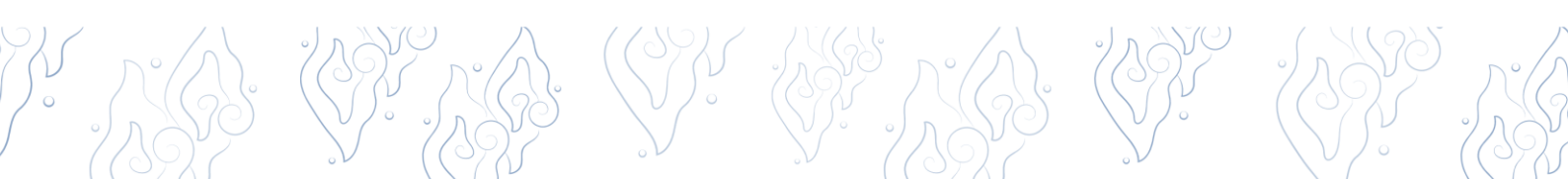
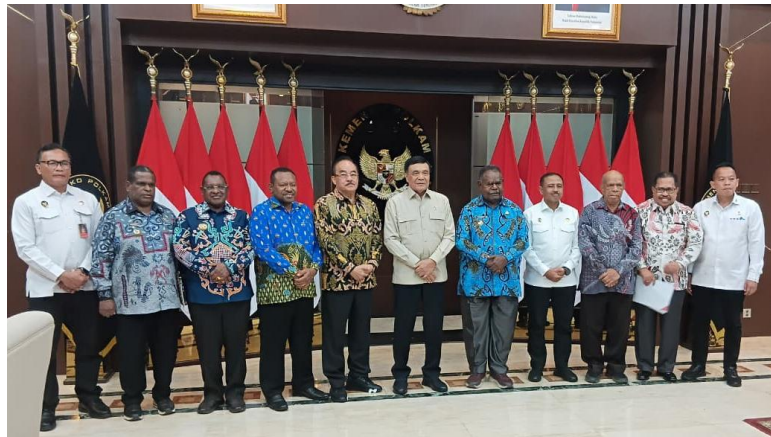
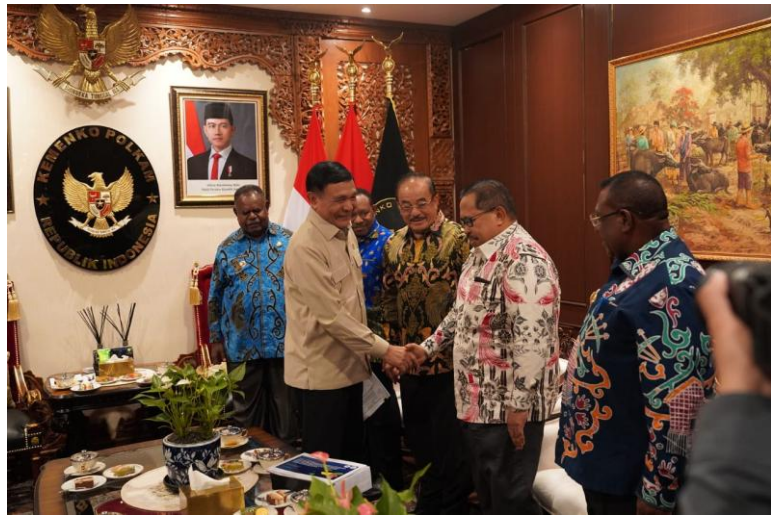
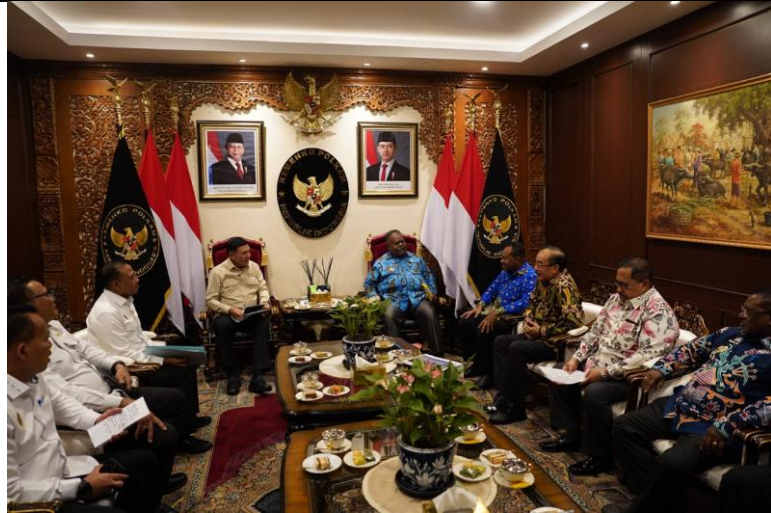
	<p>kebutuhan prioritas penanganan dan pemulihan daerah.</p> <p>6. Hasil audiensi telah dilaporkan kepada Wakil Presiden Republik Indonesia selaku Ketua Badan Pengarah Papua sebagai bentuk tindak lanjut pelaksanaan SHEK terkait dinamika keamanan di Kabupaten Tambrauw dan Kabupaten Maybrat.</p> <p>7. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan RI memberikan dukungan terhadap percepatan pembangunan infrastruktur strategis, khususnya penanganan ruas jalan Koridor Susumuk–Bintuni–Mare–Fef.</p> <p>8. Dalam penanganan wilayah konflik, ditekankan pentingnya pendekatan sosial antropologi berbasis komunitas (socio-anthropology based community) dengan melibatkan kepala daerah, tokoh masyarakat, dan aparat keamanan.</p> <p>9. Pemerintah pusat mendukung penguatan program kolaborasi pendidikan, termasuk implementasi Sekolah Sepanjang Hari (SSH) yang terintegrasi dengan Program MBG pada wilayah 3T.</p> <p>10. Pemerintah pusat mendorong penyelesaian konflik secara dialogis, humanis, dan berbasis pendekatan sosial budaya masyarakat setempat.</p> <p>Secara umum, pertemuan/audiensi berlangsung dengan baik dan menghasilkan pemahaman bersama terkait pentingnya penanganan konflik secara komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan.</p>
<p><b>Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut</b></p>	<p>1. Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat Daya dan Kabupaten Maybrat perlu memperkuat koordinasi rutin dengan Pemerintah Pusat terkait perkembangan situasi keamanan daerah.</p>



	<ol style="list-style-type: none"><li>2. Perlu dilakukan percepatan program pemulihan sosial ekonomi bagi masyarakat terdampak konflik, termasuk pemulangan dan rehabilitasi pengungsi.</li><li>3. Pemerintah daerah bersama aparat keamanan perlu meningkatkan pendekatan dialogis dan humanis dalam menjaga stabilitas keamanan masyarakat.</li><li>4. Perlu penyusunan roadmap penanganan konflik dan pemulihan wilayah terdampak secara terpadu dan lintas sektor.</li><li>5. Pemerintah daerah perlu melakukan pendataan menyeluruh terhadap kerusakan fasilitas umum, kebutuhan masyarakat, dan dampak sosial ekonomi sebagai dasar intervensi program pemerintah pusat.</li><li>6. Diperlukan penguatan peran tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat dalam mendukung terciptanya perdamaian dan stabilitas keamanan di wilayah Papua Barat Daya.</li><li>7. Perlu dilakukan koordinasi lanjutan dengan kementerian/lembaga terkait guna mendukung percepatan pembangunan infrastruktur strategis di Papua Barat Daya.</li><li>8. Pemerintah daerah perlu memperkuat pendekatan sosial dan dialogis berbasis masyarakat dalam penanganan konflik di wilayah Maybrat dan Tambrau.</li><li>9. Perlu penguatan sinergi program pendidikan kolaboratif pada wilayah 3T sebagai bagian dari percepatan pembangunan Papua.</li><li>10. Hasil audiensi perlu ditindaklanjuti melalui rapat koordinasi teknis bersama kementerian/lembaga terkait guna memastikan implementasi program penanganan berjalan efektif.</li></ol>
--	--



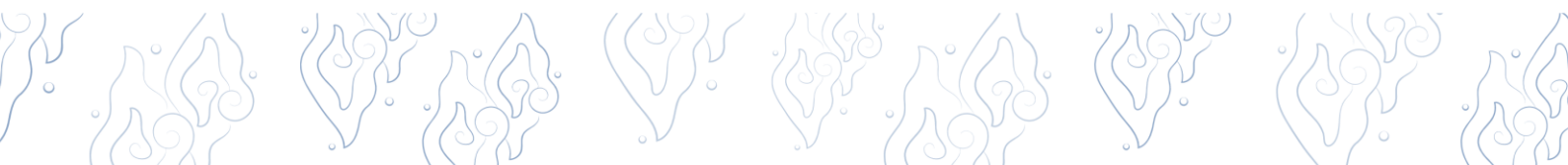
Dokumentasi



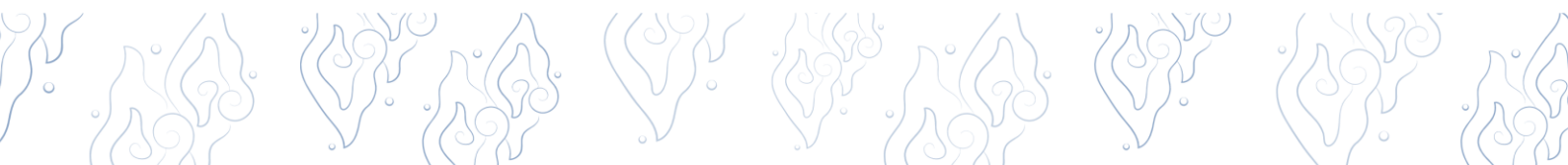


### Kegiatan 3

<b>Nama Kegiatan</b>	Peran Aktif BPP PBD (Arahan & SHEK) dalam Kegiatan Musrenbang RKPD & Otonomi Khusus Tahun 2027 Kabupaten Sorong
<b>Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)</b>	Selasa-Rabu, 14-15 April 2026 di Kantor Inspektorat Kabupaten Sorong
<b>Latar Belakang</b>	Musrenbang Kabupaten Sorong dilaksanakan selama dua hari untuk membahas perencanaan pembangunan Tahun 2027.

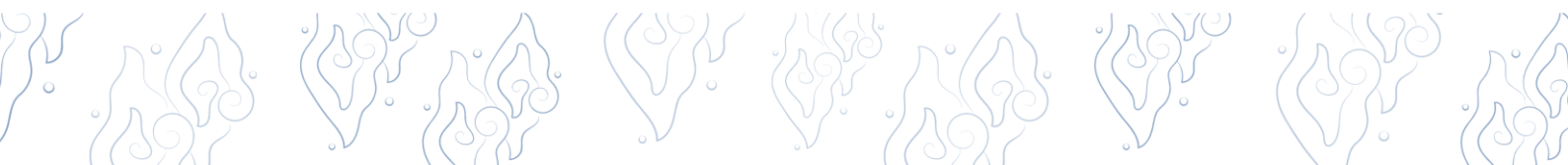


	<p>Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Pokja BP3OKP dalam melakukan koordinasi, pemantauan, evaluasi, serta memberikan masukan terhadap program dan kegiatan yang berkaitan dengan Orang Asli Papua (OAP) dan pelaksanaan Dana Otsus di wilayah Papua Barat Daya.</p> <p>Kegiatan ini juga bertujuan memperoleh informasi, masukan, dan kondisi riil di lapangan sebagai bahan pertimbangan dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan pemerintah daerah.</p>
<p><b>Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan)</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi program terkait OAP.</li> <li>2. Mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan masyarakat OAP.</li> <li>3. Memastikan pelaksanaan program dan kegiatan Dana Otsus tepat sasaran.</li> <li>4. Menghimpun masukan dari OPD, distrik, kampung, dan masyarakat.</li> <li>5. Memberikan rekomendasi tindak lanjut dan pendampingan kepada pemerintah daerah.</li> <li>6. Memastikan sinergitas perencanaan daerah dan pusat berjalan selaras melalui dokumen perencanaan RPJP, RPJMN, RKP dengan RPJPD, RPJMD, RKPD, dan Renstra OPD yang terintegrasi dengan dokumen Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP).</li> <li>7. Melaksanakan SHEK melalui pendampingan Desk Musrenbang Otsus dan RKPD Tahun 2027.</li> </ol>
<p><b>Peserta Kegiatan</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wakil Bupati Sorong (membuka acara)</li> <li>2. Sekda Kabupaten Sorong</li> <li>3. Pimpinan OPD</li> <li>4. DPR Pengangkatan</li> </ol>



	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Kepala Bidang dan staf dari masing-masing OPD</li> <li>6. Kepala Distrik</li> <li>7. BPP (Pokja Sehat, Cerdas, dan Produktif)</li> <li>8. LSM</li> <li>9. Tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh perempuan</li> <li>10. Bapperida Papua Barat Daya</li> <li>11. Perwakilan penyandang disabilitas</li> <li>12. Anggota DPRK Fraksi Otsus</li> </ol>
<b>Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan</b>	Sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, koordinasi, dan pendampingan Desk Papua Cerdas.
<b>Misi/Keterangan</b>	Papua Sehat, Papua Cerdas, Papua Produktif, Papua Polhukam/Damai
<b>Poin-Poin Pembahasan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Desk dipimpin oleh Bapelitbang Kabupaten Sorong dengan membuka usulan distrik. Musrenbang distrik/kampung Tahun 2027 tidak dilaksanakan karena alasan efisiensi, sehingga data dan isu strategis/program yang diusulkan berasal dari usulan tahun 2025.</li> <li>2. Mekanisme pleno menghadirkan beberapa narasumber, di antaranya BPP, PLN, BPS, dan BPKAD Kabupaten Sorong.</li> <li>3. Hari kedua dilanjutkan dengan pembahasan desk masing-masing distrik.</li> <li>4. Pemanfaatan Dana Otsus pada sektor ekonomi dan pemberdayaan masyarakat OAP.</li> <li>5. Kendala UMKM OAP, seperti budidaya dan produksi minyak nilam, dalam aspek pemasaran, perizinan, dan modal usaha.</li> <li>6. Dukungan pemberdayaan bagi penyandang disabilitas OAP.</li> <li>7. Bantuan sarana usaha seperti mobil pick up, alat produksi, dan kapal nelayan.</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>8. Pengembangan komoditas unggulan seperti rumput laut, nilam, damar putih, dan madu adat.</li> <li>9. Permasalahan pemerataan penerima Dana Otsus di distrik heterogen, seperti Distrik Aimas dan wilayah lainnya.</li> <li>10. Pentingnya laporan penggunaan Dana Otsus untuk menghindari duplikasi program.</li> <li>11. Pengembangan kampung wisata di Klayili dan pemetaan wilayah adat.</li> <li>12. Kendala pendampingan pertanian dan produktivitas petani OAP.</li> <li>13. Perhatian terhadap ketentuan sembilan negative list sesuai PMK Nomor 33 Tahun 2024.</li> </ol>
<p><b>Hasil Kegiatan</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Beberapa OPD yang hadir memaparkan program yang akan dilaksanakan di wilayah distrik sesuai Renstra tahun kedua masing-masing OPD.</li> <li>2. Berdasarkan hasil evaluasi, Pemerintah Kabupaten Sorong dinilai belum mengimplementasikan Permen Bappenas Nomor 1 Tahun 2025 tentang pelaksanaan Musrenbang Otsus. Hal ini terlihat dari tidak dilaksanakannya Musrenbang kampung/distrik. Selain itu, pembahasan desk belum membahas program OPD secara menyeluruh sehingga sinkronisasi program antar OPD belum optimal. Usulan program yang dibahas masih berfokus pada usulan dari distrik.</li> <li>3. Diperoleh berbagai masukan terkait kebutuhan masyarakat OAP di bidang ekonomi, pertanian, perikanan, dan pariwisata.</li> <li>4. Teridentifikasi beberapa program yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.</li> </ol>



	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ditemukan perlunya peningkatan pendampingan dan penguatan kapasitas kelompok usaha OAP.</li> <li>6. Diperoleh informasi terkait kendala distribusi bantuan dan ketepatan sasaran Dana Otsus.</li> <li>7. Terdapat usulan prioritas program yang perlu didorong dalam RAPPP, RKPD, dan Musrenbang Nasional.</li> </ol>
<p><b>Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendorong OPD terkait untuk meningkatkan program pemberdayaan ekonomi OAP.</li> <li>2. Melakukan pendampingan UMKM OAP terkait perizinan, pemasaran, dan akses modal.</li> <li>3. Memastikan bantuan Dana Otsus tepat sasaran sesuai regulasi.</li> <li>4. Mendorong sinkronisasi program kabupaten, provinsi, dan pusat.</li> <li>5. Menindaklanjuti usulan prioritas yang menjadi kewenangan provinsi dan kementerian/lembaga.</li> <li>6. Memperkuat monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Dana Otsus.</li> <li>7. Memastikan laporan penggunaan Dana Otsus tersedia sebagai bahan evaluasi program berikutnya.</li> <li>8. Pemerintah Kabupaten Sorong perlu memisahkan usulan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan provinsi untuk selanjutnya didorong pada Musrenbang tingkat provinsi.</li> <li>9. Pemerintah Kabupaten Sorong perlu menyusun usulan kegiatan, rencana anggaran, dan program sesuai format usulan dalam lampiran RAPPP agar dapat terintegrasi dengan Sistem Informasi Percepatan Pembangunan Papua (SIPPP).</li> <li>10. Perlu dilakukan evaluasi detail terhadap pelaksanaan Musrenbang Otsus Tahun 2027 bersama Bapelitbang Kabupaten Sorong.</li> </ol>

## Dokumentasi

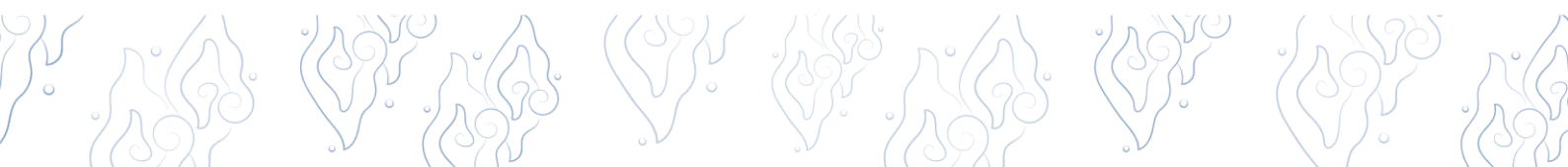



## Kegiatan 4

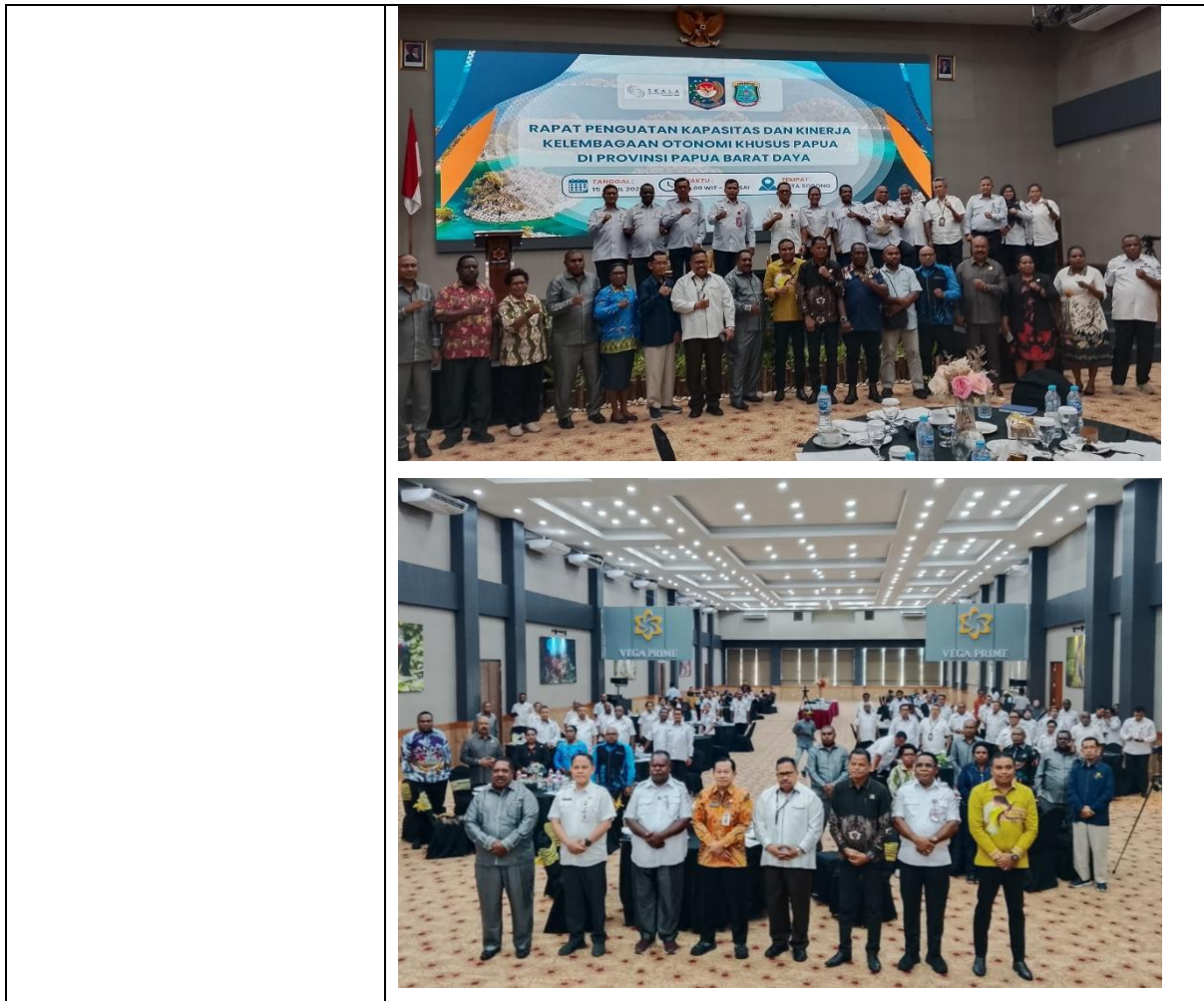
<p><b>Nama Kegiatan</b></p>	<p>Peran Aktif BPP PBD (Arahan &amp; SHEK) dalam Kegiatan Rapat Koordinasi Penguatan Kapasitas dan Kinerja Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat Daya</p>
<p><b>Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)</b></p>	<p>Rabu, 15 April 2026 di Hotel Vega Sorong</p>
<p><b>Latar Belakang</b></p>	<p>Pelaksanaan Otonomi Khusus Papua memerlukan penguatan kapasitas kelembagaan, koordinasi lintas sektor, serta sinergi antar perangkat daerah guna memastikan pelaksanaan program pembangunan berjalan efektif, tepat sasaran, dan sesuai arah kebijakan percepatan pembangunan Papua.</p> <p>Dalam rangka mendukung hal tersebut, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Penguatan Kapasitas dan</p>

	<p>Kinerja Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat Daya yang melibatkan pemerintah daerah, perangkat daerah, serta kementerian/lembaga terkait.</p> <p>BPP Papua Barat Daya turut berperan aktif dalam kegiatan ini melalui pemberian arahan strategis dan pelaksanaan fungsi SHEK (Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi) guna mendukung penguatan tata kelola pelaksanaan Otonomi Khusus di Papua Barat Daya.</p>
<b>Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memperkuat koordinasi dan sinergi pelaksanaan Otonomi Khusus di Papua Barat Daya.</li> <li>2. Meningkatkan pemahaman perangkat daerah terkait arah kebijakan percepatan pembangunan Papua.</li> <li>3. Melaksanakan fungsi SHEK terhadap pelaksanaan program dan kebijakan Otonomi Khusus.</li> <li>4. Mendukung penguatan kapasitas kelembagaan dan tata kelola pemerintahan daerah.</li> </ol>
<b>Peserta Kegiatan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia</li> <li>2. Kementerian Keuangan Republik Indonesia</li> <li>3. Gubernur Papua Barat Daya</li> <li>4. Anggota BPP Papua Barat Daya</li> <li>5. Pimpinan dan perwakilan OPD Provinsi Papua Barat Daya</li> <li>6. Unsur pemerintah daerah terkait</li> <li>7. Pemangku kepentingan pelaksanaan Otonomi Khusus Papua</li> </ol>
<b>Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan</b>	Sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, koordinasi, dan pemberian arahan
<b>Misi/Keterangan</b>	Papua Sehat, Papua Cerdas, Papua Produktif, Papua Polhukam/Damai
<b>Poin-Poin Pembahasan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Arah kebijakan pelaksanaan Otonomi Khusus Papua di Provinsi Papua Barat Daya.</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Penguatan koordinasi lintas OPD dalam mendukung program percepatan pembangunan Papua.</li> <li>3. Sinkronisasi program daerah dengan kebijakan nasional, RIPPP, dan RAPPP.</li> <li>4. Penguatan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kapasitas kelembagaan daerah.</li> <li>5. Pengelolaan Dana Otonomi Khusus dan penguatan akuntabilitas pelaksanaan program daerah.</li> <li>6. Peran BPP Papua Barat Daya dalam pelaksanaan fungsi SHEK terhadap program Otonomi Khusus.</li> <li>7. Evaluasi pelaksanaan program dan tantangan implementasi pembangunan daerah.</li> <li>8. Penyampaian materi dan arahan oleh narasumber dari Kemendagri, Kemenkeu, dan BPP Papua Barat Daya.</li> </ol>
<p><b>Hasil Kegiatan</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlaksananya rapat koordinasi penguatan kapasitas dan kinerja Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat Daya.</li> <li>2. BPP Papua Barat Daya memberikan arahan strategis terkait pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan Papua Barat Daya.</li> <li>3. Narasumber dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan menyampaikan penguatan terkait tata kelola pemerintahan, sinkronisasi program, dan pengelolaan Dana Otonomi Khusus.</li> <li>4. Terbangunnya koordinasi dan sinergi antara pemerintah daerah, kementerian/lembaga, dan perangkat daerah dalam mendukung implementasi program Otonomi Khusus.</li> <li>5. Meningkatnya pemahaman perangkat daerah terkait pentingnya sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi program pembangunan.</li> </ol>

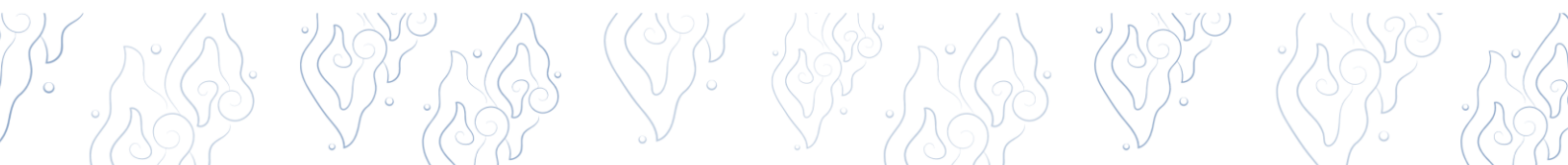


	<p>6. Diperolehnya masukan dan identifikasi awal terkait penguatan tata kelola pelaksanaan program Otonomi Khusus di Papua Barat Daya.</p>
<p><b>Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlu penguatan koordinasi lintas perangkat daerah dalam pelaksanaan program Otonomi Khusus.</li> <li>2. Pemerintah daerah perlu meningkatkan sinkronisasi program pembangunan dengan arah kebijakan nasional, RIRPP, dan RAPP.</li> <li>3. Diperlukan penguatan kapasitas SDM dan tata kelola kelembagaan dalam mendukung percepatan pembangunan Papua.</li> <li>4. BPP Papua Barat Daya perlu terus melaksanakan fungsi SHEK dalam mendukung pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program Otonomi Khusus.</li> <li>5. Perlu peningkatan koordinasi antara pemerintah daerah, Kemendagri, dan Kemenkeu terkait pengelolaan dan pengawasan Dana Otonomi Khusus.</li> </ol>
<p><b>Dokumentasi</b></p>	

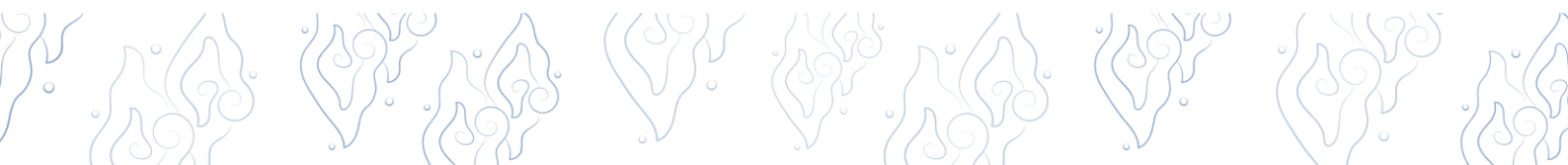


### Kegiatan 5

<b>Nama Kegiatan</b>	Peran Aktif BPP PBD (Arahan & SHEK) dalam Kegiatan Musrenbang Otonomi Khusus dan RKPD Tahun 2027 Kota Sorong
<b>Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)</b>	Rabu-Kamis, 15-16 April 2026 di Gedung Drs. Ec. L. Jitmau, MM, Kota Sorong
<b>Latar Belakang</b>	Pelaksanaan pembangunan sangat bergantung pada perencanaan program dan kegiatan yang terukur serta memberikan dampak nyata bagi penerima manfaat. Untuk melaksanakan hal tersebut diperlukan tim perencana yang tidak hanya mampu menerjemahkan isu strategis ke dalam program, tetapi juga memanfaatkan

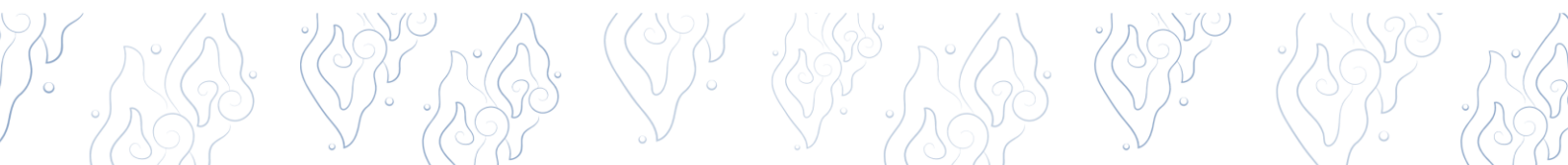


	<p>data sebagai informasi pendukung target dan sasaran pembangunan.</p> <p>Pelaksanaan Otonomi Khusus Papua merupakan instrumen strategis negara dalam mempercepat pembangunan dan peningkatan kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP) secara terarah, afirmatif, dan berkelanjutan. Dalam implementasinya, diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BP3OKP guna memastikan seluruh program pembangunan berjalan sesuai arah kebijakan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP).</p> <p>Pemerintah Kota Sorong melalui pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kota Sorong Tahun 2026 telah menetapkan berbagai program prioritas Otsus yang berfokus pada penguatan pemberdayaan Orang Asli Papua (OAP), transformasi layanan dasar, serta penguatan ekonomi daerah berbasis inklusivitas dan keberlanjutan.</p>
<p><b>Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan)</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjadi narasumber pada kegiatan Musrenbang Otonomi Khusus dan RKPD Tahun 2027 Kota Sorong.</li> <li>2. Melaksanakan fungsi strategis BP3OKP dalam sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi terhadap pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah agar sejalan dengan agenda nasional percepatan pembangunan Papua melalui misi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Papua Produktif</li> <li>• Papua Cerdas</li> <li>• Papua Sehat</li> <li>• Papua Damai</li> </ul> </li> </ol>

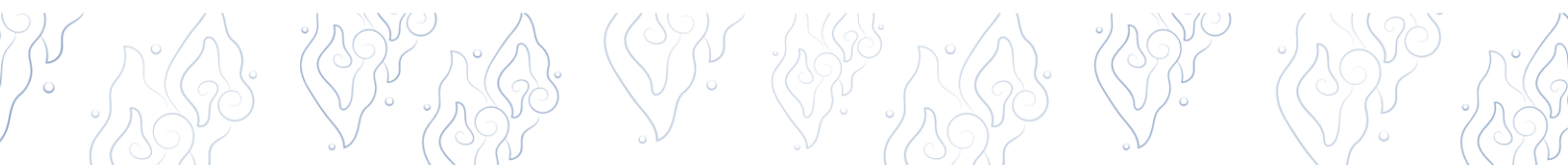


<p><b>Peserta Kegiatan</b></p>	<p>Kegiatan Musrenbang Tingkat Kota Sorong Tahun 2026 diikuti oleh sekitar 170 peserta yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wali Kota Sorong</li> <li>2. Wakil Ketua III DPR Kota Sorong</li> <li>3. Tujuh anggota DPR jalur pengangkatan Otsus</li> <li>4. Anggota Pokja Sehat BPP Papua Barat Daya</li> <li>5. Pimpinan OPD Pemerintah Kota Sorong beserta staf</li> <li>6. Tokoh masyarakat</li> <li>7. Tokoh agama</li> <li>8. Tokoh adat</li> <li>9. Akademisi</li> <li>10. Perwakilan masyarakat Orang Asli Papua (OAP)</li> <li>11. Pemangku kepentingan pembangunan daerah</li> <li>12. Unsur perencanaan dan pengawasan pembangunan</li> </ol> <p>Forum dipimpin langsung oleh Septinus Lobat, dengan laporan teknis oleh Amos Kareth.</p> <p>Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 15–16 April 2026 di Gedung Drs. Ec. Lambert Jitmau, MM, Kota Sorong.</p>
<p><b>Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan</b></p>	<p>Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, Koordinasi, Pengawasan dalam perencanaan</p>
<p><b>Misi/Keterangan</b></p>	<p>Papua Sehat, Papua Cerdas, Papua Produktif, Papua Polhukam/Damai</p>
<p><b>Poin-Poin Pembahasan</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Arah kebijakan pembangunan dalam kerangka RIPP dan RAPP yang telah diselaraskan dengan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.</li> <li>2. <b>Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK)</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>A. <b>Sinkronisasi</b></li> </ol> <p>Pelaksanaan Musrenbang Kota Sorong Tahun 2026 menunjukkan adanya upaya sinkronisasi antara program pembangunan daerah dengan arah kebijakan nasional Otonomi Khusus Papua.</p> </li> </ol>

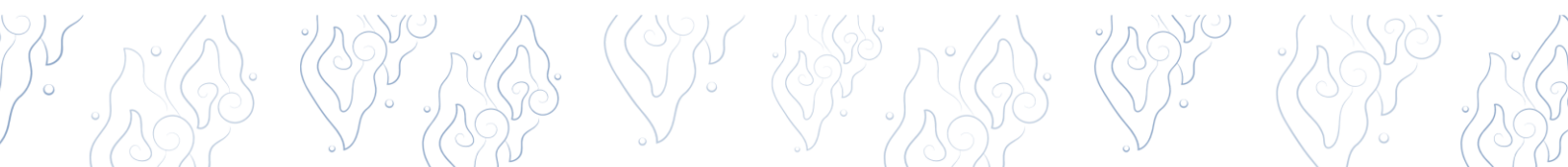
	<p><b>Fokus Sinkronisasi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelarasan RKPD Kota Sorong dengan RIPP dan RAPP.</li> <li>2. Integrasi program pemberdayaan OAP ke dalam dokumen perencanaan daerah.</li> <li>3. Sinkronisasi tahapan perencanaan mulai dari tingkat kelurahan, distrik, hingga kota.</li> <li>4. Penyesuaian prioritas pembangunan dengan kondisi fiskal daerah dan dinamika global.</li> </ol> <p><b>Hasil Sinkronisasi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terbangunnya keselarasan arah pembangunan daerah berbasis OAP.</li> <li>2. Penguatan prioritas program yang berdampak langsung kepada masyarakat.</li> <li>3. Terintegrasinya pendekatan <i>bottom-up planning</i> dalam proses pembangunan daerah.</li> </ol> <p><b>B. Harmonisasi</b></p> <p>BP3OKP menilai adanya upaya harmonisasi kebijakan pembangunan daerah dengan agenda nasional percepatan pembangunan Papua.</p> <p><b>Fokus Harmonisasi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyesuaian kebijakan fiskal daerah dengan prioritas pembangunan OAP.</li> <li>2. Harmonisasi program pendidikan gratis dengan kebijakan afirmasi pendidikan Papua.</li> <li>3. Harmonisasi pengembangan layanan kesehatan dengan kebutuhan regional Papua Barat Daya.</li> <li>4. Penyelarasan kebijakan efisiensi anggaran dengan keberlanjutan pelayanan publik.</li> </ol> <p><b>Hasil Harmonisasi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program prioritas lebih terarah dan berbasis kebutuhan masyarakat.</li> </ol>
--	---



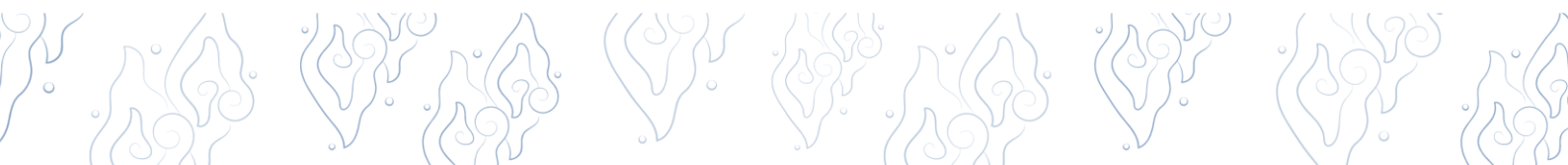
	<p>2. Kebijakan efisiensi operasional tetap menjaga pelayanan dasar masyarakat.</p> <p>3. Terwujudnya keselarasan antara pembangunan ekonomi dan perlindungan sosial OAP.</p> <p><b>C. Evaluasi</b></p> <p>BP3OKP melakukan evaluasi terhadap arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah Tahun 2026.</p> <p><b>Poin-Poin Evaluasi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fokus pembangunan telah diarahkan pada sektor prioritas yang menyentuh OAP.</li> <li>2. Program ekonomi kerakyatan mulai diarahkan pada penguatan resiliensi ekonomi lokal.</li> <li>3. Pendidikan dan kesehatan tetap menjadi prioritas utama pembangunan daerah.</li> <li>4. Kebijakan efisiensi fiskal dinilai sebagai langkah strategis menghadapi keterbatasan anggaran.</li> <li>5. Perlu penguatan indikator capaian program berbasis kesejahteraan OAP.</li> </ol> <p><b>Hasil Evaluasi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemerintah Kota Sorong telah menunjukkan komitmen terhadap pembangunan afirmatif OAP.</li> <li>2. Pendekatan pembangunan mulai mengarah pada transformasi berbasis inklusif dan berkelanjutan.</li> <li>3. Diperlukan penguatan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi program prioritas.</li> </ol> <p><b>D. Koordinasi</b></p> <p>BP3OKP mendorong penguatan koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan dalam pelaksanaan program Otsus.</p> <p><b>Fokus Koordinasi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi antar OPD dalam pelaksanaan program prioritas.</li> </ol>
--	---



	<p>2. Koordinasi antara pemerintah daerah dan BP3OKP terkait evaluasi program Otsus.</p> <p>3. Pelibatan akademisi dan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.</p> <p>4. Penguatan koordinasi fiskal dan perencanaan pembangunan daerah.</p> <p><b>Hasil Koordinasi:</b></p> <p>1. Terbangunnya komunikasi lintas sektor dalam penyusunan program prioritas.</p> <p>2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.</p> <p>3. Terciptanya forum pembangunan yang lebih inklusif dan partisipatif.</p>
<p><b>Hasil Kegiatan</b></p>	<p>1. Dokumentasi kegiatan.</p> <p>2. Penyampaian materi pada Musrenbang Kota Sorong.</p> <p>3. Pendampingan pada Forum OPD (<i>desk</i>) Kota Sorong.</p> <p><b>Papua Produktif</b></p> <p>a. Penguatan UMKM dan ekonomi kerakyatan OAP.</p> <p>b. Bantuan modal usaha dan stimulus ekonomi masyarakat.</p> <p>c. Penguatan daya tahan ekonomi lokal menghadapi krisis global.</p> <p><b>Papua Cerdas</b></p> <p>a. Pengembangan kebijakan pendidikan gratis.</p> <p>b. Peningkatan akses pendidikan yang inklusif bagi masyarakat OAP.</p> <p>c. Pelibatan akademisi dalam penyusunan kebijakan pendidikan.</p> <p><b>Papua Sehat</b></p> <p>a. Penguatan layanan kesehatan publik.</p> <p>b. Rencana pembangunan kembali RS Siloam sebagai pusat layanan rujukan regional.</p> <p>c. Peningkatan akses kesehatan dasar masyarakat.</p>



	<p><b>Papua Damai</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penguatan pembangunan inklusif dan partisipatif.</li> <li>b. Pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.</li> <li>c. Penguatan stabilitas sosial melalui pemerataan pembangunan.</li> </ul>
<p><b>Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Perlu dilakukan perbaikan terkait proses pelaksanaan Musrenbang Otsus di Kota Sorong dengan menyesuaikan regulasi yang berlaku, khususnya Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2025 tentang Musrenbang Otsus.</li> <li>2. Pelaksanaan program perlu dilakukan secara kolaboratif sesuai tema Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif.</li> <li>3. Memperkuat integrasi program Otsus ke dalam RKPD dan dokumen pembangunan daerah.</li> <li>4. Mengembangkan indikator khusus capaian kesejahteraan OAP berbasis data sektoral.</li> <li>5. Meningkatkan efektivitas monitoring dan evaluasi program prioritas Otsus.</li> <li>6. Memastikan kebijakan efisiensi anggaran tidak mengurangi kualitas pelayanan publik dasar.</li> <li>7. Mendorong penguatan ekonomi lokal berbasis UMKM OAP dan ekonomi kreatif.</li> <li>8. Memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah, BP3OKP, dan kementerian/lembaga terkait.</li> <li>9. Mengoptimalkan partisipasi akademisi, tokoh adat, dan masyarakat dalam proses pembangunan daerah.</li> </ul>



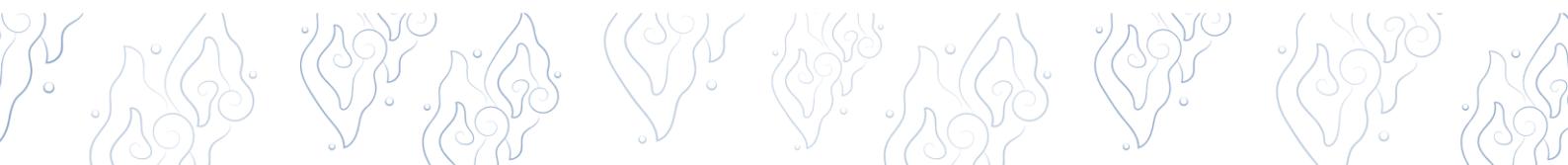
Dokumentasi



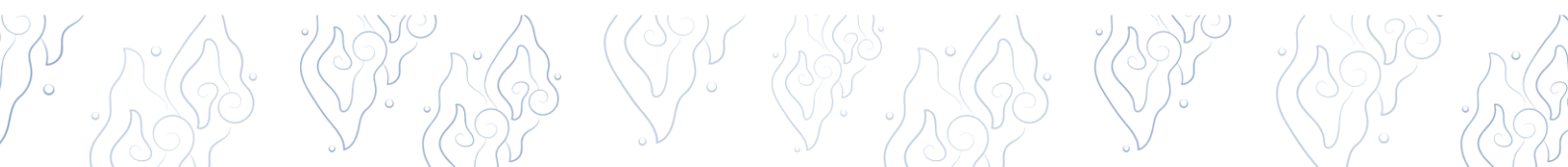


## Kegiatan 6

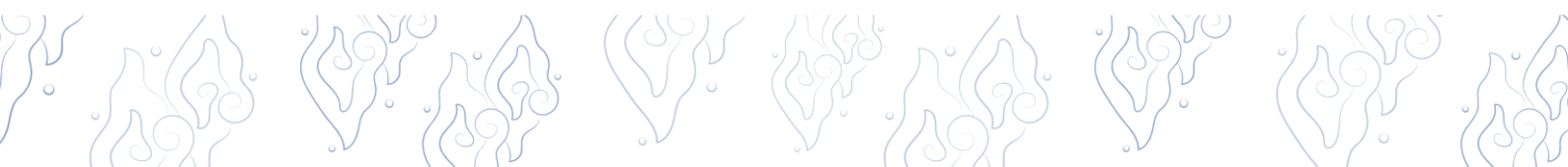
<b>Nama Kegiatan</b>	Pertemuan BPP PBD bersama Tokoh Masyarakat Adat Kabupaten Maybrat
<b>Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)</b>	Kamis, 16 April 2026 di Sekretariat BPP Papua Barat Daya
<b>Latar Belakang</b>	Kabupaten Maybrat mengalami krisis kemanusiaan sejak terjadinya penyerangan Posramil Kisor pada tanggal 2 September 2021 oleh kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) yang mengakibatkan meninggalnya empat personel TNI. Peristiwa tersebut memicu konflik sosial dan keamanan yang berdampak langsung terhadap masyarakat sipil di wilayah Distrik Aifat Timur, Aifat Timur Selatan, dan Aifat Timur Jauh.



	<p>Akibat konflik tersebut, ribuan masyarakat meninggalkan kampung halaman dan hidup dalam kondisi pengungsian maupun eksodus ke wilayah lain. Data pasca konflik tahun 2021 mencatat sebanyak 6.547 jiwa atau 1.222 Kepala Keluarga (KK) mengungsi dari wilayah terdampak konflik.</p> <p>Hingga Mei 2024, sebanyak 998 KK dilaporkan telah kembali ke kampung halaman, namun masih terdapat sekitar 224 KK yang belum dapat kembali akibat keterbatasan akses jalan dan situasi keamanan yang belum sepenuhnya kondusif. Selain itu, laporan pada Juni 2024 memperkirakan masih terdapat sekitar 3.387 jiwa yang hidup dalam pengungsian.</p> <p>Kondisi pengungsian menyebabkan berbagai persoalan kemanusiaan, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Tingginya angka kematian pengungsi akibat keterbatasan pelayanan kesehatan;</li><li>2. Trauma psikologis masyarakat;</li><li>3. Kerusakan rumah dan fasilitas umum;</li><li>4. Tidak optimalnya pelayanan pendidikan dan kesehatan;</li><li>5. Terbatasnya aktivitas ekonomi masyarakat;</li><li>6. Ketidakpastian keamanan dan keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat.</li></ol> <p>Di bidang infrastruktur, diperkirakan lebih dari 90% rumah masyarakat di wilayah terdampak mengalami kerusakan atau kehancuran. Hingga tahun 2023, dari 1.212 rumah rusak, baru 419 unit yang diperbaiki pemerintah.</p>
--	---

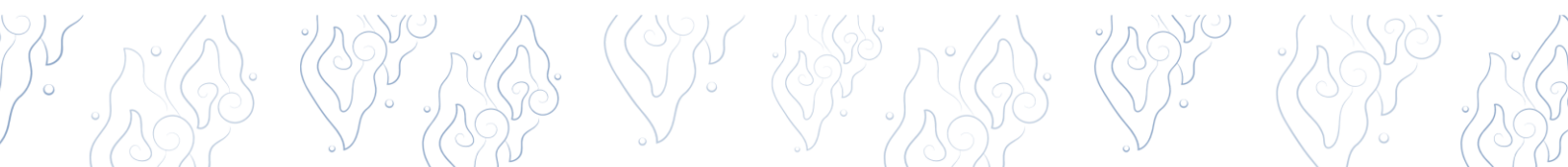


	<p>Sementara itu, masyarakat yang telah kembali masih menghadapi keterbatasan aktivitas ekonomi akibat situasi keamanan, pembatasan mobilitas, dan minimnya fasilitas pendukung kehidupan masyarakat.</p> <p>Sehubungan dengan kondisi tersebut, diperlukan langkah strategis dan terpadu melalui Program Otonomi Khusus Papua yang berorientasi pada pemulihan sosial, ekonomi, dan keamanan masyarakat secara berkelanjutan.</p> <p>Dalam kaitan tersebut, BP3OKP melaksanakan tugas dan fungsi dalam rangka sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi kebijakan percepatan pembangunan Otonomi Khusus Papua melalui pendekatan kemanusiaan dan pembangunan berbasis kesejahteraan masyarakat.</p>
<p><b>Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan)</b></p>	<p>Kegiatan Prioritas Program Otonomi Khusus bagi korban pengungsi/eksodus Kabupaten Maybrat Tahun 2026 bertujuan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan sinkronisasi program pemerintah pusat dan daerah dalam penanganan korban pengungsi/eksodus di Kabupaten Maybrat.</li> <li>2. Melaksanakan harmonisasi kebijakan pembangunan dan pemulihan masyarakat terdampak konflik sosial.</li> <li>3. Melakukan evaluasi terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat pengungsi serta efektivitas program bantuan yang telah dilaksanakan.</li> <li>4. Melaksanakan koordinasi lintas sektor dalam rangka percepatan pemulihan masyarakat secara aman, bermartabat, dan berkelanjutan.</li> </ol>

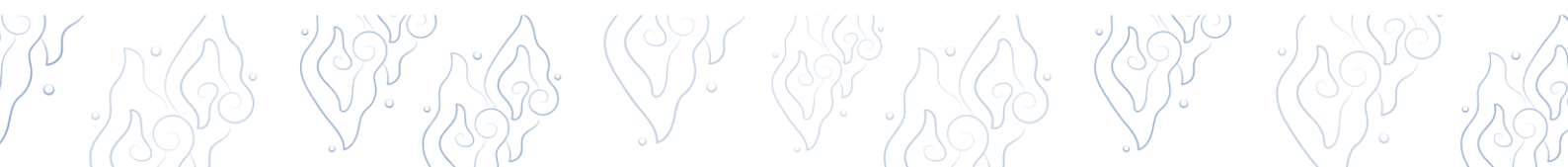



	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Mendukung pemulangan masyarakat pengungsi secara bertahap dengan memperhatikan aspek keamanan, kemanusiaan, dan hak asasi manusia.</li> <li>6. Memulihkan aktivitas ekonomi masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat terdampak konflik.</li> <li>7. Mendorong terciptanya stabilitas sosial dan perdamaian masyarakat di wilayah Kabupaten Maybrat.</li> </ol>
<b>Peserta Kegiatan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Anggota BPP Perwakilan Papua Barat Daya</li> <li>2. Anggota Pokja Papua Produktif BP3OKP Papua Barat Daya</li> <li>3. Zakeus Maomau</li> <li>4. Mantan Kepala Distrik Aifat Timur Tahun 2023</li> <li>5. Tokoh pemuda dan tokoh masyarakat</li> </ol>
<b>Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan</b>	Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, Koordinasi
<b>Misi/Keterangan</b>	Papua Produktif, Papua Polhukam/Damai
<b>Poin-Poin Pembahasan</b>	<p><b>Papua Produktif</b></p> <p>Dalam mendukung misi Papua Produktif, BP3OKP mendorong berbagai program pemulihan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat korban pengungsi/eksodus melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemulihan aktivitas ekonomi masyarakat berbasis kampung;</li> <li>2. Bantuan usaha ekonomi produktif bagi masyarakat terdampak konflik;</li> <li>3. Dukungan sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan;</li> <li>4. Pembangunan dan rehabilitasi rumah masyarakat;</li> </ol>

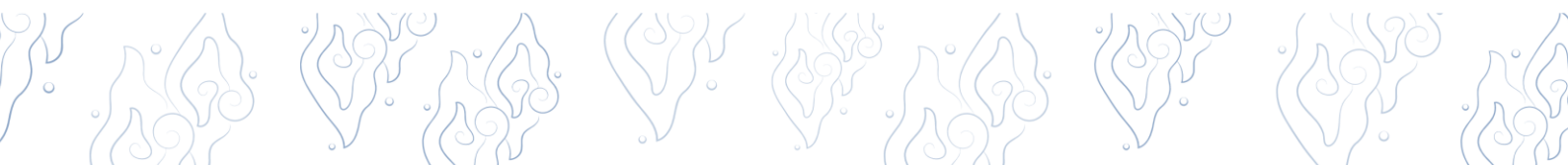
	<ol style="list-style-type: none"><li>5. Perbaikan akses jalan dan sarana transportasi menuju wilayah terdampak;</li><li>6. Penguatan ketahanan pangan masyarakat;</li><li>7. Pemberdayaan UMKM dan ekonomi lokal masyarakat adat;</li><li>8. Dukungan program padat karya bagi masyarakat pengungsi yang kembali.</li></ol> <p>Program Papua Produktif diarahkan untuk mengembalikan kemandirian ekonomi masyarakat sehingga masyarakat dapat kembali hidup secara layak dan berkelanjutan.</p> <p><b>Papua Damai</b></p> <p>Dalam mendukung misi Papua Damai, BP3OKP melaksanakan pendekatan pembangunan berbasis perdamaian dan kemanusiaan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Penguatan rekonsiliasi sosial masyarakat terdampak konflik;</li><li>2. Pendampingan psikososial dan <i>trauma healing</i> bagi masyarakat pengungsi;</li><li>3. Penguatan dialog antara pemerintah, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat;</li><li>4. Dukungan pemulangan masyarakat secara aman dan bermartabat;</li><li>5. Peningkatan rasa aman masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari;</li><li>6. Pendekatan keamanan yang humanis dan berbasis hak asasi manusia;</li></ol>
--	---



	<p>7. Perlindungan terhadap hak-hak masyarakat sipil di wilayah terdampak konflik;</p> <p>8. Penguatan peran lembaga adat dan tokoh masyarakat dalam menjaga stabilitas sosial.</p> <p>Papua Damai menjadi fondasi penting dalam menciptakan stabilitas keamanan, keberlanjutan pembangunan, dan pemulihan kehidupan sosial masyarakat Kabupaten Maybrat.</p>
<p><b>Hasil Kegiatan</b></p>	<p><b>Pelaksanaan Tugas dan Fungsi BP3OKP</b></p> <p>Kegiatan ini dilaksanakan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Sinkronisasi</b> Sinkronisasi program lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah agar pelaksanaan program penanganan pengungsi berjalan terpadu dan tepat sasaran.</li> <li>2. <b>Harmonisasi</b> Harmonisasi kebijakan pembangunan, sosial, keamanan, dan kemanusiaan guna menciptakan keseimbangan program dalam pemulihan masyarakat terdampak konflik.</li> <li>3. <b>Evaluasi</b> Evaluasi terhadap efektivitas program Otsus Papua, kondisi pengungsi, pembangunan infrastruktur, serta pemulihan sosial ekonomi masyarakat.</li> <li>4. <b>Koordinasi</b> Koordinasi lintas sektor antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat keamanan, tokoh adat, tokoh agama, dan lembaga</li> </ol>



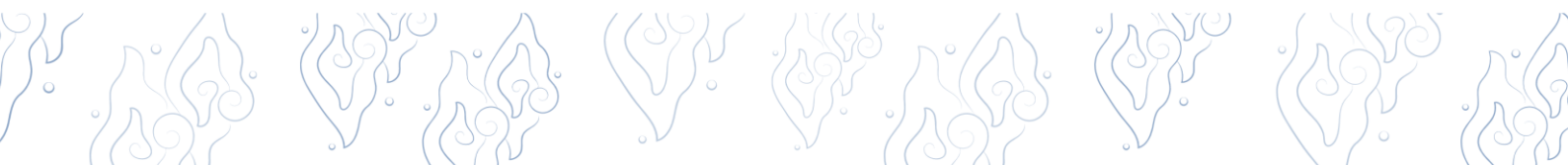
	<p>kemanusiaan dalam percepatan pemulihan Kabupaten Maybrat.</p> <p>Kesimpulan akhir kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berhentinya Tim Terpadu Lokal yang dibentuk pada masa sebelumnya menyebabkan fungsi SHEK di lapangan tidak berjalan optimal.</li> <li>2. Belum terjalinnya komunikasi yang baik antara para tokoh masyarakat Aifat Timur dengan Bupati Maybrat, Karel Murafer.</li> </ol>
<p><b>Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlu dilakukan pembangunan infrastruktur jalan dengan dukungan dana APBN melalui BPJN Papua Barat–Papua Barat Daya Kementerian PUPR, khususnya pada ruas jalan Maybrat–Bintuni.</li> <li>2. Gubernur Papua Barat Daya perlu menjadi mediator untuk mempertemukan Bupati Maybrat dan tokoh masyarakat Aifat Timur agar tercipta harmonisasi pemikiran dalam rangka penyelesaian persoalan kedaulatan negara di wilayah Aifat.</li> </ol>
<p><b>Dokumentasi</b></p>	



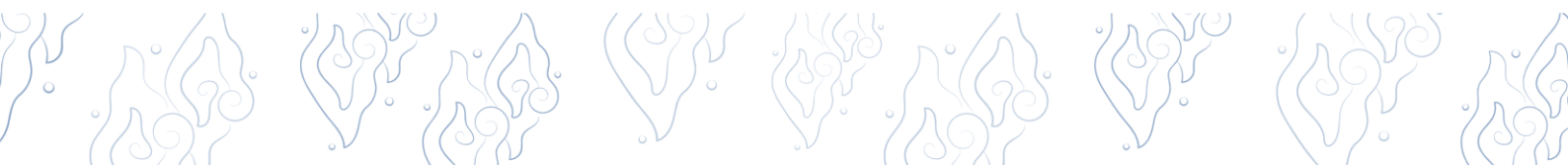


### Kegiatan 7

<p><b>Nama Kegiatan</b></p>	<p>Peran Aktif BPP PBD (Arahan &amp; SHEK) dalam Kegiatan Rapat Koordinasi Penguatan Kapasitas dan Kinerja Anggota DPRK Mekanisme Pengangkatan Kabupaten Sorong Selatan</p>
<p><b>Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)</b></p>	<p>Kamis, 16 April 2026 di Hotel Mratuwa Sesna Kabupaten, Sorong Selatan</p>
<p><b>Latar Belakang</b></p>	<p>Pelaksanaan Otonomi Khusus Papua memberikan ruang afirmasi politik bagi Orang Asli Papua (OAP), salah satunya melalui mekanisme pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK). Kehadiran anggota DPRK mekanisme pengangkatan diharapkan mampu memperkuat representasi politik masyarakat adat Papua serta mendorong kebijakan pembangunan yang berpihak kepada kepentingan Orang Asli Papua.</p> <p>Dalam pelaksanaannya, anggota DPRK mekanisme pengangkatan memerlukan penguatan kapasitas, pemahaman regulasi, serta peningkatan kinerja kelembagaan agar dapat menjalankan fungsi legislasi,</p>

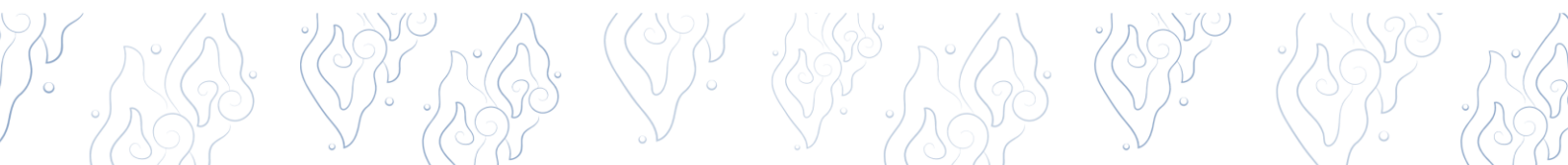


	<p>pengawasan, dan penganggaran secara optimal sesuai amanat Otonomi Khusus.</p> <p>Sehubungan dengan hal tersebut, dilaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Penguatan Kapasitas dan Kinerja Anggota DPRK Mekanisme Pengangkatan se-Papua Barat Daya di Kabupaten Sorong Selatan. Dalam kegiatan ini, BPP Papua Barat Daya mengambil peran aktif melalui pemberian arahan strategis dan penguatan SHEK (Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi) guna memperkuat sinergi kelembagaan dan penyelarasan kebijakan pembangunan berbasis Otonomi Khusus Papua.</p> <p>Peran BPP Papua Barat Daya menjadi penting sebagai bagian dari penguatan tata kelola Otonomi Khusus, khususnya dalam memastikan anggota DPRK mekanisme pengangkatan dapat menjalankan tugas secara efektif, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat OAP.</p>
<p><b>Tujuan Kegiatan</b> <b>(Tujuan Pokja dalam Kegiatan)</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kapasitas dan pemahaman anggota DPRK mekanisme pengangkatan terkait tugas dan fungsi kelembagaan.</li> <li>2. Memperkuat peran anggota DPRK dalam mendukung implementasi kebijakan Otonomi Khusus Papua.</li> <li>3. Mendorong sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan pembangunan daerah berbasis kepentingan Orang Asli Papua.</li> <li>4. Memperkuat koordinasi antar anggota DPRK mekanisme pengangkatan se-Papua Barat Daya.</li> <li>5. Mengoptimalkan peran BPP Papua Barat Daya dalam penguatan SHEK terhadap pelaksanaan kebijakan Otonomi Khusus di daerah.</li> </ol>
<p><b>Peserta Kegiatan</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kementerian Dalam Negeri</li> <li>2. Kementerian Keuangan</li> </ol>

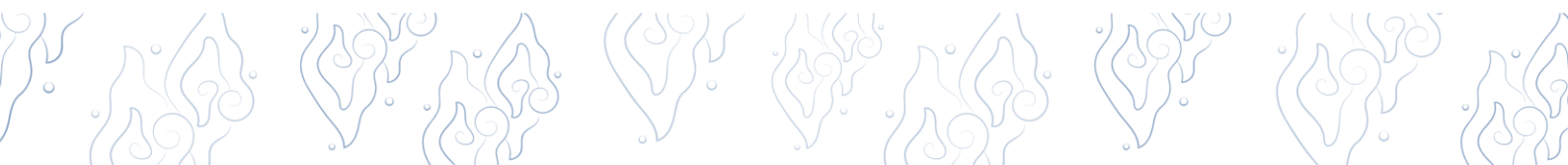


	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Bupati Sorong Selatan</li> <li>4. Pokja BPP Papua Barat Daya</li> <li>5. Pemerintah Daerah dan OPD Terkait Kabupaten Sorong Selatan</li> <li>6. Tim SKALA</li> <li>7. Anggota DPRK mekanisme pengangkatan se-Sorong Selatan</li> </ol>
<b>Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan</b>	Sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi
<b>Misi/Keterangan</b>	Papua Sehat, Papua Cerdas, Papua Produktif, Papua Polhukam/Damai
<b>Poin-Poin Pembahasan</b>	<p>Beberapa poin pembahasan dalam kegiatan rapat koordinasi tersebut antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Peran Strategis DPRK Mekanisme Pengangkatan</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penguatan representasi politik Orang Asli Papua.</li> <li>b. Optimalisasi fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran.</li> </ol> </li> <li>2. <b>Arahan Strategis BPP Papua Barat Daya</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pentingnya penguatan tata kelola pemerintahan berbasis Otonomi Khusus.</li> <li>b. Penguatan sinergi DPRK dengan pemerintah daerah dalam pembangunan daerah.</li> </ol> </li> <li>3. <b>Penguatan SHEK (Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi)</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sinkronisasi kebijakan daerah dengan regulasi Otonomi Khusus.</li> <li>b. Harmonisasi program pembangunan yang berpihak kepada OAP.</li> <li>c. Evaluasi efektivitas pelaksanaan kebijakan afirmasi politik.</li> </ol> </li> </ol>

	<p>d. Koordinasi lintas lembaga dalam mendukung pembangunan Papua Barat Daya.</p> <p>4. <b>Peningkatan Kapasitas Kelembagaan DPRK</b></p> <p>a. Pemahaman regulasi dan kewenangan DPRK mekanisme pengangkatan.</p> <p>b. Penguatan etika pemerintahan dan tata kelola kelembagaan.</p> <p>5. <b>Pengawasan terhadap Implementasi Otsus</b></p> <p>a. Penguatan fungsi pengawasan terhadap penggunaan Dana Otonomi Khusus.</p> <p>b. Pengawasan program prioritas pembangunan masyarakat adat Papua.</p> <p>6. <b>Penguatan Kolaborasi dan Jejaring</b></p> <p>a. Membangun komunikasi dan koordinasi antar anggota DPRK se-Papua Barat Daya.</p> <p>b. Penguatan kemitraan dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan pembangunan.</p>
<p><b>Hasil Kegiatan</b></p>	<p>1. Kegiatan rapat koordinasi berjalan dengan baik dan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada anggota DPRK mekanisme pengangkatan terkait tugas dan fungsi kelembagaan.</p> <p>2. BPP Papua Barat Daya berhasil memberikan arahan strategis mengenai pentingnya penguatan peran DPRK dalam mendukung implementasi Otonomi Khusus Papua.</p> <p>3. Terdapat komitmen bersama untuk memperkuat koordinasi dan sinergi antar anggota DPRK mekanisme pengangkatan se-Sorong Selatan dan Papua Barat Daya.</p> <p>4. Penguatan SHEK dinilai penting dalam memastikan kebijakan dan program pembangunan daerah tetap</p>



	<p>selaras dengan tujuan percepatan pembangunan Papua dan kepentingan Orang Asli Papua.</p> <p>5. Anggota DPRK diharapkan dapat menjadi penghubung aspirasi masyarakat adat serta pengawal kebijakan afirmatif yang berpihak kepada masyarakat Papua.</p>
<p><b>Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlu dilakukan pelatihan dan pendampingan lanjutan bagi anggota DPRK mekanisme pengangkatan terkait fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran.</li> <li>2. BPP Papua Barat Daya perlu terus memperkuat peran SHEK dalam mendukung sinkronisasi kebijakan Otonomi Khusus di tingkat daerah.</li> <li>3. DPRK mekanisme pengangkatan diharapkan aktif mengawal program pembangunan yang berpihak pada kepentingan Orang Asli Papua.</li> <li>4. Perlu dibangun forum komunikasi dan koordinasi rutin antar anggota DPRK mekanisme pengangkatan se-Papua Barat Daya.</li> <li>5. Pemerintah daerah dan DPRK perlu memperkuat kolaborasi dalam penyusunan kebijakan dan pengawasan penggunaan Dana Otonomi Khusus.</li> <li>6. Diperlukan penguatan sistem monitoring dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan afirmatif Otonomi Khusus di daerah.</li> <li>7. Hasil rapat koordinasi perlu ditindaklanjuti melalui penyusunan program kerja bersama yang mendukung peningkatan kapasitas kelembagaan DPRK mekanisme pengangkatan.</li> </ol>





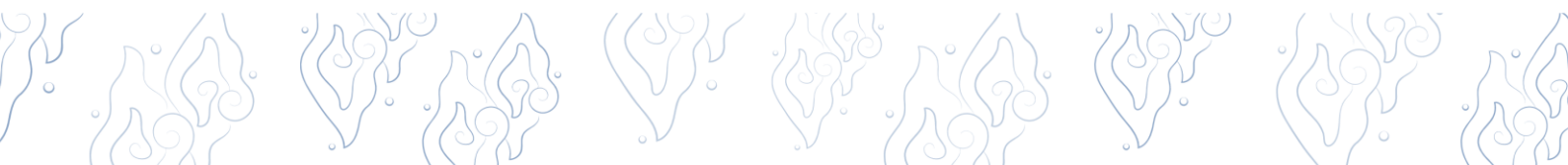
### Kegiatan 8

<p><b>Nama Kegiatan</b></p>	<p>SHEK BPP PBD dalam Kegiatan Rapat Koordinasi Identifikasi dan Analisis Isu Strategis Tahun 2026 oleh Kemenko Polkam RI</p>
<p><b>Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)</b></p>	<p>Kamis, 16 April 2026 di Hotel Vega Sorong</p>
<p><b>Latar Belakang</b></p>	<p>Pertemuan ini digagas oleh Asisten Deputi IV Bidang Otonomi Daerah Kementerian Politik dan Keamanan bersama MRP, BPP Papua Barat Daya, OPD Kesbangpol, anggota DPR jalur pengangkatan Otsus, serta tokoh masyarakat dalam rangka identifikasi dan analisis isu strategis di wilayah Papua Barat Daya.</p>
<p><b>Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan)</b></p>	<p>Mengidentifikasi kondisi politik dan keamanan (Polkam) di wilayah Papua Barat Daya.</p>
<p><b>Peserta Kegiatan</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Asisten Deputi IV Bidang Otonomi Daerah Kementerian Polkam</li> <li>2. Ketua MRP</li> <li>3. Anggota dan Pokja BPP Papua Barat Daya</li> <li>4. Kepala Badan Kesbangpol</li> <li>5. Anggota DPR jalur pengangkatan Otsus</li> <li>6. Tokoh masyarakat</li> </ol>

<b>Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan</b>	Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, Koordinasi
<b>Misi/Keterangan</b>	Papua Sehat, Papua Cerdas, Papua Polhukam/Damai
<b>Poin-Poin Pembahasan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Situasi keamanan terkini di Papua Barat Daya.</li> <li>2. Kolaborasi lintas sektor dalam upaya menjaga stabilitas keamanan di Papua Barat Daya.</li> <li>3. Perlunya penyelesaian berbagai persoalan di Papua secara menyeluruh agar tercipta kondisi yang aman dan kondusif.</li> </ol>
<b>Hasil Kegiatan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Catatan aspirasi yang dirangkum oleh asisten deputi polkam bidang Otda</li> <li>2. Dokumentasi kegiatan</li> </ol>
<b>Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut</b>	Perlu dilaksanakan pertemuan lanjutan guna membahas tindak lanjut hasil identifikasi dan analisis isu strategis di Papua Barat Daya.
<b>Dokumentasi</b>	 

**Kegiatan 9**

<b>Nama Kegiatan</b>	Peran serta BPP PBD dalam Kegiatan Rapat Persiapan, Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) dan Rapat Koordinasi Pengamana Wilayah (Rakorpamwil) Pemerintah Papua Barat Daya dalam rangka Kunjungan Kerja Wakil Presiden RI
<b>Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)</b>	Sabtu-Senin, 18 & 20 April 2026 di Kantor Gubernur Papua Barat Daya
<b>Latar Belakang</b>	
<b>Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan)</b>	
<b>Peserta Kegiatan</b>	
<b>Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan</b>	
<b>Misi/Keterangan</b>	
<b>Poin-Poin Pembahasan</b>	
<b>Hasil Kegiatan</b>	
<b>Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut</b>	

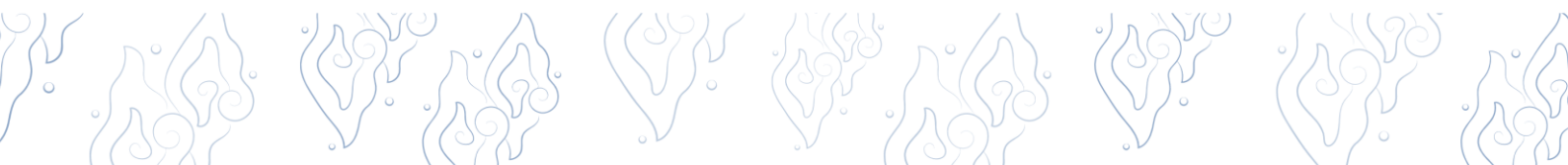


## Dokumentasi




## Kegiatan 9

<b>Nama Kegiatan</b>	Peran Aktif BPP PBD (Arahan & SHEK) dalam Kegiatan Musrenbang Otonomi Khusus dan RKPD Kabupaten Sorong Selatan
<b>Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)</b>	Senin-Selasa, 20-21 April 2026 di Aula Mratuwa Sesna dan Aula Kantor Bappeda, Kabupaten Sorong Selatan



<p><b>Latar Belakang</b></p>	<p>Kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia ke Provinsi Papua Barat Daya merupakan agenda strategis pemerintah pusat dalam rangka pemantauan pelaksanaan pembangunan, pelayanan publik, serta penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah di wilayah Papua Barat Daya.</p> <p>Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan kunjungan kerja tersebut, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melaksanakan Rapat Persiapan, Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil), dan Rapat Koordinasi Pengamanan Wilayah (Rakorpanwil) yang melibatkan unsur pemerintah daerah, aparat keamanan, instansi vertikal, dan pemangku kepentingan terkait.</p> <p>BPP Papua Barat Daya turut berperan aktif dalam kegiatan tersebut melalui pelaksanaan fungsi koordinasi dan SHEK (Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi) guna mendukung kesiapan pelaksanaan kunjungan kerja Wakil Presiden RI di Papua Barat Daya.</p>
<p><b>Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan)</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendukung kesiapan pelaksanaan kunjungan kerja Wakil Presiden RI di Papua Barat Daya.</li> <li>2. Memperkuat koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan agenda kunjungan kerja pemerintah pusat.</li> <li>3. Melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi terkait agenda kegiatan, pengamanan, dan kesiapan daerah.</li> <li>4. Mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan kunjungan kerja Wakil Presiden RI di Papua Barat Daya.</li> </ol>
<p><b>Peserta Kegiatan</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gubernur Papua Barat Daya</li> <li>2. Wakil Gubernur Papua Barat Daya</li> <li>3. Anggota BPP Papua Barat Daya</li> <li>4. Forkopimda Papua Barat Daya</li> </ol>

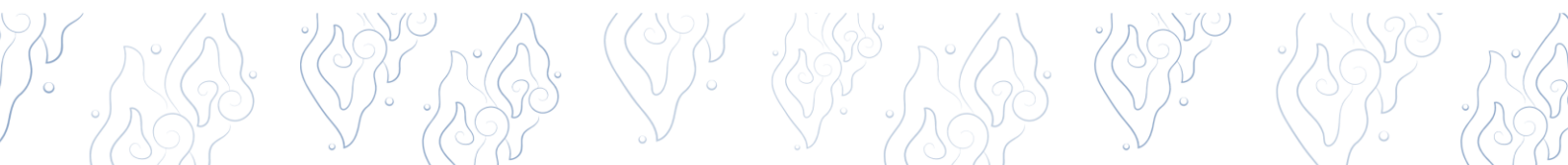
	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat Daya</li> <li>6. Instansi vertikal terkait</li> <li>7. Unsur TNI dan Polri</li> <li>8. Tim Sekretariat Wakil Presiden RI</li> <li>9. Tim Paspampres</li> <li>10. OPD terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya</li> </ol>
<b>Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan</b>	Sinkronisasi, harmonisasi, koordinasi, fasilitasi, dan evaluasi.
<b>Misi/Keterangan</b>	Kolaborasi lintas sektor
<b>Poin-Poin Pembahasan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persiapan pelaksanaan kunjungan kerja Wakil Presiden RI di Papua Barat Daya.</li> <li>2. Koordinasi agenda kegiatan dan lokasi kunjungan kerja.</li> <li>3. Kesiapan pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan kegiatan kunjungan kerja.</li> <li>4. Koordinasi pengamanan wilayah dan pengamanan kegiatan bersama aparat keamanan dan Paspampres.</li> <li>5. Sinkronisasi tugas dan tanggung jawab masing-masing instansi dalam mendukung kelancaran kegiatan.</li> <li>6. Penguatan komunikasi dan koordinasi lintas sektor selama pelaksanaan kunjungan kerja Wakil Presiden RI.</li> </ol>
<b>Hasil Kegiatan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlaksananya rapat persiapan, Rakorwil, dan Rakorpamwil dalam rangka kunjungan kerja Wakil Presiden RI di Papua Barat Daya.</li> <li>2. Terbangunnya koordinasi dan komunikasi lintas sektor antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan unsur pendukung kegiatan kunjungan kerja.</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Tersusunnya pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing instansi dalam mendukung pelaksanaan kegiatan.</li> <li>4. Terciptanya kesiapan awal pemerintah daerah terkait agenda, pengamanan, dan dukungan teknis pelaksanaan kunjungan kerja Wakil Presiden RI.</li> <li>5. BPP Papua Barat Daya turut mendukung pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kegiatan dalam rangka kelancaran kunjungan kerja Wakil Presiden RI di Papua Barat Daya.</li> </ol>
<p><b>Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlu penguatan koordinasi lintas sektor selama pelaksanaan kunjungan kerja Wakil Presiden RI.</li> <li>2. Pemerintah daerah dan aparat keamanan perlu memastikan kesiapan teknis dan pengamanan kegiatan berjalan optimal.</li> <li>3. Perlu dilakukan komunikasi dan evaluasi berkala antar instansi selama pelaksanaan agenda kunjungan kerja.</li> <li>4. Diperlukan sinergi dan dukungan seluruh pihak guna menjaga kelancaran dan keamanan kegiatan kunjungan kerja pemerintah pusat di Papua Barat Daya.</li> </ol>
<p><b>Dokumentasi</b></p>	

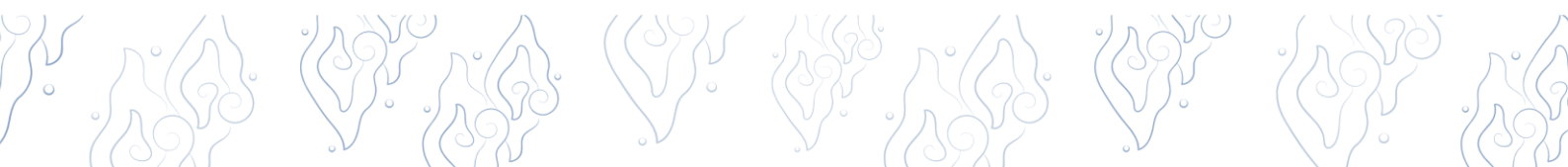


### Kegiatan 10

<b>Nama Kegiatan</b>	Peran Aktif BPP PBD (Arahan & SHEK) dalam Kegiatan Musrenbang RKPD & Otonomi Khusus Tahun 2027 Kabupaten Raja Ampat
<b>Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)</b>	Selasa, 21 April 2026 melalui Daring/Zoom Meetings
<b>Latar Belakang</b>	Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD dan Otonomi Khusus Tahun 2027 Kabupaten Raja Ampat merupakan bagian penting dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, terintegrasi, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, khususnya Orang Asli Papua (OAP).

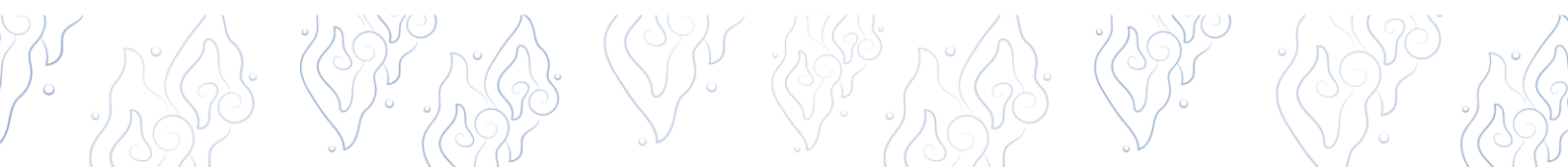


	<p>Sebagai daerah strategis di Provinsi Papua Barat Daya yang memiliki potensi besar pada sektor pariwisata, kelautan, perikanan, dan konservasi lingkungan, Kabupaten Raja Ampat memerlukan perencanaan pembangunan yang selaras dengan kebijakan percepatan pembangunan Papua dan prinsip pembangunan berkelanjutan.</p> <p>Dalam konteks pelaksanaan Otonomi Khusus Papua, Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua Provinsi Papua Barat Daya (BPP PBD/BP3OKP) memiliki peran strategis sebagai badan pengarah dalam memastikan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi (SHEK) terhadap program pembangunan daerah agar selaras dengan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) dan Sistem Informasi Perencanaan dan Penganggaran Papua (SIPPP).</p> <p>Melalui kegiatan Musrenbang RKPD dan Otonomi Khusus Tahun 2027 Kabupaten Raja Ampat, BPP Papua Barat Daya berperan aktif memberikan arahan strategis guna memastikan program pembangunan daerah lebih tepat sasaran, terintegrasi, dan berpihak kepada kesejahteraan masyarakat OAP.</p>
<p><b>Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan)</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memastikan penyusunan RKPD dan program Otonomi Khusus Kabupaten Raja Ampat Tahun 2027 selaras dengan kebijakan pembangunan Papua Barat Daya dan nasional.</li> <li>2. Mendorong sinkronisasi program daerah dengan RAPPP dan SIPPP.</li> <li>3. Memperkuat peran BPP Papua Barat Daya sebagai badan pengarah dalam proses perencanaan pembangunan berbasis Otonomi Khusus.</li> </ol>



	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Mengoptimalkan penerapan SHEK dalam penyelarasan program pembangunan daerah.</li> <li>5. Mendorong pembangunan yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat OAP dan pembangunan berkelanjutan.</li> </ol>
<b>Peserta Kegiatan</b>	<p>Bupati Kabupaten Raja Ampat  Bapelitda Kabupaten Raja Ampat  Bapperida Provinsi Papua Barat Daya  OPD teknis terkait  BPP Papua Barat Daya</p>
<b>Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan</b>	Sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi.
<b>Misi/Keterangan</b>	Papua Sehat, Papua Cerdas, Papua Produktif, Papua Polhukam/Damai
<b>Poin-Poin Pembahasan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Arahkan strategis BPP Papua Barat Daya terkait pentingnya perencanaan pembangunan yang terintegrasi dan berbasis kebutuhan masyarakat.</li> <li>2. Penguatan pembangunan afirmatif bagi Orang Asli Papua (OAP).</li> <li>3. Sinkronisasi program daerah dengan prioritas RAPPP.</li> <li>4. Harmonisasi kebijakan pembangunan daerah dengan kebijakan Otonomi Khusus Papua.</li> <li>5. Evaluasi efektivitas program pembangunan dan penggunaan Dana Otsus.</li> <li>6. Penguatan integrasi data perencanaan dan penganggaran daerah melalui SIPPP.</li> <li>7. Pengembangan sektor pariwisata berbasis masyarakat dan konservasi lingkungan.</li> <li>8. Penguatan ekonomi masyarakat pesisir dan kampung adat.</li> <li>9. Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.</li> </ol>

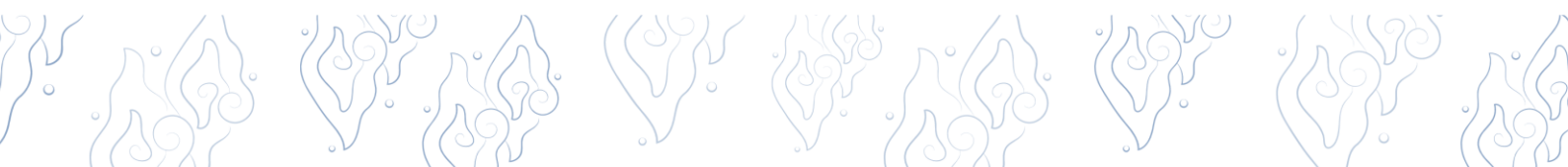
	<p>10. Optimalisasi penggunaan Dana Otonomi Khusus agar lebih efektif dan akuntabel.</p> <p>11. Penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah, BPP Papua Barat Daya, dan stakeholder pembangunan lainnya.</p>
<p><b>Hasil Kegiatan</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kegiatan Musrenbang RKPD dan Otonomi Khusus Tahun 2027 Kabupaten Raja Ampat berjalan dengan baik dan menghasilkan komitmen bersama dalam penguatan perencanaan pembangunan berbasis Otonomi Khusus.</li> <li>2. BPP Papua Barat Daya memberikan arahan strategis terkait pentingnya sinkronisasi dan harmonisasi program pembangunan daerah dengan RAPP dan SIPPP.</li> <li>3. Pemerintah Kabupaten Raja Ampat menunjukkan komitmen dalam meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan yang berbasis data, kebutuhan masyarakat, dan pembangunan berkelanjutan.</li> <li>4. Penguatan SHEK menjadi instrumen penting dalam memastikan keselarasan kebijakan, efektivitas program, serta optimalisasi penggunaan Dana Otonomi Khusus.</li> <li>5. Terdapat kesepakatan bersama bahwa pembangunan Kabupaten Raja Ampat perlu memperhatikan keseimbangan antara peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan.</li> <li>6. Kegiatan ini memperkuat koordinasi, integrasi, dan sinergi pembangunan daerah dalam mendukung percepatan pembangunan Papua Barat Daya yang inklusif dan berkelanjutan.</li> </ol>



<p><b>Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemerintah Kabupaten Raja Ampat perlu melakukan penyelarasan final RKPD Tahun 2027 dengan arah kebijakan RAPPP dan indikator SIPPP.</li> <li>2. BPP Papua Barat Daya perlu terus melakukan pendampingan, monitoring, dan evaluasi terhadap implementasi program pembangunan berbasis Otonomi Khusus.</li> <li>3. Perangkat daerah diharapkan meningkatkan kualitas perencanaan program yang berbasis kebutuhan masyarakat OAP dan potensi unggulan daerah.</li> <li>4. Perlu penguatan kapasitas SDM perencanaan daerah dalam pemanfaatan SIPPP dan integrasi data pembangunan Papua.</li> <li>5. Pemerintah daerah perlu memperkuat pengawasan penggunaan Dana Otonomi Khusus agar lebih efektif, tepat sasaran, dan akuntabel.</li> <li>6. Diperlukan forum koordinasi berkala antara BPP Papua Barat Daya, pemerintah daerah, dan stakeholder terkait untuk memastikan sinkronisasi kebijakan pembangunan daerah.</li> <li>7. Program pembangunan daerah perlu diarahkan pada penguatan ekonomi masyarakat lokal, konservasi lingkungan, serta peningkatan kualitas pelayanan dasar masyarakat.</li> </ol>
<p><b>Dokumentasi</b></p>	<p>-</p>

### Kegiatan 11

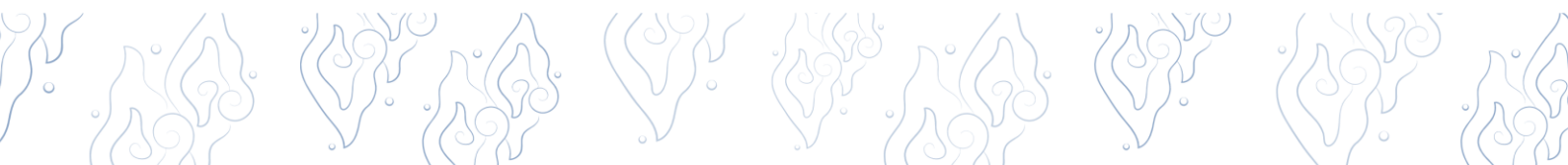
<p><b>Nama Kegiatan</b></p>	<p>Peran Aktif BPP PBD dalam Kegiatan Kunjungan Kerja Wakil Presiden Republik Indonesia di Papua Barat Daya</p>
<p><b>Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)</b></p>	<p>Selasa-Rabu, 21-22 April 2026 di Kota Sorong, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong</p>



<p><b>Latar Belakang</b></p>	<p>Kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia selaku Ketua Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BPP) ke Provinsi Papua Barat Daya merupakan bagian dari agenda pemerintah pusat dalam rangka penguatan koordinasi, pemantauan pelaksanaan pembangunan, serta percepatan pembangunan Otonomi Khusus Papua di wilayah Papua Barat Daya.</p> <p>Dalam kegiatan tersebut, Anggota BPP Papua Barat Daya turut berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan agenda kunjungan kerja Wakil Presiden RI sebagai bentuk pelaksanaan fungsi koordinasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.</p> <p>Kunjungan kerja ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memastikan program prioritas pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pelayanan publik dapat berjalan secara optimal dan dirasakan langsung oleh masyarakat Papua Barat Daya.</p>
<p><b>Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan)</b></p>	<p>Mendukung pelaksanaan kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia di Papua Barat Daya.</p> <p>Memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam percepatan pembangunan Papua.</p> <p>Melaksanakan koordinasi dan pendampingan kegiatan Wakil Presiden RI selama pelaksanaan agenda kunjungan kerja.</p> <p>Mendukung penguatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat di Papua Barat Daya.</p>
<p><b>Peserta Kegiatan</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wakil Presiden Republik Indonesia</li> <li>2. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan RI</li> <li>3. Menteri terkait</li> <li>4. Komite Eksekutif Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Anggota BPP Papua Barat Daya</li> <li>6. Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat Daya</li> <li>7. Tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat</li> <li>8. Masyarakat Papua Barat Daya</li> </ol>
<b>Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan</b>	Sinkronisasi, koordinasi, fasilitasi, dan pendampingan kegiatan.
<b>Misi/Keterangan</b>	Papua Sehat, Papua Cerdas, Papua Produktif, Papua Polhukam/Damai
<b>Poin-Poin Pembahasan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyambutan Wakil Presiden Republik Indonesia di Bandara Internasional Domine Eduard Osok (DEO) Sorong.</li> <li>2. Dukungan BPP Papua Barat Daya terhadap pelaksanaan tugas Wakil Presiden RI selaku Ketua BPP dalam percepatan pembangunan Papua.</li> <li>3. Kunjungan Wakil Presiden RI ke Supermarket Saga Sorong dan interaksi bersama masyarakat, khususnya mama-mama Papua.</li> <li>4. Penguatan pemberdayaan perempuan dan ekonomi keluarga masyarakat Papua.</li> <li>5. Pertemuan bersama tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat di Kota Sorong.</li> <li>6. Penguatan kolaborasi pembangunan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat Papua Barat Daya.</li> <li>7. Sinergi pelaksanaan program prioritas pembangunan di Papua Barat Daya.</li> </ol>
<b>Hasil Kegiatan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlaksananya kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia di Papua Barat Daya dengan baik dan lancar.</li> <li>2. Anggota BPP Papua Barat Daya turut mendampingi dan mendukung pelaksanaan agenda kunjungan kerja Wakil Presiden RI sebagai bentuk sinergi pemerintah pusat dan daerah.</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Terbangunnya komunikasi dan silaturahmi antara pemerintah pusat dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan masyarakat Papua Barat Daya.</li> <li>4. Wakil Presiden RI melakukan interaksi langsung dengan masyarakat sebagai bentuk perhatian terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya mama-mama Papua.</li> <li>5. Kegiatan kunjungan kerja memperkuat dukungan terhadap percepatan pembangunan dan pelaksanaan program prioritas di Papua Barat Daya.</li> <li>6. Terjalannya koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan unsur BPP dalam mendukung pembangunan Papua Barat Daya.</li> </ol>
<p><b>Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlu penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan program percepatan pembangunan Papua.</li> <li>2. Pemerintah daerah dan BPP Papua Barat Daya perlu terus mendukung implementasi program prioritas yang berdampak langsung kepada masyarakat.</li> <li>3. Perlu penguatan pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal, khususnya perempuan dan pelaku usaha kecil masyarakat Papua.</li> <li>4. Diperlukan tindak lanjut komunikasi dan kolaborasi bersama tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat dalam mendukung pembangunan daerah.</li> <li>5. BPP Papua Barat Daya perlu terus melaksanakan fungsi koordinasi dan pendampingan terhadap program pembangunan di Papua Barat Daya.</li> </ol>



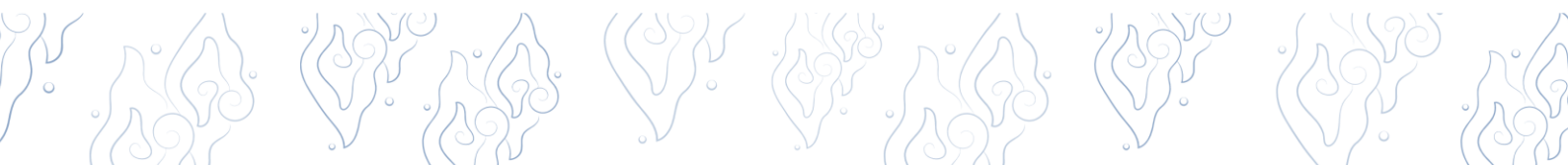
Dokumentasi





## Kegiatan 12

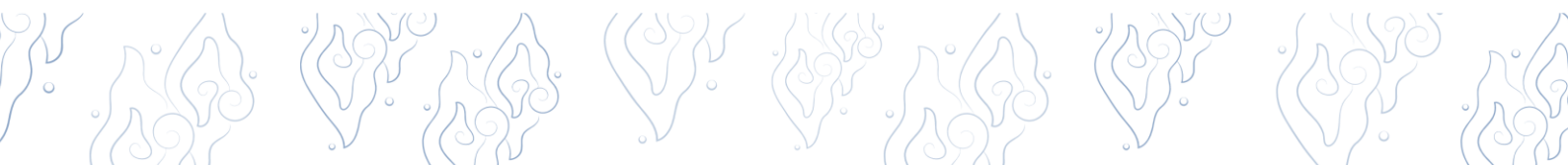
<p><b>Nama Kegiatan</b></p>	<p>Peran Aktif (SHEK) BPP PBD dalam Kegiatan Workshop Penyusunan RAP Perubahan Dana Otsus Papua TA 2026 melalui Aplikasi Interoperabilitas Batch 2 oleh Kementerian Keuangan</p>
<p><b>Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)</b></p>	<p>Selasa-Kamis, 21-23 April 2026 di Rylich Panorama Hotel Sorong</p>
<p><b>Latar Belakang</b></p>	<p>RAP Perubahan Otsus (Rencana Anggaran dan Program Perubahan Otonomi Khusus) merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun untuk penyesuaian penggunaan Dana Otonomi Khusus (Otsus), Dana Tambahan Infrastruktur (DTI), dan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas di Papua. Dokumen ini bertujuan</p>




	<p>memastikan penyesuaian penggunaan dana berjalan efektif, transparan, dan sesuai dengan prioritas daerah. Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Papua perlu dilakukan secara lebih efektif, transparan, dan tepat sasaran agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat Papua, khususnya Orang Asli Papua (OAP).</p> <p>Masih terdapat kendala dalam penyusunan RAP Perubahan, pengelolaan SILPA, serta sinkronisasi data antar sistem pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah pusat melalui Kemendagri, DJPK, dan Bappenas mendorong interoperabilitas sistem seperti SIPPP, SIPD RI, dan SIKD Otsus agar proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pengawasan pembangunan Papua menjadi lebih terintegrasi.</p>
<p><b>Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan)</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghadiri kegiatan Workshop Penyusunan RAP Perubahan Dana Otsus Papua TA 2026 melalui Aplikasi Interoperabilitas Batch 2 oleh Kementerian Keuangan.</li> <li>2. Menjadi narasumber pada kegiatan Workshop Penyusunan RAP Perubahan Dana Otsus Papua TA 2026 melalui Aplikasi Interoperabilitas Batch 2 oleh Kementerian Keuangan.</li> <li>3. Meningkatkan pemahaman pemerintah daerah terkait penyusunan RAP Perubahan Tahun 2026.</li> <li>4. Memastikan pengelolaan Dana Otsus dan SILPA dilakukan sesuai ketentuan.</li> <li>5. Mendorong sinkronisasi data dan interoperabilitas sistem SIPPP, SIPD RI, dan SIKD Otsus.</li> <li>6. Mendukung percepatan pembangunan Papua melalui perencanaan yang lebih tepat sasaran.</li> <li>7. Mengoptimalkan penggunaan Dana Otsus agar berdampak langsung bagi masyarakat Papua.</li> </ol>

<b>Peserta Kegiatan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat</li> <li>2. Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Papua Barat Daya</li> <li>3. Pemerintah Daerah Kabupaten di Provinsi Papua Barat</li> <li>4. Pemerintah Daerah Kabupaten di Provinsi Papua</li> <li>5. Pemerintah Daerah Kabupaten di Provinsi Papua Tengah</li> <li>6. Pemerintah Daerah Kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan</li> <li>7. Bappeda dan Kasubag Perencana se-Kabupaten/Kota dan Provinsi Papua Barat Daya</li> <li>8. BP3OKP Papua Barat Daya</li> </ol>
<b>Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan</b>	Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, Koordinasi
<b>Misi/Keterangan</b>	Papua Sehat, Papua Cerdas, Papua Produktif, Papua Polhukam/Damai, kolaborasi
<b>Poin-Poin Pembahasan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Arah kebijakan pembangunan di Tanah Papua.</li> <li>2. Penggunaan SILPA sebagai komponen perubahan atau pergeseran anggaran.</li> <li>3. Penyusunan RAP Perubahan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• RAP Perubahan dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan anggaran tahun berjalan.</li> <li>• Penyusunan RAP harus sesuai jadwal dan mekanisme yang ditetapkan pemerintah.</li> <li>• RAP Perubahan menggunakan alokasi definitif dan SILPA tahun sebelumnya.</li> </ul> </li> <li>4. Pengelolaan SILPA Dana Otsus: <ul style="list-style-type: none"> <li>• SILPA dapat digunakan untuk membiayai kegiatan prioritas dan pekerjaan yang belum selesai.</li> <li>• Penggunaan SILPA harus dipisahkan dari sumber dana lain.</li> </ul> </li> </ol>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SILPA wajib direviu oleh APIP dan direkonsiliasi bersama Kemendagri.</li> </ul> <p>5. Larangan penggunaan Dana Otsus, antara lain untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gaji dan tunjangan ASN/DPR.</li> <li>• Belanja rutin kantor.</li> <li>• Honor rutin ASN.</li> <li>• Pengadaan perlengkapan kantor.</li> <li>• Perjalanan dinas yang tidak mendukung program masyarakat.</li> </ul> <p>6. Interoperabilitas sistem:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SIPPP, SIPD RI, dan SIKD Otsus mulai diintegrasikan.</li> <li>• Sistem saling terhubung untuk mempermudah sinkronisasi data.</li> <li>• Pemerintah daerah tidak perlu melakukan input data secara berulang.</li> </ul> <p>7. RAPP 2025–2029:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• RAPP menjadi pedoman utama pembangunan Papua.</li> <li>• Prioritas pembangunan meliputi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi lokal, ketahanan pangan, energi, dan air bersih.</li> </ul> <p>8. Musrenbang Otsus Digital:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Proses Musrenbang dilakukan melalui SIPPP.</li> <li>• Setiap tahapan saling terkunci otomatis sehingga proses harus dilakukan secara berurutan.</li> <li>• Kelompok rentan dan penyandang disabilitas wajib dilibatkan.</li> </ul>
<p><b>Hasil Kegiatan</b></p>	<p>1. Tersusunnya RAP Perubahan.</p> <p>2. Pemerintah daerah memperoleh pemahaman yang lebih baik terkait RAP Perubahan dan pengelolaan SILPA.</p>



	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Sinkronisasi data antara SIPPP, SIPD RI, dan SIKD Otsus mulai berjalan.</li> <li>4. Penyaluran Dana Otsus Tahap I Tahun 2026 berlangsung lebih cepat.</li> <li>5. Sebagian besar daerah telah menyelesaikan RAP Final Tahun 2026.</li> <li>6. Penggunaan sistem digital membantu meningkatkan validitas data dan mempercepat proses penganggaran.</li> </ol>
<p><b>Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlu dilakukan deep assistance dalam pendampingan pengelolaan Dana Otsus.</li> <li>2. Pemerintah daerah perlu meningkatkan ketepatan dan kedisiplinan dalam penginputan data pada sistem SIPPP dan SIPD RI.</li> <li>3. Pengelolaan SILPA harus lebih optimal agar tidak terjadi penumpukan sisa anggaran.</li> <li>4. Perlu peningkatan kapasitas SDM daerah dalam penggunaan aplikasi pengelolaan Dana Otsus.</li> <li>5. Sinkronisasi antar perangkat daerah perlu diperkuat agar perencanaan dan penganggaran lebih efektif.</li> <li>6. Pengawasan penggunaan Dana Otsus harus terus diperkuat agar tepat sasaran dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat Papua.</li> </ol>
<p><b>Dokumentasi</b></p>	



### Kegiatan 13

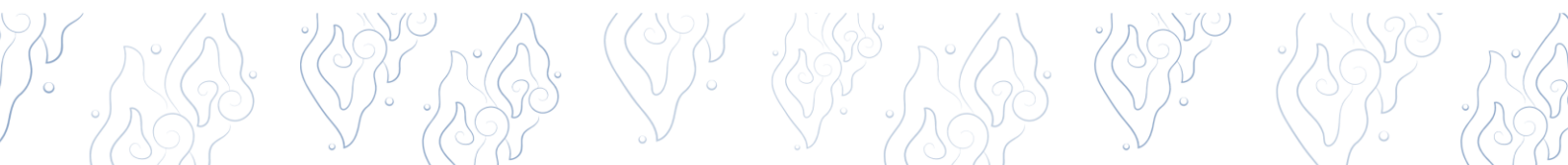
<b>Nama Kegiatan</b>	Rapat Virtual terkait Penguatan Koordinasi & Sinergi Pelaksanaan Tusi BPP bersama KPK
<b>Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)</b>	Kamis, 23 April 2026 di Daring/Zoom Meetings
<b>Latar Belakang</b>	<p>Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel dalam pelaksanaan Otonomi Khusus Papua, diperlukan penguatan koordinasi dan sinergi antar lembaga, khususnya dalam pengawasan, pengendalian, dan optimalisasi pelaksanaan program pembangunan daerah.</p> <p>Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BPP) memiliki tugas strategis dalam</p>




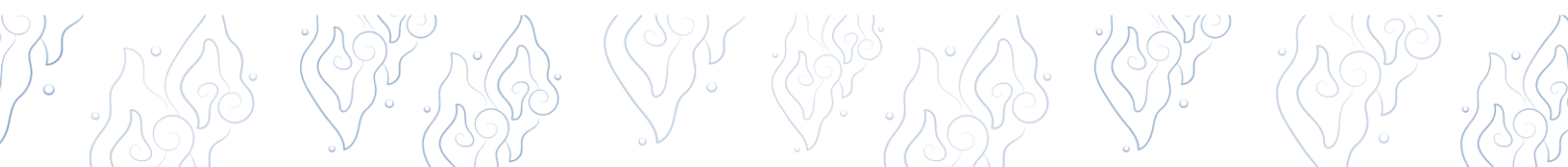
	<p>melaksanakan fungsi koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan pengendalian terhadap kebijakan serta program percepatan pembangunan Papua. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, penguatan tata kelola, integritas, dan akuntabilitas menjadi aspek penting guna memastikan pelaksanaan program berjalan efektif dan tepat sasaran.</p> <p>Sehubungan dengan hal tersebut, dilaksanakan kegiatan Penguatan Koordinasi dan Sinergi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi BPP bersama Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai upaya memperkuat kolaborasi kelembagaan dalam mendukung pencegahan korupsi, penguatan sistem pengawasan, serta peningkatan kualitas tata kelola pembangunan Otonomi Khusus Papua.</p> <p>Kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat integritas kelembagaan dan memastikan pengelolaan program serta anggaran Otonomi Khusus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Orang Asli Papua (OAP).</p>
<p><b>Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan)</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memperkuat koordinasi dan sinergi antara BPP dan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan.</li> <li>2. Meningkatkan pemahaman terkait tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.</li> <li>3. Mendorong penguatan sistem pengawasan dan pengendalian program pembangunan Otonomi Khusus Papua.</li> <li>4. Mengoptimalkan pelaksanaan fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) dalam pengelolaan program dan anggaran.</li> <li>5. Memperkuat komitmen pencegahan korupsi dalam pelaksanaan pembangunan daerah.</li> </ol>

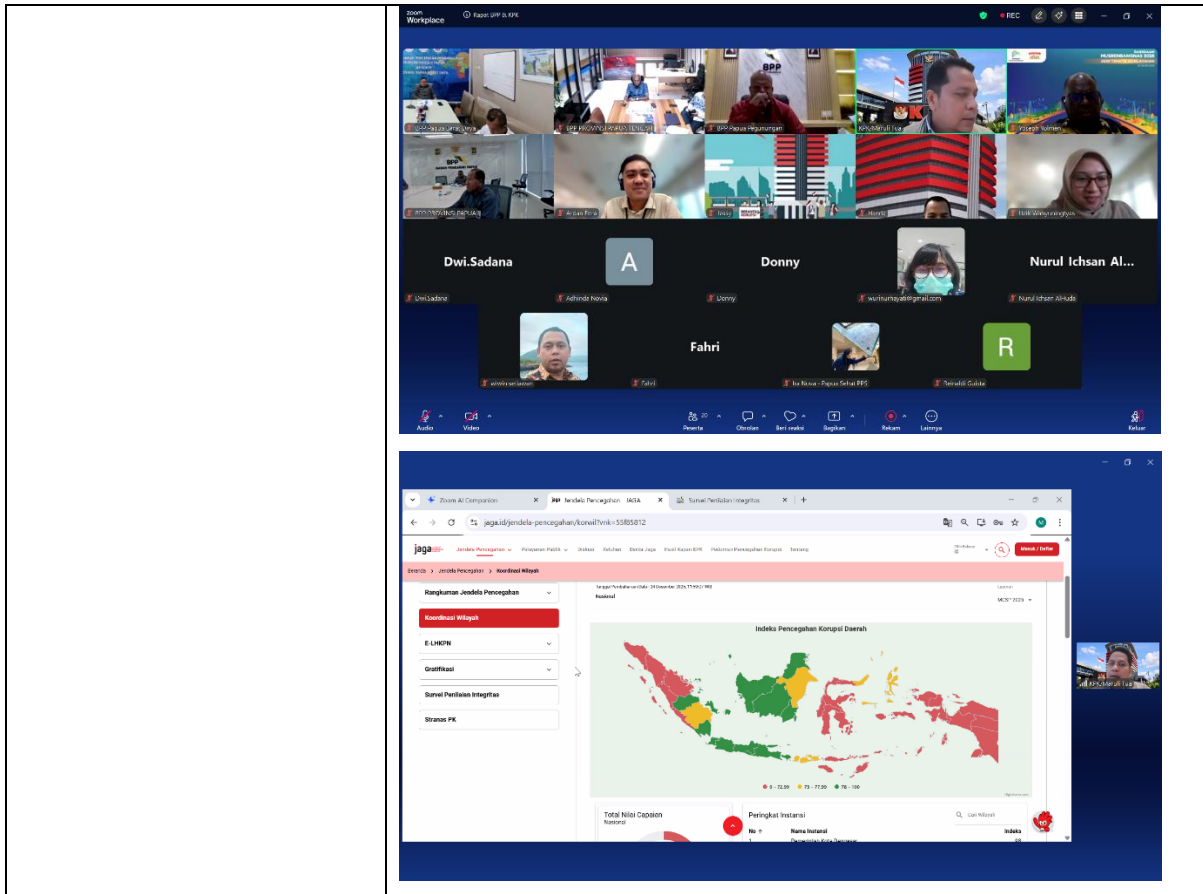
<b>Peserta Kegiatan</b>	1. Tim KPK 2. BP3OKP se-Tanah Papua
<b>Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan</b>	Sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi.
<b>Misi/Keterangan</b>	Papua Sehat, Papua Cerdas, Papua Produktif, Papua Polhukam/Damai
<b>Poin-Poin Pembahasan</b>	<p>Beberapa poin pembahasan dalam kegiatan tersebut antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Penguatan Tata Kelola Pemerintahan</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Pentingnya prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam pelaksanaan program pembangunan.</li> <li>○ Penguatan sistem pengawasan internal dan pengendalian program.</li> </ul> </li> <li>2. <b>Sinergi BPP dan KPK</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Penguatan koordinasi dalam pencegahan korupsi pada pengelolaan Dana Otonomi Khusus Papua.</li> <li>○ Dukungan pengawasan terhadap program prioritas pembangunan Papua.</li> </ul> </li> <li>3. <b>Optimalisasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi BPP</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Penguatan fungsi SHEK dalam sinkronisasi dan evaluasi program pembangunan.</li> <li>○ Harmonisasi kebijakan pusat dan daerah dalam implementasi Otonomi Khusus.</li> </ul> </li> <li>4. <b>Penguatan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan program.</li> <li>○ Penekanan terhadap efektivitas penggunaan anggaran berbasis hasil dan manfaat masyarakat.</li> </ul> </li> <li>5. <b>Pencegahan Korupsi dan Penguatan Integritas</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Strategi pencegahan korupsi dalam tata kelola pemerintahan daerah.</li> </ul> </li> </ol>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Penguatan budaya kerja berintegritas dan kepatuhan terhadap regulasi.</li> </ul> <p><b>6. Penguatan Monitoring dan Evaluasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Pengembangan mekanisme monitoring dan evaluasi program Otsus Papua secara terintegrasi.</li> <li>○ Pemanfaatan data dan sistem informasi dalam pengawasan program pembangunan.</li> </ul>
<b>Hasil Kegiatan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kegiatan berjalan dengan baik dan memperkuat koordinasi serta sinergi kelembagaan antara BPP dan Komisi Pemberantasan Korupsi.</li> <li>2. Terdapat pemahaman bersama mengenai pentingnya penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.</li> <li>3. Pelaksanaan fungsi SHEK dinilai sangat penting dalam memastikan sinkronisasi program, efektivitas pengawasan, dan akuntabilitas pembangunan Otonomi Khusus Papua.</li> <li>4. Kegiatan ini meningkatkan komitmen bersama dalam mendukung pengelolaan Dana Otonomi Khusus yang lebih tepat sasaran dan berdampak langsung kepada masyarakat OAP.</li> <li>5. Penguatan koordinasi lintas lembaga menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas pengawasan dan pengendalian program pembangunan daerah.</li> </ol>
<b>Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. BPP perlu memperkuat implementasi fungsi SHEK dalam seluruh proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan Otonomi Khusus Papua.</li> <li>2. Perlu dilakukan penguatan sistem monitoring dan evaluasi berbasis data dan teknologi informasi guna meningkatkan efektivitas pengawasan program.</li> </ol>



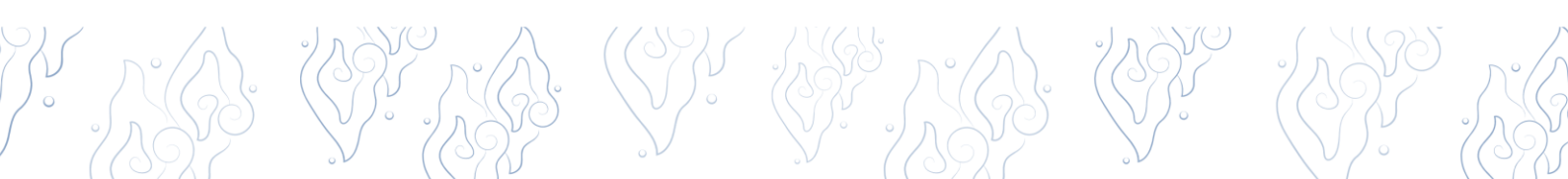
	<ol style="list-style-type: none"><li>3. BPP dan Komisi Pemberantasan Korupsi perlu membangun koordinasi dan komunikasi berkala dalam mendukung penguatan tata kelola pemerintahan daerah.</li><li>4. Diperlukan peningkatan kapasitas SDM terkait tata kelola pemerintahan, pengawasan internal, dan pencegahan korupsi.</li><li>5. Pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait diharapkan meningkatkan komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran Otonomi Khusus.</li><li>6. Perlu dilakukan penguatan pengawasan terhadap program prioritas yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar dan kesejahteraan masyarakat OAP.</li><li>7. Hasil kegiatan perlu ditindaklanjuti melalui penyusunan langkah strategis bersama dalam penguatan tata kelola dan pengawasan pembangunan Papua Barat Daya.</li></ol>
<b>Dokumentasi</b>	





**Kegiatan 14**

<p><b>Nama Kegiatan</b></p>	<p>Peran Aktif (SHEK) BPP PBD dalam Kegiatan Forum Pra-Musrenbang Tematik Kelompok Rentan (Rumatimbang) dalam Penyusunan RKPD 2027 oleh Pemerintah Daerah Papua Barat Daya</p>
<p><b>Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)</b></p>	<p>Kamis, 23 April 2026 di Rylich Panorama Hotel Sorong</p>
<p><b>Latar Belakang</b></p>	<p>Pra-Musrenbang Tematik Inklusi merupakan forum persiapan perencanaan pembangunan yang secara khusus dirancang untuk menjaring aspirasi kelompok rentan, seperti perempuan, penyandang disabilitas, anak-anak, dan lansia, agar terakomodasi dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Forum ini bertujuan memastikan pembangunan yang adil, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan kelompok marginal.</p>



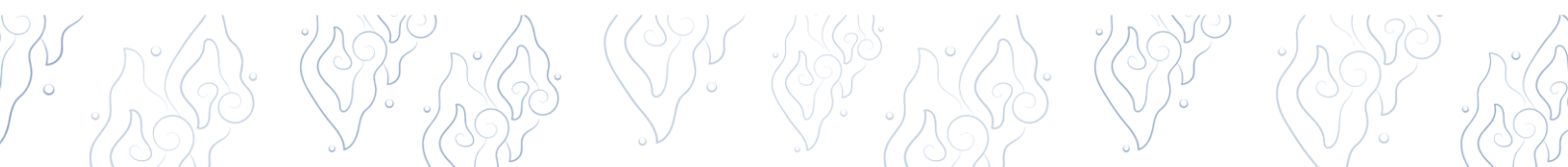
<b>Tujuan Kegiatan</b> <b>(Tujuan Pokja dalam Kegiatan)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghadiri kegiatan Forum Pra-Musrenbang Tematik Kelompok Rentan (Rumatimbang) dalam Penyusunan RKPD Tahun 2027 oleh Pemerintah Daerah Papua Barat Daya.</li> <li>2. Menjadi peserta aktif serta memberikan arahan terkait pelaksanaan Forum Pra-Musrenbang Tematik Kelompok Rentan (Rumatimbang) dalam Penyusunan RKPD Tahun 2027 oleh Pemerintah Daerah Papua Barat Daya.</li> </ol>
<b>Peserta Kegiatan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wakil Gubernur Papua Barat Daya.</li> <li>2. Forkopimda.</li> <li>3. Perwakilan masing - masing kelompok disabilitas</li> <li>4. Skala</li> <li>5. Anggota Pokja sehat BPP Papua barat Daya</li> </ol>
<b>Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan</b>	Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, Koordinasi, Kolaborasi
<b>Misi/Keterangan</b>	Papua Sehat, Papua Cerdas, Papua Produktif, Papua Polhukam/Damai, Kolaborasi
<b>Poin-Poin Pembahasan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyampaian materi terkait arah kebijakan serta data cakupan layanan terhadap kelompok rentan.</li> <li>2. Arahan dari BPP yang diwakili oleh Pokja Papua Sehat.</li> <li>3. Arahan dari Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi.</li> <li>4. Diskusi bersama peserta kegiatan.</li> </ol>
<b>Hasil Kegiatan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daftar Usulan Prioritas Inklusif</li> <li>2. Dokumentasi kegiatan</li> </ol>
<b>Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut</b>	Pelaksanaan Pra-Musrenbang selanjutnya diharapkan dapat dilaksanakan secara kolaboratif bersama pemerintah kabupaten/kota serta memanfaatkan aplikasi yang dapat diakses oleh kelompok rentan guna mempermudah proses partisipasi dan penyampaian aspirasi.
<b>Dokumentasi</b>	-

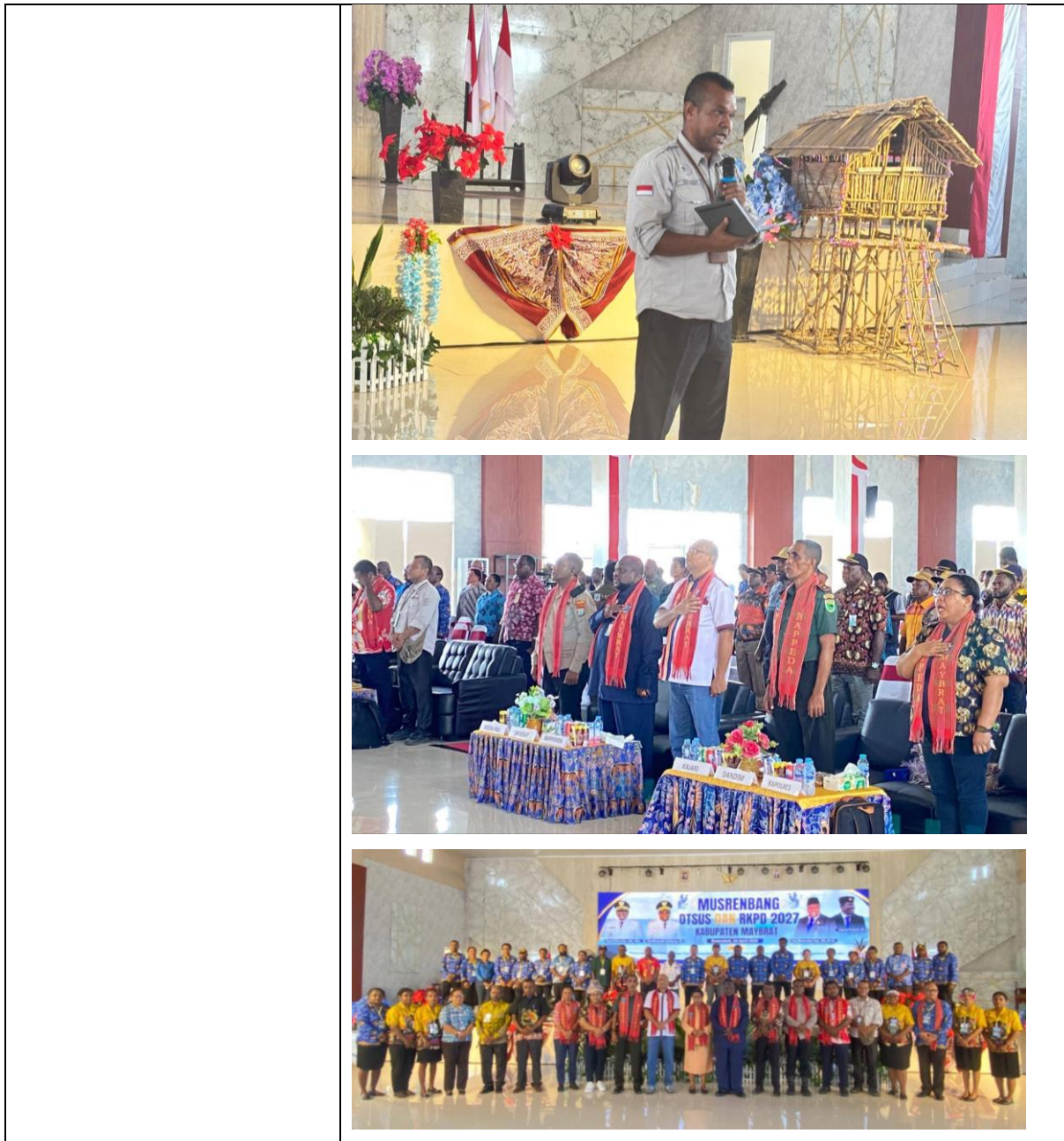
**Kegiatan 15**

<b>Nama Kegiatan</b>	Peran Aktif BPP PBD (Arahan & SHEK) dalam Kegiatan Musrenbang Otonomi Khusus dan RKPD Kabupaten Maybrat
<b>Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)</b>	Jum'at, 24 April 2026 di Aula Samu Siret Kumurkek, Kabupaten Maybrat
<b>Latar Belakang</b>	<p>Musyawarah Perencanaan Pembangunan Otonomi Khusus (Musrenbang Otsus) merupakan forum antar pelaku pembangunan dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah dalam kerangka Otonomi Khusus, yang dilaksanakan dalam satu rangkaian dengan Musrenbang jangka menengah dan Musrenbang tahunan daerah. Kabupaten Maybrat mengundang BPP Papua Barat Daya sebagai salah satu narasumber pada kegiatan tersebut.</p> <p>Kabupaten Maybrat merupakan daerah otonom baru hasil pemekaran dari Kabupaten Sorong Selatan. Pelaksanaan pendampingan Musrenbang Tahun 2027 oleh BPP menjadi bagian dari tugas untuk memastikan proses perencanaan berjalan dengan baik serta sasaran pembangunan daerah dapat tercapai secara tepat.</p>
<b>Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjadi narasumber pada kegiatan Musrenbang Otsus Kabupaten Maybrat.</li> <li>2. Melaksanakan sinkronisasi program dan kegiatan pembangunan Kabupaten Maybrat.</li> <li>3. Melaksanakan SHEK melalui pendampingan desk sesuai misi percepatan pembangunan di Kabupaten Maybrat.</li> </ol>
<b>Peserta Kegiatan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sekretaris daerah kabupaten Maybrat</li> <li>2. Kepala Kejaksaan Negeri Sorong</li> <li>3. Anggota Pokja Sehat (sebagai narasumber)</li> <li>4. Anggota Pokja cerdas</li> </ol>

	<p>5. Anggota Pokja produktif</p> <p>6. Pimpinan dan anggota DPRK dan DPR Pengangkatan</p> <p>7. Pimpinan OPD</p> <p>8. Kepala Distrik</p> <p>9. Tokoh agama/Adat/masyarakat/Perempuan/LSM</p>
<b>Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan</b>	Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, Koordinasi
<b>Misi/Keterangan</b>	Papua Sehat, Papua Cerdas, Kolaborasi Program
<b>Poin-Poin Pembahasan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Arah kebijakan pembangunan di Indonesia.</li> <li>2. Arah kebijakan pembangunan di Papua.</li> <li>3. Diskusi bersama peserta kegiatan.</li> <li>4. Penandatanganan berita acara.</li> <li>5. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten Maybrat dinilai belum sepenuhnya melaksanakan amanat Permen Bappenas Nomor 1 Tahun 2025, di mana pelaksanaan desk tidak dilakukan dan hanya melaksanakan pleno. Beberapa faktor penyebab antara lain: <ul style="list-style-type: none"> <li>• OPD belum melakukan penginputan Renja sehingga penarikan program melalui SIPD belum dapat dilakukan.</li> <li>• Musrenbang tingkat distrik telah dilaksanakan, namun tidak dibahas kembali dalam pleno.</li> <li>• BPP sebagai badan pengarah telah memberikan arahan terkait kondisi baseline indikator Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif di Kabupaten Maybrat sebagai bahan evaluasi sekaligus dasar perencanaan program Tahun 2027.</li> </ul> </li> </ol>
<b>Hasil Kegiatan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersusunnya berita acara pelaksanaan Musrenbang.</li> <li>2. Sidang pleno ditutup dengan arahan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Maybrat.</li> </ol>

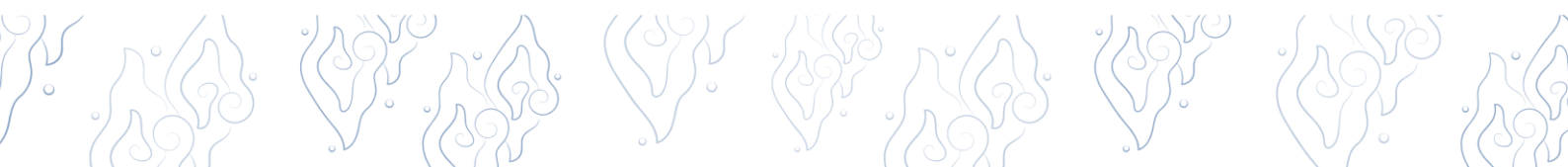
	<p>3. Penandatanganan berita acara dilakukan, namun khusus BPP hanya memberikan paraf koordinasi sebagai bentuk pertimbangan evaluasi dengan catatan bahwa penyusunan program perlu diselesaikan dan disampaikan kembali kepada BPP.</p>
<p><b>Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut</b></p>	<p>1. Perlu lebih menaati tenggat waktu pelaksanaan Musrenbang serta tahapan- tahapan yang dilaksanakan sebelum musrenbang</p> <p>2. Perlu dilakukan SHEK bersama BAPPEDA Maybrat dalam rangka memastikan program perencanaan 2027</p>
<p><b>Dokumentasi</b></p>	





### Kegiatan 16

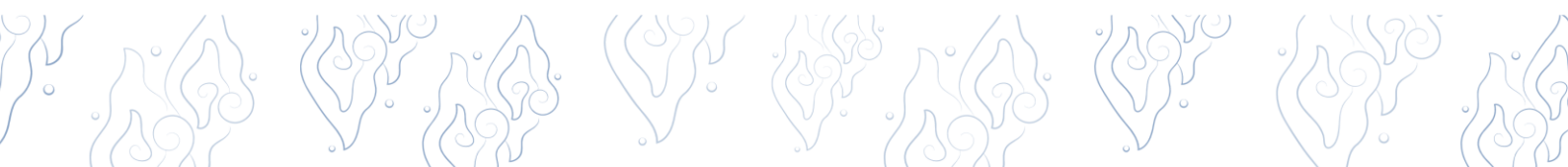
<b>Nama Kegiatan</b>	Peran Aktif BPP PBD (Arahan & SHEK) dalam Kegiatan Musrenbang Otonomi Khusus dan RKPD Kabupaten Tambrau
<b>Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)</b>	Senin-Selasa, 27-28 April 2026 di Aula Kantor Bappedalitbang Fef, Kabupaten Tambrau
<b>Latar Belakang</b>	Musyawarah Perencanaan Pembangunan Otonomi Khusus (Musrenbang Otsus) merupakan forum antar



	<p>pelaku pembangunan dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan daerah dalam kerangka Otonomi Khusus, yang dilaksanakan dalam satu rangkaian dengan Musrenbang jangka menengah dan Musrenbang tahunan daerah. Dalam pelaksanaan Musrenbang Otsus Kabupaten Tambrau, BPP Papua Barat Daya dihadirkan sebagai tim pembahas dan narasumber.</p> <p>Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Tambrau untuk perencanaan Tahun 2027 merupakan implementasi Permen Bappenas Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Musrenbang Otonomi Khusus Papua.</p>
<p><b>Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan)</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjadi pengarah dan narasumber dalam pelaksanaan Musrenbang.</li> <li>2. Melakukan sinkronisasi dan evaluasi program.</li> <li>3. Melaksanakan SHEK perencanaan pembangunan Tahun 2027 bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Tambrau.</li> </ol>
<p><b>Peserta Kegiatan</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bupati kabupaten Tambrau</li> <li>2. Wakil Bupati kabupaten Tambrau</li> <li>3. Sekda kabupaten tambrau</li> <li>4. Forkopimda kabupaten tambrau</li> <li>5. Tokoh adat, Tokoh masyarakat, tokoh Pemuda dan tokoh Perempuan</li> <li>6. Anggota MRP</li> <li>7. Anggota DPR Kabupaten</li> <li>8. Kepala OPD</li> <li>9. LSM</li> <li>10. Lembaga Masyarakat Pengelola Pendidikan (YPK, YPPK)</li> </ol>
<p><b>Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan</b></p>	<p>Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, Koordinasi</p>

<b>Misi/Keterangan</b>	Papua Sehat, Papua Cerdas, Papua Produktif, Papua Polhukam/Damai, Kolaborasi
<b>Poin-Poin Pembahasan</b>	<p><b>Hari Pertama</b></p> <p>Kegiatan dimulai dengan Desk Pokja Sehat dan dilanjutkan oleh Pokja lainnya, di mana pada setiap desk telah dikelompokkan OPD sesuai misi percepatan pembangunan.</p> <p>Khusus pada tema Papua Cerdas, beberapa fokus pembahasan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Diskusi kolaborasi program dalam upaya mencapai misi Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif.</li> <li>2. Diskusi bersama terkait prioritas pembangunan pendidikan di Kabupaten Tambrauw.</li> <li>3. Pelaksanaan Sekolah Berpola Asrama (SBA). Sesuai amanat RPJMN 2025–2029, SBA memiliki lokus di Kabupaten Tambrauw sehingga pengembangannya menjadi penting untuk direncanakan. Saat ini jenjang SMP telah tersedia dan sedang dalam tahapan pengembangan untuk jenjang SMA. SBA dikelola oleh satuan pendidikan YPPK dan menampung peserta didik dari 24 distrik di Kabupaten Tambrauw. Namun demikian, daya tampung dan fasilitas pendukung masih memerlukan penguatan.</li> <li>4. Pengembangan Sekolah Sepanjang Hari (SSH). SSH dipandang penting dalam upaya menekan angka putus sekolah serta meningkatkan keterampilan literasi dan numerasi siswa. Survei awal telah dilakukan sejak Tahun 2025 dan diharapkan implementasi program dapat dimulai pada Tahun 2027.</li> </ol>

	<p>5. Pengembangan sarana dan prasarana sekolah. Keterbatasan fiskal daerah menyebabkan pengembangan sarana dan prasarana pendidikan belum merata di seluruh wilayah. Pada Tahun 2027, fokus pengembangan diarahkan pada pembangunan SMK di wilayah Sausapor dan Kebar.</p> <p>6. Upaya peningkatan akreditasi satuan pendidikan. Rendahnya kapasitas fiskal daerah menyebabkan sebagian besar satuan pendidikan di Kabupaten Tambrauw masih terakreditasi C. Kondisi ini berdampak pada rendahnya mutu pendidikan serta terbatasnya kuota beasiswa afirmasi ADEM dan ADIK.</p> <p><b>Hari Kedua</b></p> <p>Pelaksanaan pleno dengan agenda:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyampaian arah kebijakan pembangunan Papua oleh BPP Papua Barat Daya.</li> <li>2. Penyampaian arah kebijakan pembangunan provinsi dan kabupaten oleh Bapperida Provinsi Papua Barat Daya.</li> </ol>
<b>Hasil Kegiatan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersusunnya berita acara pelaksanaan Musrenbang.</li> <li>2. Hasil diskusi telah ditindaklanjuti melalui sistem perencanaan SIPPP dan akan diintegrasikan melalui sistem tersebut. Pokja bertanggung jawab memastikan program percepatan pembangunan berjalan sesuai amanat lokus guna mempercepat capaian indikator Papua Cerdas di Kabupaten Tambrauw.</li> </ol>
<b>Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan Musrenbang perlu lebih memperhatikan kepatuhan terhadap jadwal sesuai regulasi yang berlaku.</li> </ol>



2. Beberapa program percepatan seperti Sekolah Berpola Asrama (SBA) dan Sekolah Sepanjang Hari (SSH) disepakati untuk diusulkan pembiayaannya melalui Pemerintah Provinsi pada Musrenbang Otsus tingkat provinsi.

### Dokumentasi

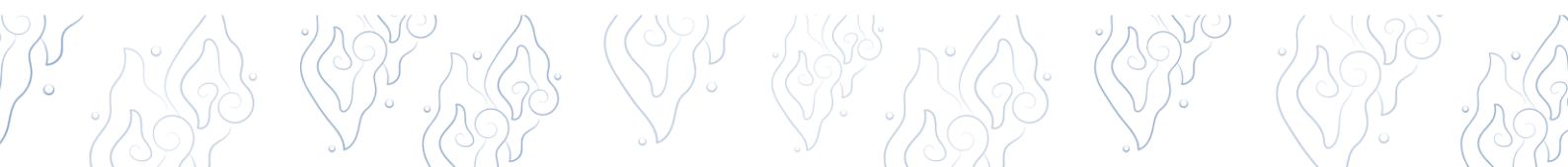




### Kegiatan 17

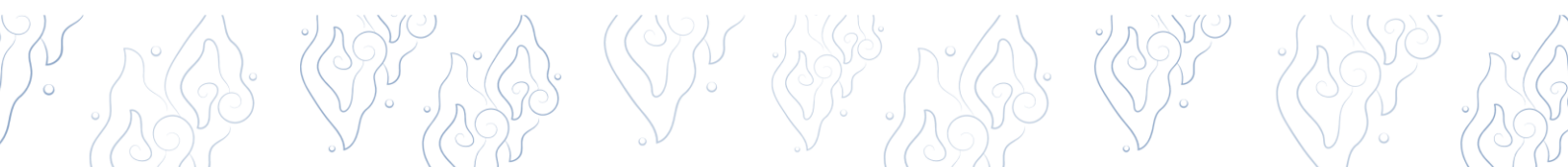
<b>Nama Kegiatan</b>	Peran Aktif BPP PBD (SHEK) dalam Kegiatan Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Tahun 2027 Provinsi Papua Barat Daya
<b>Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)</b>	Selasa, 28 April 2026 di Rylich Panorama Hotel Sorong
<b>Latar Belakang</b>	<p>Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 Provinsi Papua Barat Daya merupakan bagian penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, terarah, dan berkelanjutan. Forum Konsultasi Publik RKPD menjadi wadah strategis untuk menyerap aspirasi masyarakat, pemangku kepentingan, perangkat daerah, akademisi, serta lembaga terkait guna menyempurnakan dokumen perencanaan pembangunan daerah.</p> <p>Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui pelaksanaan Musrenbang Otonomi Khusus dan RKPD Tahun 2027 menitikberatkan pada sinkronisasi program pembangunan daerah dengan kebijakan Otonomi Khusus Papua agar pembangunan lebih tepat sasaran,</p>

	<p>efektif, dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.</p> <p>Dalam konteks tersebut, BP3OKP melalui BPP Papua Barat Daya dan Pokja SHEK (Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi) mengambil peran aktif dalam memastikan arah pembangunan daerah selaras dengan kebijakan percepatan pembangunan Otonomi Khusus Papua, khususnya pada misi Papua Produktif.</p> <p>Keterlibatan aktif BPP Papua Barat Daya (SHEK) dalam Forum Konsultasi Publik RKPD Tahun 2027 merupakan bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan, sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi terhadap kebijakan pembangunan daerah agar selaras dengan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) dan agenda pembangunan nasional di Tanah Papua. Hal ini juga sejalan dengan pelaksanaan fungsi SHEK dalam kegiatan konsultasi publik pembangunan daerah sebelumnya yang menitikberatkan pada sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pembangunan daerah.</p>
<p><b>Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan)</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan tugas dan fungsi BP3OKP dalam bidang Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) terhadap arah kebijakan pembangunan daerah Provinsi Papua Barat Daya.</li> <li>2. Mengharmonisasikan program dan kebijakan pembangunan daerah dengan program prioritas Otonomi Khusus Papua serta Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP).</li> <li>3. Memastikan program pembangunan daerah mendukung misi Papua Produktif melalui penguatan ekonomi masyarakat, pemberdayaan UMKM,</li> </ol>



	<p>pengembangan potensi lokal, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat adat Papua.</p> <p>4. Memberikan masukan strategis terhadap penyusunan RKPD Tahun 2027 agar lebih partisipatif, terukur, efektif, dan tepat sasaran.</p> <p>5. Mengawal sinkronisasi antara program RKPD reguler dan program Otonomi Khusus agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan dan penganggaran pembangunan daerah.</p>
<b>Peserta Kegiatan</b>	<p>Peserta dalam kegiatan Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Tahun 2027 Provinsi Papua Barat Daya terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya;</li> <li>2. Wakil Gubernur dan jajaran Pemerintah Daerah;</li> <li>3. Bappeda/Bapperida Provinsi Papua Barat Daya;</li> <li>4. Organisasi Perangkat Daerah (OPD);</li> <li>5. BP3OKP/BPP Papua Barat Daya;</li> <li>6. Akademisi dan tenaga ahli;</li> <li>7. Tokoh masyarakat dan tokoh adat;</li> <li>8. Perwakilan dunia usaha dan UMKM;</li> <li>9. Perwakilan masyarakat sipil;</li> <li>10. Pemangku kepentingan pembangunan lainnya.</li> </ol>
<b>Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan</b>	Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, Koordinasi
<b>Misi/Keterangan</b>	Papua Sehat, Papua Cerdas, Papua Produktif dan Papua Damai/Polhukam
<b>Poin-Poin Pembahasan</b>	<p>Dalam pelaksanaan kegiatan Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Tahun 2027, BPP Papua Barat Daya (SHEK) menjalankan fungsi strategis BP3OKP untuk mendukung misi Papua Produktif melalui pendekatan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi.</p> <p>Peran aktif tersebut diwujudkan melalui:</p>

	<p><b>1. Sinkronisasi Program Pembangunan</b> BPP Papua Barat Daya melakukan sinkronisasi antara program pembangunan daerah dengan kebijakan Otonomi Khusus Papua agar seluruh program prioritas pembangunan ekonomi daerah dapat berjalan terpadu dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Papua.</p> <p><b>2. Harmonisasi Kebijakan Pembangunan</b> Harmonisasi dilakukan terhadap usulan program perangkat daerah dengan arah pembangunan nasional, RIPP, serta kebutuhan riil masyarakat Papua Barat Daya, khususnya pada sektor ekonomi produktif, UMKM, pariwisata, dan penguatan ekonomi lokal berbasis potensi daerah.</p> <p><b>3. Evaluasi Perencanaan Pembangunan</b> Melalui forum konsultasi publik, BPP Papua Barat Daya turut melakukan evaluasi terhadap substansi rancangan awal RKPD Tahun 2027 agar program yang direncanakan memiliki indikator keberhasilan yang jelas, tepat sasaran, dan berkelanjutan.</p> <p><b>4. Koordinasi Antar Pemangku Kepentingan</b> BPP Papua Barat Daya membangun koordinasi dengan pemerintah daerah, perangkat daerah, serta pemangku kepentingan pembangunan lainnya guna memastikan terjadinya integrasi program pembangunan Otonomi Khusus dengan RKPD Provinsi Papua Barat Daya.</p> <p><b>Penguatan Papua Produktif</b> Fokus utama Papua Produktif diarahkan pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penguatan ekonomi kerakyatan.</li> <li>2. Pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif.</li> <li>3. Pemberdayaan masyarakat adat.</li> </ol>
--	---



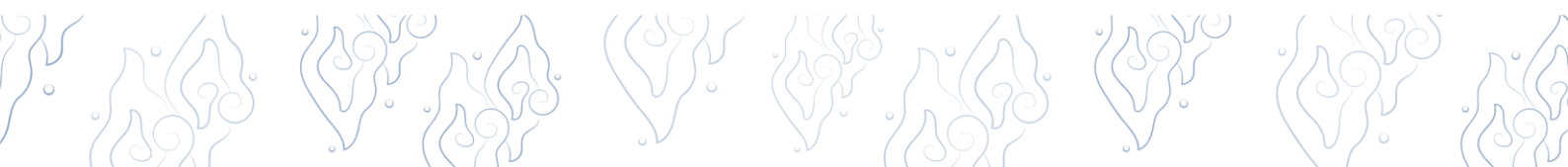
	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Pengembangan kawasan ekonomi berbasis potensi lokal.</li> <li>5. Penguatan sektor pariwisata dan industri daerah.</li> <li>6. Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.</li> </ol>
<b>Hasil Kegiatan</b>	Telah dihasilkan dokumen Rancangan Awal RKPD Provinsi Papua Barat Daya Tahun Anggaran 2027 yang memuat berbagai fokus pembangunan pada misi Papua Produktif.
<b>Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan Konsultasi Publik RKPD Tahun 2027 sebaiknya tidak dilaksanakan pada minggu keempat April 2026, melainkan pada awal minggu pertama April 2026.</li> <li>2. Kegiatan Rancangan Awal RKPD sebaiknya disusun agar tidak bertabrakan dengan jadwal Musrenbang tingkat Kabupaten/Kota, sehingga dapat dihadiri pula oleh perwakilan OPD teknis dan pimpinan Bappeda Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat Daya.</li> </ol>
<b>Dokumentasi</b>	-

### Kegiatan 18

<b>Nama Kegiatan</b>	Pertemuan Strategis (SHEK) bersama Anggota Komisi IV DPR RI (Bapak Robert J. Kardinal)
<b>Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)</b>	Rabu, 29 April 2026 di Sekretariat BPP Papua Barat Daya
<b>Latar Belakang</b>	SHEK merupakan bagian dari tugas dan fungsi Pokja yang dilaksanakan dalam rangka mengidentifikasi berbagai permasalahan, sekaligus membangun komunikasi dan koordinasi bersama mitra sinergi, salah satunya DPR RI.

<p><b>Tujuan Kegiatan</b> (Tujuan Pokja dalam Kegiatan)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan fungsi koordinasi dan harmonisasi.</li> <li>2. Menyampaikan berbagai permasalahan pembangunan yang dihadapi di Papua Barat Daya.</li> <li>3. Meminta dukungan DPR RI untuk mempercepat penyelesaian persoalan strategis.</li> <li>4. Mendorong agar manfaat pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat adat dan Orang Asli Papua.</li> </ol>
<p><b>Peserta Kegiatan</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Anggota DPR RI Komisi IV</li> <li>2. Anggota BPP PBD,</li> <li>3. Pokja Sehat</li> <li>4. Pokja Cerdas</li> <li>5. Pokja Produktif</li> </ol>
<p><b>Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan</b></p>	<p>Sinkronisasi, Harmonisasi dan Koordinasi</p>
<p><b>Misi/Keterangan</b></p>	<p>Papua Sehat, Papua Cerdas, Papua Produktif, Papua Polhukam/Damai</p>
<p><b>Poin-Poin Pembahasan</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program bedah rumah dan rumah subsidi bagi masyarakat miskin.</li> <li>2. Izin pinjam pakai kawasan hutan untuk pembangunan jalan di lima distrik Kabupaten Tambrau.</li> <li>3. Pengelolaan tambang rakyat agar memberikan manfaat kepada masyarakat adat.</li> <li>4. Penyiapan lahan untuk pembangunan rumah sakit vertikal di Kota Sorong.</li> <li>5. Hubungan kerja antara Badan Pengarah Papua dan Komite Eksekutif Papua.</li> </ol>

	<p>6. Penyaluran dana carbon trade kepada masyarakat adat.</p> <p>Beberapa poin diskusi yang diharmonisasikan sesuai tugas dan fungsi BPP:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peran dan fungsi BPP dan Komite Eksekutif (KE).</li> <li>2. Strategi percepatan pembangunan Papua Barat Daya, khususnya pada tema pendidikan dan SSH.</li> <li>3. Pengelolaan potensi daerah yang masih minim.</li> <li>4. Kondisi keamanan di Tambrau dan Maybrat.</li> </ol>
<p><b>Hasil Kegiatan</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Telaahan mengenai BPP dan KE dijelaskan secara tertulis. Secara singkat, KE merupakan bagian dari BPP yang memiliki tugas dan kewenangan membantu BPP dalam meningkatkan strategi percepatan pembangunan Papua Barat Daya.</li> <li>2. Percepatan pembangunan Papua memerlukan sinergi antar lembaga bentukan Otsus agar pola kerja bottom-up dapat dioptimalkan.</li> <li>3. Papua Barat Daya masih bergantung pada Transfer ke Daerah (TKD). Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu menyiapkan perencanaan dan investasi guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selain itu, perlu disiapkan mitra eksternal untuk mengelola potensi daerah yang dimiliki. Peningkatan PAD diharapkan dapat membuat pemerintah daerah lebih fleksibel dibandingkan hanya bergantung pada TKD.</li> <li>4. Para pihak yang telah ditangkap akan melanjutkan proses pada tahapan pengadilan. Penegakan hukum positif tetap dilaksanakan, namun pendekatan sosioantropologis di masyarakat tetap perlu dilakukan oleh pemerintah daerah dan keluarga.</li> </ol>



	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Robert J. Kardinal menyatakan siap mendukung program bedah rumah, dengan catatan perlu adanya penyesuaian biaya akibat tingginya harga barang di Papua.</li> <li>6. Akan dibentuk tim khusus untuk mempercepat pengurusan izin pinjam pakai kawasan hutan di Tambrau dengan BPP sebagai leading sector.</li> <li>7. Pengelolaan tambang rakyat dapat didorong melalui pembentukan koperasi agar masyarakat adat dapat ikut menikmati hasilnya.</li> <li>8. Lokasi rumah sakit vertikal disarankan dipindahkan ke area yang lebih aman dan strategis.</li> <li>9. BP3OKP diminta menyiapkan dokumen pendukung terkait tugas dan fungsi Komite Eksekutif Papua sebagai bahan tindak lanjut saat DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri membahas kembali tugas dan fungsi kedua lembaga tersebut.</li> <li>10. Robert J. Kardinal telah berkoordinasi dengan Kementerian Kehutanan agar dana carbon trade dapat diterima langsung oleh masyarakat adat.</li> </ol>
<p><b>Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun telaahan tertulis terkait tugas dan fungsi BPP dan Komite Eksekutif Papua.</li> <li>2. Mendorong sinergi antar lembaga bentukan Otsus guna mengoptimalkan percepatan pembangunan Papua Barat Daya.</li> <li>3. Mendorong pemerintah daerah untuk menyiapkan perencanaan investasi dan pengelolaan potensi daerah guna meningkatkan PAD dan mengurangi ketergantungan terhadap TKD.</li> <li>4. Mendukung pelaksanaan proses hukum yang berjalan, disertai pendekatan sosioantropologis kepada masyarakat oleh pemerintah daerah dan keluarga.</li> </ol>

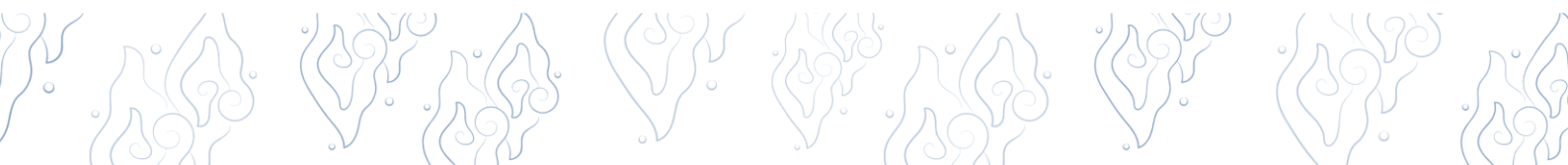
5. BP3OKP menindaklanjuti pembentukan tim khusus terkait izin kawasan hutan di Tambrau bersama pihak Robert J. Kardinal.
6. Menyiapkan dokumen pendukung terkait revisi Peraturan Presiden dan surat koordinasi kelembagaan.
7. Berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait lokasi pembangunan rumah sakit vertikal.
8. Mendorong pembentukan koperasi masyarakat adat untuk pengelolaan tambang rakyat.
9. Mengawal penyaluran dana carbon trade agar lebih mudah diakses oleh masyarakat adat.

### Dokumentasi

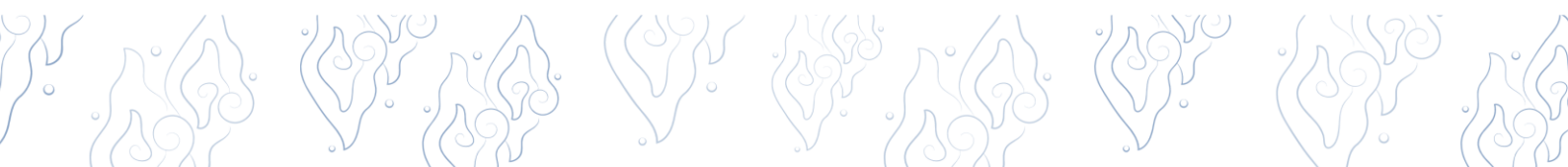


**Kegiatan 19**

<b>Nama Kegiatan</b>	Peran Aktif (Arahan & SHEK) dalam Kegiatan Pembukaan Musrenbang RKPD & Otonomi Khusus Tahun 2027 Provinsi Papua Barat Daya
<b>Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)</b>	Kamis, 30 April 2026 di Rylich Panorama Hotel Sorong
<b>Latar Belakang</b>	<p>Kegiatan Pembukaan Musrenbang RKPD dan Otonomi Khusus Tahun 2027 Provinsi Papua Barat Daya dilaksanakan sebagai tahapan awal proses perencanaan pembangunan daerah. Badan Pengarah Papua menjadi salah satu narasumber yang menyampaikan materi pada kegiatan tersebut.</p> <p>Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Otonomi Khusus dan RKPD Provinsi Papua Barat Daya merupakan salah satu tahapan penting dalam pelaksanaan pembangunan daerah.</p> <p>Musrenbang RKPD dan Otonomi Khusus Tahun 2027 dilaksanakan untuk menyusun rencana pembangunan Papua Barat Daya yang selaras dengan kebijakan nasional, kebutuhan daerah, serta prioritas pembangunan Orang Asli Papua (OAP). Kegiatan ini menjadi forum untuk menyamakan arah pembangunan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota agar program yang direncanakan tepat sasaran dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.</p>
<b>Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghadiri kegiatan pembukaan Musrenbang Papua Barat Daya.</li> <li>2. Menyusun rencana pembangunan daerah Provinsi Papua Barat Daya dengan dukungan TKD Otsus Tahun 2027.</li> </ol>

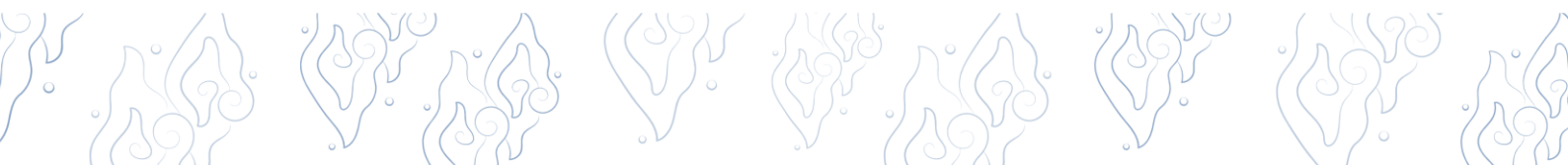


	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Mengawal agar program Otonomi Khusus benar-benar berpihak kepada Orang Asli Papua.</li> <li>4. Memberikan masukan strategis terhadap prioritas pembangunan Tahun 2027.</li> <li>5. Memastikan perencanaan berbasis data, kebutuhan nyata masyarakat, dan sesuai regulasi.</li> <li>6. Mendorong sinkronisasi program provinsi dan kabupaten/kota melalui Program Strategis Bersama (PPSB).</li> <li>7. Mengawasi tata kelola Dana Otsus agar lebih efektif, tepat sasaran, dan akuntabel.</li> </ol>
<b>Peserta Kegiatan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Anggota BPP dan Anggota Pokja BPP Papua Barat Daya</li> <li>2. Gubernur Papua Barat Daya</li> <li>3. Wakil Gubernur Papua Barat Daya</li> <li>4. Forkopimda</li> <li>5. DPRD</li> <li>6. MRP</li> <li>7. Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Tokoh Perempuan</li> <li>8. LSM</li> <li>9. Akademisi</li> <li>10. Pemerintah dan OPD Provinsi Papua Barat Daya</li> <li>11. Kepala Bapelitbang Kabupaten Kota</li> <li>12. Bupati dan Wali Kota Beserta OPD 5 Kabupaten dan Satu Kota</li> <li>13. Pimpinan Instansi Vertikal, TNI, Polri</li> <li>14. Perwakilan Perguruan Tinggi</li> <li>15. Perwakilan Masyarakat</li> <li>16. NGO</li> </ol>
<b>Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan</b>	Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, Koordinasi, Kolaborasi Program

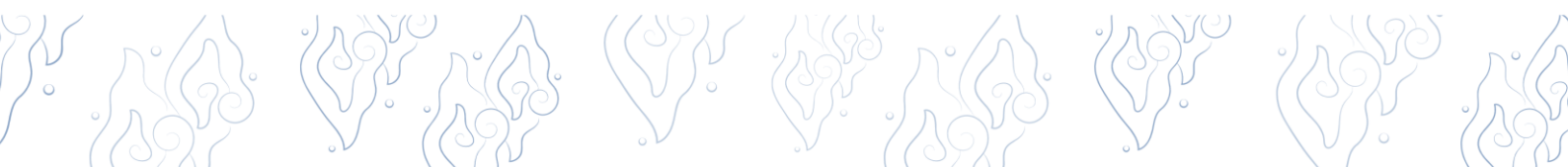


<b>Misi/Keterangan</b>	Papua Sehat, Papua Cerdas, Papua Produktif, Papua Polhukam/Damai
<b>Poin-Poin Pembahasan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Arah kebijakan pembangunan di Papua.</li> <li>2. Prinsip-prinsip perencanaan program pembangunan dalam Otonomi Khusus.</li> <li>3. Peran Badan Pengarah dalam mengarahkan dan mengawasi pembangunan.</li> <li>4. Pembukaan kegiatan oleh Wakil Gubernur Papua Barat Daya.</li> </ol> <p>Kegiatan dilanjutkan dengan pleno bersama kementerian/lembaga, yaitu Bappenas, Kementerian Keuangan, BPS, BPKP, dan BP3OKP.</p> <p>Pleno tahap II dilaksanakan pada hari kedua oleh Bapperida Papua Barat Daya dan BPKAD Papua Barat Daya.</p> <p>Selanjutnya dilaksanakan desk yang dibagi menjadi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Desk Papua Cerdas</li> <li>• Desk Papua Sehat</li> <li>• Desk Papua Produktif (2 desk)</li> </ul> <p>Masing-masing desk dipimpin oleh Kepala Bidang dari Bapperida Papua Barat Daya dan didampingi anggota Pokja. Pelaksanaan desk berjalan dengan baik, di mana usulan OPD kabupaten/kota didengarkan langsung oleh OPD provinsi. Hasil usulan kabupaten/kota kemudian dilanjutkan dengan penyampaian usulan dari OPD provinsi yang diasistensi langsung oleh Bapperida. Setelah desk selesai, kegiatan dilanjutkan dengan penarikan dan rekapitulasi RKPD Tahun 2027.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Pentingnya sinkronisasi RKPD, RPJMD, RPJMN, RAP Otsus, dan penganggaran daerah.</li> <li>6. Tema pembangunan Tahun 2027 berfokus pada percepatan pertumbuhan ekonomi melalui</li> </ol>

	<p>produktivitas, investasi, industri, pariwisata, dan UMKM.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>7. Dana Otsus harus dikelola secara efektif dan berdampak langsung bagi kesejahteraan OAP.</li> <li>8. Papua Barat Daya masih menghadapi tantangan berupa kemiskinan, stunting, pengangguran, dan keterbatasan infrastruktur.</li> <li>9. Perencanaan pembangunan harus berbasis data statistik yang akurat dan indikator kinerja yang terukur.</li> <li>10. Setiap daerah diarahkan untuk mengembangkan potensi unggulan sesuai karakteristik wilayah.</li> <li>11. Ditekankan pentingnya disiplin penyusunan RAP Otsus untuk mencegah keterlambatan dan SILPA.</li> <li>12. Penguatan PAD, BUMD, dan kualitas belanja daerah menjadi prioritas.</li> </ol>
<p><b>Hasil Kegiatan</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumentasi kegiatan.</li> <li>2. Laporan kegiatan.</li> <li>3. Hasil evaluasi dan penarikan RKPD Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2027 dengan pagu indikatif sebesar Rp1,4 triliun. Hasil Musrenbang tersebut disepakati melalui penandatanganan berita acara.</li> <li>4. Disepakati bahwa prioritas pembangunan Tahun 2027 diarahkan pada peningkatan kualitas SDM, kesehatan, pendidikan, ekonomi lokal, dan infrastruktur.</li> <li>5. Dana Otsus difokuskan untuk program yang berdampak langsung kepada OAP.</li> <li>6. Program Strategis Bersama (PPSB) akan menjadi acuan sinkronisasi program provinsi dan kabupaten/kota.</li> </ol>



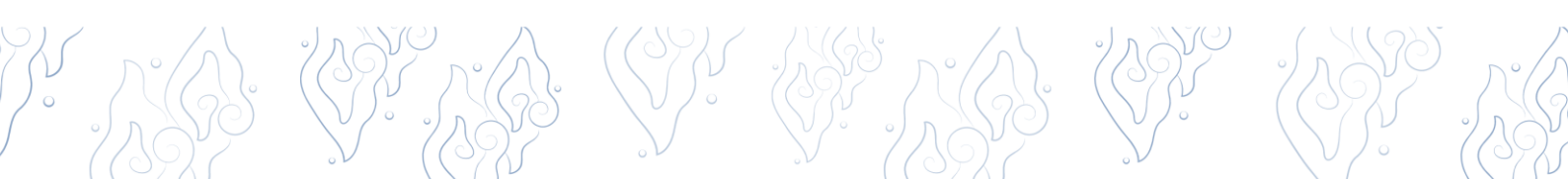
	<p>7. Pemerintah daerah didorong meningkatkan kualitas perencanaan, percepatan penyerapan anggaran, dan tata kelola pemerintahan.</p> <p>8. Penggunaan data BPS menjadi dasar dalam penetapan target pembangunan.</p>
<p><b>Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut</b></p>	<p>1. Pelaksanaan Musrenbang diharapkan dapat lebih taat terhadap regulasi dan timeline pelaksanaan.</p> <p>2. Berdasarkan hasil analisis selama mengikuti desk, masih banyak program OPD yang belum dapat diakomodir oleh pemerintah provinsi karena keterbatasan kewenangan sesuai amanat PP Nomor 106 Tahun 2021. Hal tersebut berdampak pada perlambatan peningkatan indikator baseline Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif. Oleh karena itu, disarankan untuk mendesain konsep Program Prioritas Strategis Bersama (PPSB) antara kabupaten/kota dan provinsi. PPSB merupakan amanat PMK Nomor 33 Tahun 2024 dan diharapkan menjadi langkah strategis percepatan pembangunan di Papua Barat Daya.</p> <p>3. Pemerintah daerah perlu segera menyusun RAP Otsus Tahun 2027 secara tepat waktu dan sesuai ketentuan.</p> <p>4. Program yang diusulkan harus fokus pada kebutuhan prioritas OAP dan memiliki hasil yang terukur.</p> <p>5. Sinkronisasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota perlu diperkuat agar tidak terjadi tumpang tindih program.</p> <p>6. Pengawasan terhadap penggunaan Dana Otsus harus diperketat untuk mencegah SILPA dan penyimpangan.</p> <p>7. OPD diminta meningkatkan kualitas data, perencanaan, dan pelaporan program.</p>



8. BP3OKP perlu terus melakukan pengawalan dan evaluasi terhadap implementasi program Otsus di Papua Barat Daya.

Dokumentasi





## **BAB IV**

### **CAPAIAN, PERMASALAHAN DAN TANTANGAN**

#### **4.1 Capaian**

Sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi SHEK yang telah dilakukan oleh BPP Papua Barat Daya pada bulan April 2026, berikut beberapa capaian dan/ atau kemajuan strategis yang diperoleh:

##### **1. Penguatan Peran BPP dalam Sinkronisasi dan Koordinasi Pembangunan Papua**

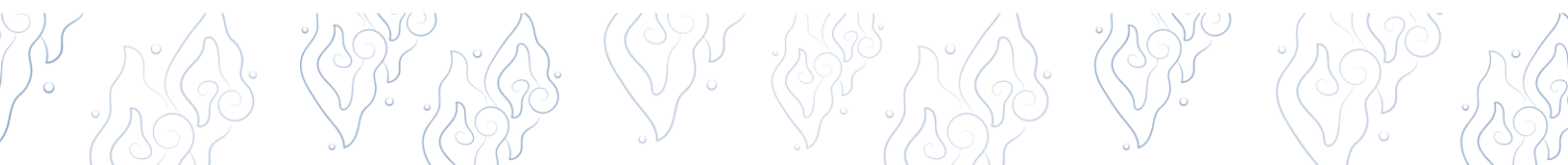
- Meningkatnya peran BPP Papua Barat Daya dalam memfasilitasi koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan stakeholder pembangunan di wilayah Papua Barat Daya.
- Terbangunnya sinergi lintas sektor dalam mendukung implementasi program prioritas pembangunan berbasis RIPPP dan RAPPP.
- Menguatnya fungsi SHEK melalui berbagai forum koordinasi, audiensi, dan fasilitasi kegiatan strategis pembangunan daerah.

##### **2. Penguatan Tata Kelola dan Integrasi Program Otonomi Khusus**

- Terlaksananya berbagai forum koordinasi dan harmonisasi program antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga mitra pembangunan.
- Meningkatnya komitmen lintas sektor dalam mendukung tata kelola pembangunan yang transparan, akuntabel, dan berbasis kebutuhan masyarakat OAP.
- Menguatnya sinkronisasi program nasional dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan prioritas pembangunan Papua.

##### **3. Penguatan Misi Papua Sehat**

- Meningkatnya kapasitas dan wawasan Anggota Pokja Papua Sehat terkait isu kesehatan berbasis lingkungan, perubahan iklim, dan kesehatan masyarakat adat melalui forum internasional.
- Terbangunnya jejaring kerja sama internasional dan peluang kolaborasi dalam penguatan sistem kesehatan berbasis komunitas di Papua Barat Daya.



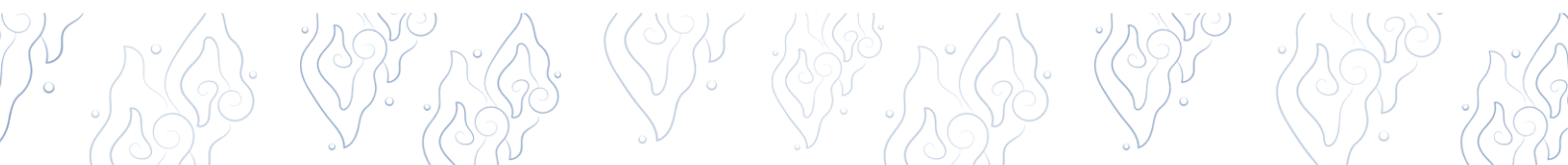
- Menguatnya koordinasi lintas sektor dalam mendukung implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan peningkatan akses layanan kesehatan masyarakat.
- Teridentifikasinya kebutuhan penguatan layanan kesehatan, SDM kesehatan, serta penguatan regulasi terkait pelayanan kesehatan di wilayah terpencil dan wilayah khusus.
- Terbukanya peluang investasi strategis di bidang kesehatan melalui rencana pembangunan fasilitas layanan kesehatan swasta di Kota Sorong.

#### **4. Penguatan Misi Papua Cerdas**

- Terlaksananya harmonisasi program prioritas pendidikan nasional dengan RIPPPI melalui kolaborasi bersama BPMP Papua Barat dan pemerintah daerah.
- Meningkatnya pemahaman pemerintah daerah terkait evaluasi rapor pendidikan dan penyusunan program pendidikan berbasis kebutuhan daerah.
- Menguatnya koordinasi dengan UNICEF dan mitra pembangunan dalam mendukung program literasi, numerasi, peningkatan mutu pendidikan, dan program afirmasi pendidikan tinggi.
- Terlaksananya penyaluran bantuan studi akhir bagi mahasiswa Papua sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan akses pendidikan tinggi bagi OAP.

#### **5. Penguatan Stabilitas Sosial dan Papua Damai**

- Terlaksananya koordinasi intensif antara BPP Papua Barat Daya, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Pusat terkait penanganan situasi keamanan di Kabupaten Maybrat dan Tambrau.
- Terfasilitasinya audiensi Pemerintah Daerah Papua Barat Daya bersama Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan RI dalam rangka penanganan kasus KKB dan pemulihan kondisi masyarakat terdampak konflik.
- Menguatnya komitmen lintas sektor dalam mendukung pendekatan penanganan konflik secara terpadu melalui pendekatan keamanan, sosial, budaya, dan pembangunan wilayah.



- Terbangunnya komunikasi dan sinergi kelembagaan antara BPP Papua Barat Daya dan KEPPP dalam mendukung percepatan pembangunan Papua.
- Terlaksananya dukungan koordinasi dan fasilitasi kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia di Papua Barat Daya sebagai bagian dari penguatan sinergi pusat dan daerah.

#### **6. Penguatan Kolaborasi dan Kemitraan Pembangunan**

- Terbangunnya kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga pusat, mitra pembangunan, dan stakeholder strategis dalam mendukung pembangunan Papua Barat Daya.
- Meningkatnya komunikasi dan koordinasi lintas sektor dalam mendukung pelaksanaan program prioritas pembangunan daerah.
- Teridentifikasinya kebutuhan penguatan kelembagaan, tata kelola, dan kapasitas SDM dalam mendukung implementasi program pembangunan secara berkelanjutan.

### **4.2 Permasalahan**

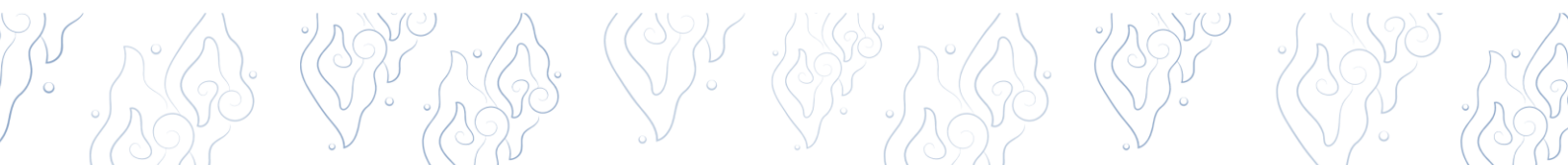
Meskipun berbagai capaian/kemajuan telah diperoleh, terdapat sejumlah permasalahan yang masih memerlukan perhatian dan penanganan lebih lanjut:

#### **1. Belum Optimalnya Sinkronisasi Program dan Perencanaan**

- Masih terdapat perbedaan pemahaman dan sinkronisasi antara program pusat dan daerah dalam implementasi program prioritas pembangunan Papua.
- Koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan program pembangunan masih perlu diperkuat agar lebih terintegrasi dan berkelanjutan.

#### **2. Keterbatasan Layanan Dasar dan SDM**

- Keterbatasan tenaga kesehatan dan tenaga pendidik masih menjadi tantangan pada beberapa wilayah, khususnya daerah terpencil dan wilayah khusus.
- Sarana dan prasarana layanan kesehatan dan pendidikan di beberapa wilayah masih belum optimal.
- Masih terdapat kendala validasi dan sinkronisasi data pelayanan masyarakat, termasuk data kepesertaan JKN.



### 3. Permasalahan Stabilitas Keamanan dan Sosial

- Gangguan keamanan di Kabupaten Maybrat dan wilayah sekitarnya masih berdampak terhadap pelayanan pemerintahan, pendidikan, kesehatan, dan aktivitas ekonomi masyarakat.
- Pengungsian masyarakat akibat konflik masih memerlukan perhatian melalui program pemulihan sosial dan pelayanan dasar.
- Pendekatan penanganan konflik secara terpadu masih memerlukan penguatan koordinasi lintas sektor dan lintas kewenangan.

### 4. Keterbatasan Kapasitas Kelembagaan dan Tata Kelola

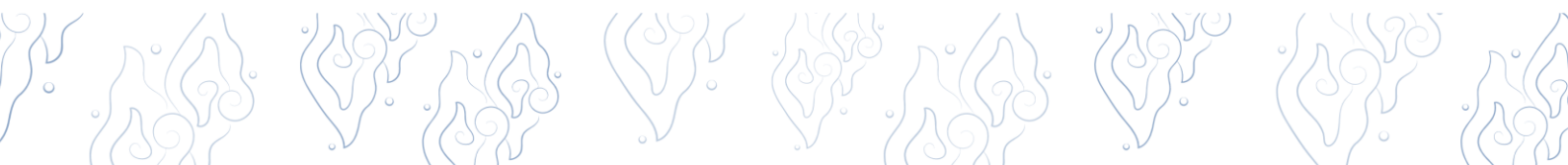
- Kapasitas kelembagaan dan SDM dalam mendukung pengelolaan program prioritas pembangunan masih perlu diperkuat.
- Penguatan tata kelola program dan pengawasan pelaksanaan pembangunan masih memerlukan dukungan sistem monitoring dan evaluasi yang lebih optimal.

### 5. Tantangan Pengembangan Investasi dan Ekonomi Daerah

- Proses koordinasi dan dukungan teknis terhadap investasi strategis daerah masih perlu ditingkatkan.
- Iklim investasi daerah memerlukan dukungan tata kelola dan koordinasi lintas OPD yang lebih efektif dan responsif.

## 4.3 Tantangan

Dalam rangka percepatan pembangunan di Papua Barat Daya, terdapat beberapa tantangan strategis yang perlu diantisipasi dan ditangani secara komprehensif, yaitu:



### **1. Penguatan Peran BPP dalam Pelaksanaan SHEK**

Mengoptimalkan peran BPP Papua Barat Daya sebagai orkestrator pembangunan dalam pelaksanaan fungsi sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi lintas sektor pembangunan.

### **2. Penguatan Integrasi Program Berbasis RIPPP dan RAPP**

Menjamin agar seluruh program prioritas pemerintah pusat dan daerah dapat terintegrasi secara konsisten dengan arah kebijakan percepatan pembangunan Papua.

### **3. Peningkatan Kualitas Layanan Dasar**

Mendorong pemerataan dan peningkatan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan, khususnya pada wilayah terpencil, wilayah khusus, dan masyarakat OAP.

### **4. Penguatan Sistem Data dan Perencanaan**

Mengembangkan sistem data pembangunan yang lebih akurat, terintegrasi, dan berbasis bukti dalam mendukung perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah.

### **5. Penguatan Stabilitas Sosial dan Papua Damai**

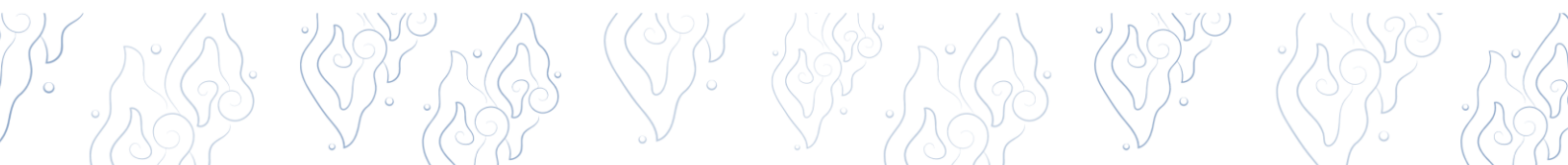
Mendorong pendekatan penanganan konflik yang lebih terpadu melalui kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat keamanan, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat.

### **6. Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM**

Meningkatkan kapasitas aparatur, kelembagaan, serta kualitas koordinasi lintas sektor dalam mendukung efektivitas pelaksanaan program pembangunan.

### **7. Penguatan Kolaborasi dan Kemitraan Pembangunan**

Membangun sinergi yang lebih kuat antara pemerintah, lembaga pusat, mitra pembangunan, perguruan tinggi, dan stakeholder lainnya dalam mendukung pembangunan Papua Barat Daya yang berkelanjutan.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

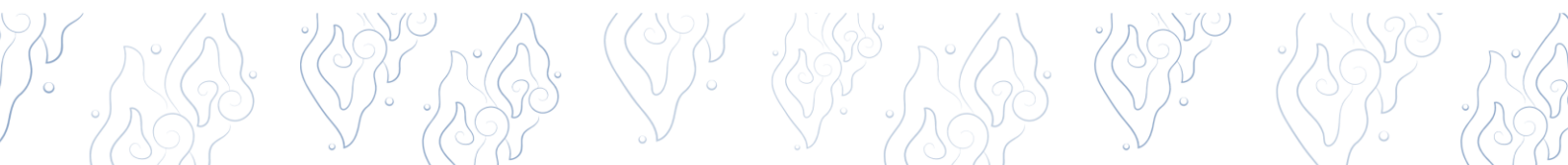
Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengarah Papua Barat Daya selama periode April 2026 menunjukkan bahwa peran Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) berjalan secara aktif dalam mendukung percepatan pembangunan Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat Daya.

Berbagai kegiatan yang dilaksanakan tidak hanya memperkuat koordinasi lintas sektor, tetapi juga menghasilkan penguatan arah kebijakan, harmonisasi program pembangunan, serta peningkatan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan mitra pembangunan dalam mendukung implementasi percepatan pembangunan Papua.

Secara umum, pelaksanaan kegiatan pada periode ini menunjukkan penguatan peran BP3OKP/BPP Papua Barat Daya sebagai bagian dari orkestrasi pembangunan Papua yang lebih terintegrasi, berbasis kolaborasi, serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat Orang Asli Papua (OAP).

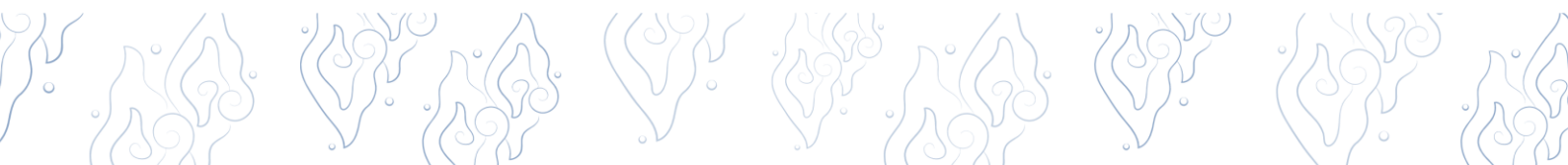
Beberapa kesimpulan yang dapat dirumuskan dari pelaksanaan kegiatan tersebut antara lain:

1. Menguatnya peran BP3OKP/BPP Papua Barat Daya dalam pelaksanaan fungsi SHEK, khususnya dalam mendukung sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah berbasis RIPPP dan RAPPP.



2. Terbangunnya koordinasi lintas sektor antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga vertikal, mitra pembangunan, dan stakeholder strategis dalam mendukung percepatan pembangunan Papua Barat Daya.
3. Menguatnya perhatian terhadap peningkatan kualitas layanan dasar, khususnya pada sektor kesehatan dan pendidikan, melalui penguatan program JKN, peningkatan mutu pendidikan, pengembangan SDM, dan dukungan terhadap program afirmasi bagi OAP.
4. Teridentifikasinya berbagai isu strategis pembangunan daerah, antara lain keterbatasan layanan dasar di wilayah terpencil, kebutuhan penguatan SDM, sinkronisasi data, serta penguatan tata kelola pembangunan dan pengawasan program Otonomi Khusus.
5. Meningkatnya penguatan koordinasi dalam mendukung stabilitas Papua Damai, khususnya melalui fasilitasi komunikasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat terkait penanganan konflik dan pemulihan masyarakat terdampak gangguan keamanan di Papua Barat Daya.
6. Terbukanya peluang penguatan kolaborasi pembangunan melalui kerja sama dengan mitra nasional maupun internasional dalam mendukung pembangunan kesehatan, pendidikan, tata kelola pemerintahan, dan pembangunan sosial masyarakat Papua.

Namun demikian, masih terdapat berbagai permasalahan dan tantangan yang memerlukan perhatian bersama, terutama terkait integrasi program lintas sektor, penguatan sistem data dan perencanaan, peningkatan kualitas layanan dasar, pemerataan pembangunan wilayah, serta stabilitas sosial dan keamanan sebagai prasyarat utama percepatan pembangunan di Papua Barat Daya.



## 5.2 Rekomendasi

Sebagai tindak lanjut atas capaian, permasalahan, dan tantangan yang telah diidentifikasi, direkomendasikan beberapa langkah strategis sebagai berikut:

### 1. Penguatan Peran BPP dalam Pelaksanaan Tusi SHEK

- Memperkuat posisi BP3OKP/BPP Papua Barat Daya sebagai fasilitator dan koordinator dalam mendukung sinkronisasi program percepatan pembangunan Papua.
- Mengoptimalkan fungsi evaluasi, koordinasi, dan harmonisasi program pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah.

### 2. Penguatan Integrasi Program Berbasis RIPPP dan RAPPP

- Memastikan seluruh program prioritas pembangunan di Papua Barat Daya terintegrasi dengan RIPPP dan RAPPP.
- Mendorong konsistensi integrasi program dalam dokumen perencanaan daerah, termasuk RPJMD dan RKPD.

### 3. Penguatan Sistem Data dan Perencanaan

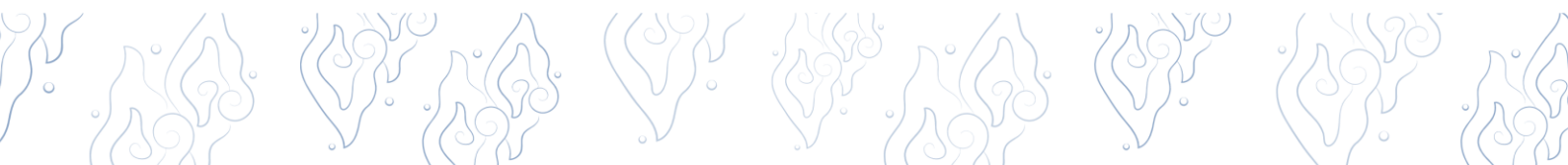
- Mendorong penguatan sistem data pembangunan yang akurat, terintegrasi, dan berkelanjutan sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan.
- Mengoptimalkan pemanfaatan data statistik dan data sektoral dalam mendukung evaluasi serta pengambilan keputusan pembangunan daerah.

### 4. Peningkatan Kualitas Layanan Dasar

- Mendorong pemerataan dan peningkatan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan, khususnya pada wilayah terpencil, wilayah khusus, dan wilayah dengan keterbatasan akses.
- Mendukung penguatan kapasitas tenaga kesehatan dan tenaga pendidik melalui kolaborasi lintas sektor dan mitra pembangunan.

### 5. Penguatan Stabilitas Sosial dan Papua Damai

- Mendorong pendekatan terpadu dalam penanganan konflik dan gangguan keamanan melalui sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat keamanan, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat.
- Mendukung percepatan pemulihan sosial, ekonomi, dan pelayanan dasar bagi masyarakat terdampak konflik di Papua Barat Daya.



## **6. Penguatan Tata Kelola dan Pengawasan Program**

- Mendorong penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis kinerja dalam pelaksanaan program Otonomi Khusus Papua.
- Mengoptimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program pembangunan secara berkala dan terukur.

## **7. Penguatan Kolaborasi dan Kemitraan Pembangunan**

- Memperkuat kerja sama antara pemerintah daerah, lembaga pusat, perguruan tinggi, mitra pembangunan, dan stakeholder strategis lainnya dalam mendukung pembangunan Papua Barat Daya.
- Mendorong pengembangan model pembangunan kolaboratif berbasis kebutuhan masyarakat dan potensi daerah.

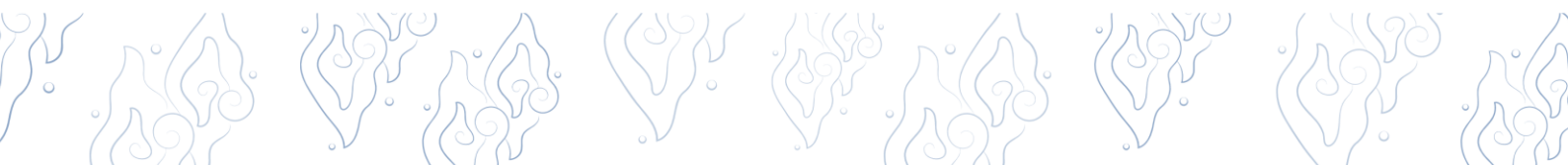
## **8. Penguatan Ekonomi Lokal dan Pemberdayaan OAP**

- Mendorong pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal serta pemberdayaan pelaku usaha Orang Asli Papua (OAP).
- Mendukung pengembangan investasi strategis yang berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

### **5.3 Penutup**

Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Pengarah Papua Barat Daya Periode April 2026 ini menggambarkan dinamika pelaksanaan percepatan pembangunan yang terus berkembang, sekaligus menunjukkan penguatan peran BP3OKP/BPP Papua Barat Daya dalam mendukung pelaksanaan pembangunan Otonomi Khusus Papua di Provinsi Papua Barat Daya.

Pelaksanaan berbagai kegiatan koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, serta fasilitasi lintas sektor selama periode ini menunjukkan adanya komitmen bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan stakeholder pembangunan dalam mendukung percepatan pembangunan yang lebih terintegrasi, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Papua.



Diharapkan laporan ini dapat menjadi:

1. Bahan evaluasi bagi pimpinan dan pemangku kepentingan;
2. Dasar pengambilan keputusan dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah;
3. Instrumen penguatan koordinasi dan sinergi lintas sektor dalam pelaksanaan program percepatan pembangunan Papua.

Ke depan, percepatan pembangunan di Papua Barat Daya memerlukan penguatan kolaborasi lintas sektor, peningkatan kualitas tata kelola pembangunan, pemanfaatan data yang akurat, serta penguatan keberpihakan terhadap Orang Asli Papua (OAP) sebagai fokus utama pembangunan.

Dengan komitmen tersebut, Badan Pengarah Papua Barat Daya akan terus menjalankan peran strategisnya dalam mengawal implementasi kebijakan percepatan pembangunan Papua agar tetap selaras dengan arah pembangunan nasional dan mampu menghadirkan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua Barat Daya secara berkelanjutan dan berkeadilan.

